Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2015



BAPPEDA
Kabupaten Sintang

Tahun 2010

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar viii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-12
1.4. Sistematika Penulisan I-13
1.5. Maksud dan Tujuan I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-5
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-15
2.3.1. Aspek Pelayanan Urusan Wajib II-15
2.3.2. Aspek Pelayanan Urusan Pilihan II-30
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-38

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah III-1
3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah III-7
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-9
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-9
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-10
3.3. Kerangka Pendanaan III-11

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-2
4.2. Isu Strategis IV-4

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH V-1
5.1. Visi V-1
5.2. Misi V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran V-4
5.3.1. Tujuan V-4
5.3.2 Sasaran V-4
5.4. Penggerak Utama (*Prime Mover*) Pembangunan Daerah V-7

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN VI-1
6.1. Strategi Pembangunan VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan VI-7
6.2.1. Memberdayakan Potensi Usaha Ekonomi Kerakyatan VI-7

6.2.2. Meningkatkan Peluang Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Usaha Produktif VI-8
6.2.3. Melaksanakan Pembangunan Daerah yang Serasi dan Seimbang VI-9
6.2.4. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi Secara Terpadu dan Menyeluruh VI-12
6.2.5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Serta Pembinaan Generasi Muda, Seni Budaya dan Kegiatan Keagamaan VI-13
6.2.6. Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan Memperhatikan Tuntutan dan Dinamika Masyarakat Dalam Suasana Demokratisasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah VI-16
6.2.7. Menerapkan Asas, Prinsip, Standar dan Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM VI-17
6.2.8. Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan VI-18
6.3. Keterkaitan Misi, Strategi, Kebijakan, Program Pembangunan dan Urusan Pemerintah VI-19
6.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah VI-27
6.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah VI-28
6.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah VI-29
6.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah VI-30

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-1
9.1. Pedoman Transisi IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan IX-4

BAB X PENUTUP X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Yang Mengurus KTP, KK, dan Akta Kelahiran Kabupaten Sintang Tahun 2010	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Kebutuhan Kekurangan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Desa Terisolir per-Kecamatan Kab. Sintang ..	II-4
Tabel 2.5	Perkembangan PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)	II-5
Tabel 2.6	PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Konstan Dirinci Menurut Sektor Kegiatan/ Lapangan Usaha, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah).....	II-5
Tabel 2.7	Struktur Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (%)	II-6
Tabel 2.8	Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010	II-7
Tabel 2.9	Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (Rupiah)	II-7
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 Menurut Sektor Kegiatan/Lapangan Usaha (%)	II-9
Tabel 2.11	Angka Kelulusan	II-15
Tabel 2.12	Rata-Rata Nilai UAN	II-15
Tabel 2.13	Guru Layak Mengajar	II-15
Tabel 2.14	Angka Anak Putus Sekolah	II-16
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar	II-16
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Murni	II-16
Tabel 2.17	Rasio Murid Terhadap Sekolah	II-16
Tabel 2.18	Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas	II-17
Tabel 2.19	Rasio Murid Terhadap Guru	II-17

Tabel 2.20	Rasio Guru Terhadap Sekolah	II-17
Tabel 2.21	Rasio Ruang kelas Terhadap Sekolah	II-18
Tabel 2.22	Kondisi Ruang Kelas Kategori Baik	II-18
Tabel 2.23	Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Jenjang Pendidikan 2010	II-18
Tabel 2.24	Jumlah Tenaga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2010	II-19
Tabel 2.25	Jumlah Guru Yang Sudah Bersertifikasi Per-Kecamatan Kabupaten Sintang Tahun 2010	II-19
Tabel 2.26	Jumlah Kematian Bayi Yang Tercatat di Kabupaten Sintang Tahun 2007-2009	II-20
Tabel 2.27	Indikator Pelayanan Rumah Sakit Ade M. Djoen Tahun 2005-2009	II-20
Tabel 2.28	Cakupan Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Puskesmas Se-Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009	II-21
Tabel 2.29	Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum dan Dokter Gigi) Dan Paramedis (Perawat dan Bidan) per 100.000 Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009	II-21
Tabel 2.30	Ketersediaan Obat Sesuai Dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Sintang 2005-2009	II-21
Tabel 2.31	Cakupan Vitamin A, Fe 90, Fe 30 dan UCI Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009	II-22
Tabel 2.32	IPM Kabupaten Sintang Tahun 2004-2008	II-22
Tabel 2.33	Jenis Permukaan Jalan Tahun 2005-2009	II-23
Tabel 2.34	Klasifikasi Jalan Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat Tahun 2005-2009	II-23
Tabel 2.35	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2005-2009	II-24
Tabel 2.36	Kelayakan Kondisi Terminal dan Kondisi Dermaga Tahun 2005-2009	II-25
Tabel 2.37	Jumlah Kendaraan Lulus Uji Tahun 2005-2009	II-25
Tabel 2.38	Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2006-2009	II-26
Tabel 2.39	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2007-2009	II-26

Tabel 2.40	Penyelesaian Ijin Lokasi Tahun 2007-2009	II-26
Tabel 2.41	Rasio Penduduk Yang Memiliki KTP Tahun 2005-2009	II-26
Tabel 2.42	Rasio Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2005-2009	II-27
Tabel 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2005-2009	II-28
Tabel 2.44	Jumlah Pengangguran Tahun 2005-2009	II-28
Tabel 2.45	Jumlah Koperasi Tahun 2005-2009	II-29
Tabel 2.46	Jumlah Proyek PMA, Proyek PMDN dan Nilai Investasi Tahun 2005-2009	II-29
Tabel 2.47	Nama Perusahaan HPH di Kabupaten Sintang	II-32
Tabel 2.48	Nama Perusahaan HTI di Kabupaten Sintang	II-32
Tabel 2.49	Luas Kebun Karet di Kabupaten Sintang Berdasarkan Sumber Dana Di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2010	II-33
Tabel 2.50	Perusahaan Sawit di Kabupaten Sintang	II-33
Tabel 2.51	Perusahaan Karet di Kabupaten Sintang	II-35
Tabel 2.52	Jenis Bahan Tambang, Lokasi dan Status	II-37
Tabel 2.53	Jenis Logam dan Lokasinya	II-38
Tabel 2.54	Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sintang	II-39
Tabel 2.55	Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Kondisi Jalan Tahun 2009-2010 (Kilometer)	II-40
Tabel 2.56	Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2010 (KM)	II-40
Tabel 2.57	Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Jenis Permukaan Tahun 2009-2010 (Kilometer).....	II-41
Tabel 2.58	Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2010 (Kilometer)	II-41
Tabel 2.59	Banyaknya Kendaraan Wajib Uji yang Terdata di Kabupaten Sintang Tahun 2010	II-42
Tabel 2.60	Penambahan Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2010	II-42
Tabel 2.61	Lalu Lintas Melalui Bandar Udara Susilo Tahun 2010	II-43

Tabel 2.62	Banyaknya Kantor Pos Menurut Klasifikasi Tahun 2010	II-43
Tabel 2.63	Banyaknya Pelanggan Air Minum Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2005-2009	II-45
Tabel 2.64	Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2009	II-45
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Milyar Rp.)	III-2
Tabel 3.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp.)	III-3
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendaoatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010	III-5
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sintang	III-6
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sintang	III-7
Tabel 3.6	Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp.)	III-8
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sintang	III-9
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sintang	III-10
Tabel 3.9	Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sintang	III-10
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sintang	III-11
Tabel 3.11	Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, 2011-2015 (Juta Rp.)	III-11
Tabel 3.12	Prediksi PAD Kabupaten Sintang, 2011-2015 (Juta Rp.)	III-12
Tabel 3.13	Prediksi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, 2011-2015 (Juta Rp.)	III-13
Tabel 3.14	Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang 2011-2015 (Juta Rp.)	III-13
Tabel 3.15	Pegeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang	III-14
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	III-14

Tabel 3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang	III-15
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-6
Tabel 6.1	Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Sintang	VI-3
Tabel 6.2	Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan	VI-18
Tabel 6.3	Keterkaitan Misi, Strategi, Kebijakan, Program Pembangunan, dan Urusan Pemerintah	VI-19
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sintang	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Program Prioritas yang Disertai Kebutuhab Pendanaan Kabupaten Sintang	VII-17
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Sintang Tahun 2010-2015	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang	VIII-5
Tabel 9.1	Program Utama Transisi	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Sintang	II-2
Gambar 2.2.	Distribusi PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2009 (ADHK-2000)	II-6
Gambar 2.3.	Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Sintang Tahun Tahun 2005-2009	II-8
Gambar 2.4.	Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (%)	II-9
Gambar 2.5.	Inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009	II-10
Gambar 2.6.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang Tahun 2007-2009	II-11
Gambar 2.7.	Jumlah Rumah Ibadah Kabupaten Sintang Tahun 2009	II-14
Gambar 2.8.	Produksi Beberapa Tanaman Pangan (Ton)	II-30
Gambar 2.9.	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sintang Tahun 2009	II-31
Gambar 2.10.	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya	II-33
Gambar 2.11.	Jumlah Petani Berdasarkan Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2009	II-35
Gambar 2.12.	Populasi Ternak (Ekor)	II-36
Gambar 2.13.	Populasi Unggas (Ekor)	II-36
Gambar 2.14.	Panjang Jalan Kabupaten Sintang Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2008-2009	II-39
Gambar 2.15.	Komposisi Pelanggan Air Minum Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2009	II-44
Gambar 2.16.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sintang ...	II-49
Gambar 2.17.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan	II-49
Gambar 2.18.	Tindakan Kriminal Persatuan Wilayah Kabupaten Sintang	II-51

Gambar 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010(Milyar Rp) III-2

Gambar 3.2. Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010(Juta Rp) III-4

Gambar 3.3. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010(Juta Rp) III-9

Bagan 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan V-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global. Kabupaten Sintang yang dulunya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sintang serta memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan pertemuan beberapa sungai besar dan terletak di simpang tiga aliran sungai, selama ini juga terus melakukan pembangunan di segala bidang agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Sintang dalam jangka waktu menengah (lima tahun) perlu disusun sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang telah menyusun RPJMD tahap I yang merupakan tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2006 – 2026 dan sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan dunia usaha tentang arah pembangunan Kabupaten Sintang dari tahun 2006-2010. Mengingat bahwa RPJMD tahun 2006-2010 akan berakhir, serta Kabupaten Sintang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Juni 2010 yang dimenangkan oleh pasangan Drs. MILTON CROSBY, M.Si dan Drs. IGNASIUS JUAN, MM, maka diperlukan penyusunan RPJMD yang baru atau tahap II untuk lima tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, yaitu “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

(5) Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

(6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

(7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

(8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3868);

(9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

(10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

(12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

(13) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

(14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

(15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

(16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

(17) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

(18) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

(19) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

(21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

(23) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

(24) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

(25) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(27) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

(28) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

(29) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

(30) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

(31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(32) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

(33) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

(34) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

(35) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

(36) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

(37) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

(38) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

(39) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

(40) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

(41) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

(42) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

(43) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

(44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

(45) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

(46) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

(47) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(48) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

(49) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

(50) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Dan Atau Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);

(51) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi

Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

(52) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

(53) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

(54) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

(55) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);

(56) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

(57) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44863);

(58) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

(59) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(60) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

(61) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

(62) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

(63) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

(64) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

(65) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(66) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan pajak Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(67) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(68) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(69) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

(70) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Dan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

(71) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

(72) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

(73) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

(74) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

(75) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

(76) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

(77) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

(78) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

(79) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

(80) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(81) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

(82) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

(83) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

(84) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

(85) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang.

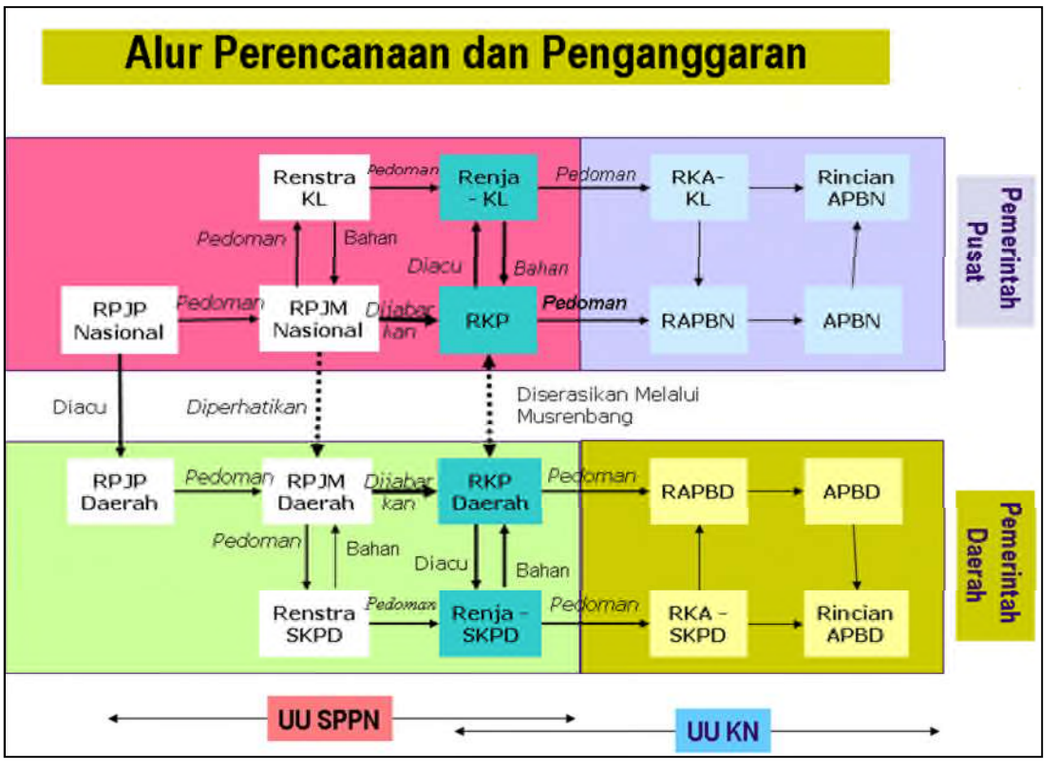
(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V PERNYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB X PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sintang secara berjenjang.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

(1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

(2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sintang, APBN, dan sumber dana lainnya;

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/kota lainnya, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

(4) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

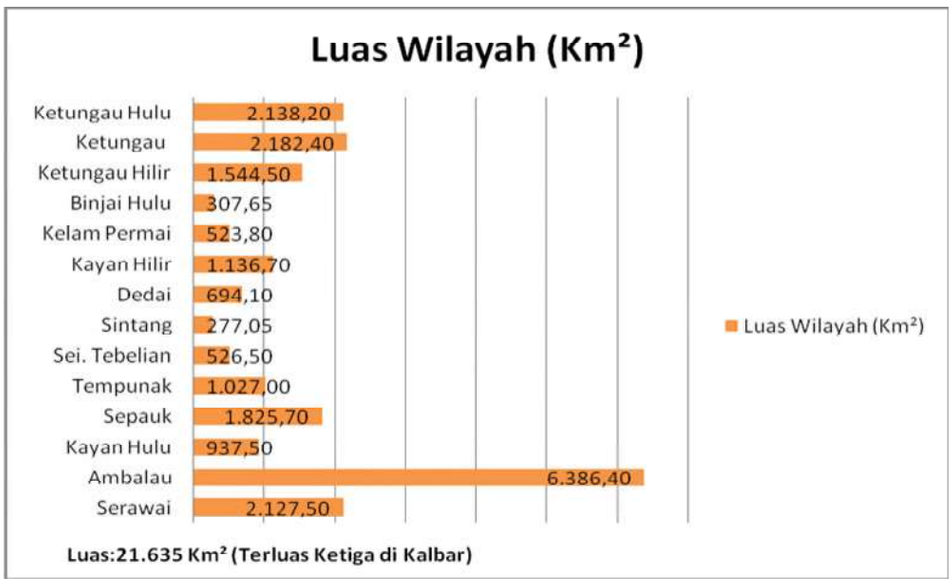
Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1^{o}05' Lintang Utara dan 0^{o}46' Lintang Selatan serta 110^{o}50' Bujur Timur dan 113^{o}20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km², hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara. Letak geografisnya adalah:

- Utara: berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- Timur: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa. Kecamatan-kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Berikut gambar luas wilayah Kabupaten Sintang:

Gambar 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang



Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 262,38 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2009 terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 447,20 milimeter dengan hari hujan sebanyak 25 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 131,60 milimeter dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Kecepatan angin pada tahun 2009 setiap bulannya berkisar antara 1,0 knots sampai dengan 3,4 knots perjam. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 24,0 persen sampai dengan 75,0 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,2 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,0^{o}C sampai dengan 28,0^{o}C. Temperatur udara terendah sebesar 22,5^{o}C dan temperatur udara tertinggi mencapai 34,1^{o}C.

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS Kabupaten Sintang sebanyak 364.759 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,61% per tahun periode 2000-2010. Penduduk ini tersebar di empat belas kecamatan, namun persebarannya tidak merata. Jumlah penduduk

terbanyak berada di Kecamatan Sintang (59.410 atau 16,29%), dan jumlah ini hampir lima kali lipat dari jumlah penduduk di Kecamatan Binjai Hulu (11.332 atau 3,11%). Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan (sex ratio 107) dan kondisi ini terdapat di semua kecamatan. Kabupaten Sintang dapat dikategorikan pada berpenduduk jarang karena kepadatan penduduknya baru mencapai 17 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sintang (214 jiwa/km^2) dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2 jiwa/km^2). Menurut data Lembaga PPD Kabupaten Sintang tahun 2009, penduduk yang memiliki KTP baru mencapai 78,64%. Kepemilikan akte lahir meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dan kini sudah mencapai 44,55%. Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk (SIAK) belum berjalan secara optimal. Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2010 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Sintang
Tahun 2010

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sintang	30.681	28.980	59.661
2.	Tempunak	13.626	12.514	26.140
3.	Sepauk	26.710	24.563	51.273
4.	Ketungau Hilir	10.860	10.081	20.941
5.	Ketungau Tengah	12.496	11.555	24.051
6.	Ketungau Hulu	10.931	10.139	21.070
7.	Dedai	13.210	12.406	25.616
8.	Kayan Hilir	13.780	12.733	26.513
9.	Kayan Hulu	13.361	12.863	26.224
10.	Serawai	10.367	9.780	20.147
11.	Ambalau	8.279	7.613	15.892
12.	Kelam Permai	9.404	8.869	18.273
13.	Sungai Tebelian	15.590	14.290	29.880
14.	Binjai Hulu	6.320	5.809	12.129
	Jumlah	**195.615**	**182.195**	**377.810**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2010

Untuk jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK, Jumlah Penduduk yang ber-KTP dan Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Yang Mengurus KTP, KK, dan Akta Kelahiran
Kabupaten Sintang
Tahun 2010

No.	Uraian	Tahun 2010
1.	Jumlah Peduduk yang mengurus KTP	82.325
2.	Jumlah Penduduk yang mengurusKartu Keluarga	53.373
3.	Jumlah Penduduk yang mengurus Akta Kelahiran	35.563

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2010

Untuk meningkatkan pelayan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang dibutuhkan kekurangan pegawai dengan kebutuhan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Kebutuhan Kekurangan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Pencatatan Sipil	Kependudukan	Pelayanan Informasi Kependudukan	Dokumentasi dan Sosialisasi
1.	Pengadministrasi	2	3	3	2
2.	Pulahta	3	4	-	2
3.	Operator SIAK	3	6	1	1
4.	Verifikator	4	4	-	-
5.	Superviser SIAK	-	-	1	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2010

Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Tertinggal. Sehingga masih banyak Kecamatan dan Desa yang masih terisolir. Data Jumlah Desa Terisolir per-Kecamatan yang tertinggal sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Desa Terisolir per- Kecamatan
Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Terisolir
1.	Ambalau	13
2.	Serawai	20
3.	Kayan Hulu	6
4.	Kayan Hilir	-
5.	Kelam Permai	-
6.	Dedai	-
7.	Binjai Hulu	-

8.	Ketungau Hilir	1
9.	Ketungau Tengah	2
10.	Ketungau Hulu	2
11.	Sungai Tebelian	-
12.	Tempunak	-
13.	Sepauk	-
14.	Sintang	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2010

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan cukup signifikan, yang tercermin dari capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2005–2010 seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2005-2010
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku	PDRB Harga Konstan 2000
2005	2.165.874,44	1.627.534,69
2006	2.431.249,21	1.709.174,02
2007	2.745.687,09	1.797.360,03
2008	3.105.961,14	1.881.764,67
2009	3.483.101,21	1.983.081,85
2010*	3.915.648,11	2.086.332,30

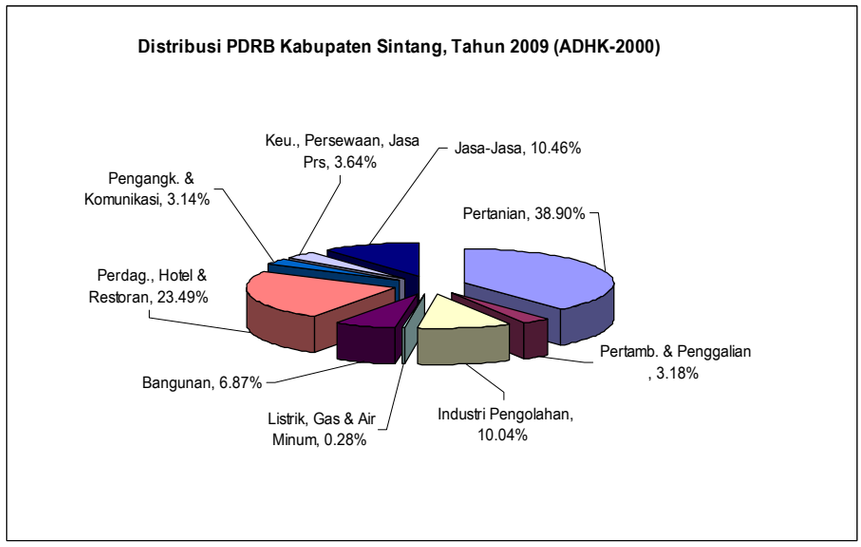
Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2011 * = angka sementara

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Konstan Dirinci Menurut Sektor Kegiatan/Lapangan Usaha, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

No.	SEKTOR	2006	2007	2008	2009	2010*
1.	Pertanian	681.040,33	706.312,56	735.178,00	771.143,48	798.603,63
2.	Pertamb. & Penggalian	56.235,99	58.522,52	60.708,27	63.471,64	66.669,88
3.	Industri Pengolahan	171.487,31	182.648,10	189.885,25	199.019,31	205.166,85
4.	Listrik, Gas & Air Minum	5.004,71	5.065,49	5.219,62	5.529,84	5.722,26
5.	Bangunan	114.034,42	122.364,45	129.769,95	139.270,68	150.867,80
6.	Perdag., Hotel & Restoran	393.127,02	417.409,14	439.543,64	463.733,13	494.586,40
7.	Pengangk., & Komunikasi	51.528,02	54.601,95	58.191,49	62.961,86	68.722,78
8.	Keu., Persewaan, Jasa Prsh	62.048,69	65.223,37	68.714,66	73.571,31	78.541,05
9.	Jasa-Jasa	174.667,53	185.212,45	194.553,79	204.380,59	213.451,65
	PDRB	**1.709.174,02**	**1.797.360,03**	**1.881.764,67**	**1.983.081,84**	**2.082.332,30**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2011 * = angka sementara

Gambar 2.2
Distribusi PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2009 (ADHK-2000)



Adapun struktur ekonomi Kabupaten Sintang dapat dijelaskan pad tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (%)

No	Kelompok Sektor	2005	2006	2007	2008	2009*	Rata²
1	Primer	43.71	43.14	42.55	42.29	42.08	42.75
2	Sekunder	16.76	17.00	17.25	17.26	17.18	17.09
3	Tertier	39.53	39.87	40.19	40.44	40.74	40.15
_	**Jumlah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2010 (diolah) . * = angka sementara

Perkembangan makroekonomi Kabupaten Sintang yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB selama periode 2005-2010, ternyata diimbangi pula dengan peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2005, PDRB perkapita harga berlaku sekitar Rp 6,30 juta, dan meningkat menjadi sekitar Rp 9.332 juta pada tahun 2009.

Tabel 2.8
Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2010

No.	Sektor	Peran Sektoral *)		L Q
		KALBAR	SINTANG	
1.	Pertanian	25,00	38,28	1,53
2.	Pertamb. dan Penggalian	1,76	3,20	1,81
3.	Industri Pengolahan	16,79	9,83	0,59
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,43	0,27	0,64
5.	Bangunan	8,35	7,32	0,87
6.	Perdag., Hotel dan Restoran	21,22	23,71	1,12
7.	Pengangk. Dan Komunikasi	9,29	3,29	0,35
8.	Keu., Persewaan dan Jasa Prshn	5,55	3,76	0,68
9.	Jasa - jasa	11,61	10,42	0,90

Sumber: BPS Kab. Sintang dan BPS Kalbar, Tahun 2011
* atas dasar harga berlaku

Tabel 2.9
Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita		Pendapatan Perkapita	
	Kab. Sintang	Kalbar	Kab. Sintang	Kalbar
2005	6.304.504	8.357.992	5.773.024	7.601.560,16
2006	6.940.081	9.158.071	6.355.021	8.326.632,75
2007	7.680.695	10.165.998	7.033.199	9.226.620,29
2008	8.508.131	11.394.038	7.790.881	10.134.543,34
2009 *	9.332.963	12.471.532	8.546.179	10.982.536,43

Sumber: BPS Kab. Sintang dan BPS Kalbar, Tahun 2010.

* = angka sementara

Pendapatan perkapita pada tahun 2005 sebesar Rp 5,77 juta dan meningkat menjadi Rp 8,55 juta pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan capaian pendapatan perkapita Kalimantan Barat pada tahun yang sama, tampak bahwa tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang masih di bawah rata-rata Kalimantan Barat.

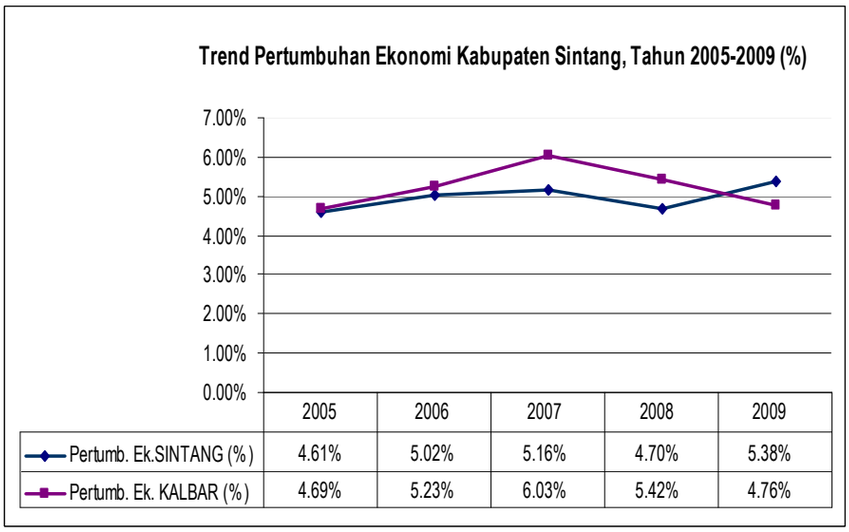
Gambar 2.3
Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009



Berdasarkan perkembangan PDRB harga konstan tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2005 sebesar 4,61%, dan meningkat menjadi 5,02% pada tahun 2006. Peningkatan pertumbuhan periode 2005-2006 dikarenakan tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan (tahun 2005=8,62%; tahun 2006=6,25%); bangunan (tahun 2005=6,42%; tahun 2006=7,07%); dan perdagangan, hotel dan restoran (tahun 2005=5,81%; tahun 2006=5,53%).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai tahun 2007, dengan capaian sebesar 5,16%. Tahun 2008, pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan menjadi 4,70%, dikarenakan melemahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan (3,96%); bangunan (6,05%); dan perdagangan, hotel dan restoran (tahun 5,30%) kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,38% yang didorong oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (7,01%) dan sektor jasa-jasa (6,65%).

Gambar 2.4
Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 (%)



Peningkatan PDRB Kabupaten Sintang menjadikan kinerja makroekonomi cukup baik. Laju pertumbuhan ekonomi periode 2005-2009 rata-rata sebesar 4,97%, sedikit lebih rendah dari Kalbar yang tumbuh rata-rata sebesar 5,23%. Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor. Pada tahun 2009, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Dari sembilan sektor di sisi penawaran, pertumbuhan tertinggi dihasilkan sektor pengangkutan/komunikasi (7,01%).

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009 Menurut Sektor Kegiatan/Lapangan Usaha (%)

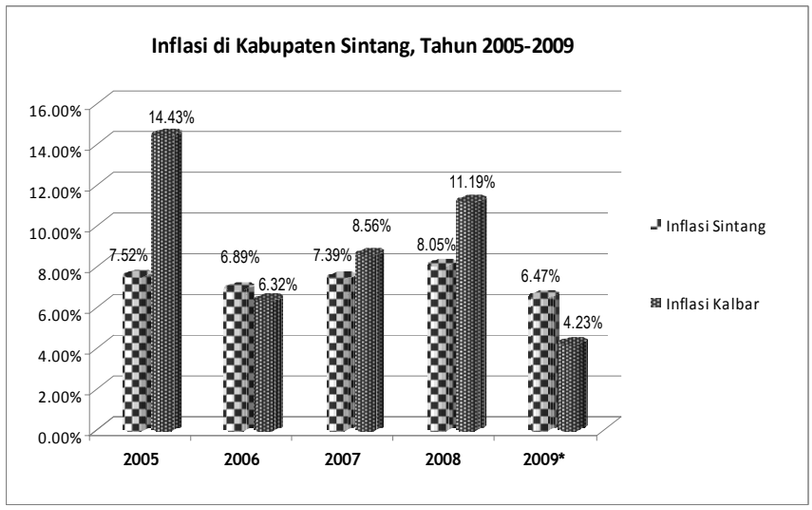
No	SEKTOR	2005	2006	2007	2008	2009*	Rata²
1	Pertanian	2.65	3.68	3.71	4.09	4.91	**3.81**
2	Pertamb. & Penggalian	3.72	3.20	4.07	3.73	3.86	**3.72**
3	Industri Pengolahan	8.62	6.25	6.51	3.96	4.86	**6.04**
4	Listrik, Gas & Air Minum	2.65	2.51	1.21	3.04	4.83	**2.85**
5	Bangunan	6.42	7.07	7.30	6.05	4.91	**6.35**
6	Perdag., Hotel & Restoran	5.81	5.53	6.18	5.30	5.99	**5.76**
7	Pengangk. & Komunikasi	4.21	4.88	5.97	6.57	7.01	**5.73**
8	Keu., Persewaan, Jasa Prsh	3.80	4.78	5.12	5.35	5.15	**4.84**
9	Jasa-Jasa	5.74	7.48	6.04	5.04	6.65	**6.19**
	Pertumb. PDRB Kab. Sintang	***4.61***	***5.02***	***5.16***	***4.70***	***5.38***	***4.97***
	Kalimantan Barat	***4.69***	***5.23***	***6.03***	***5.42***	***4.76***	***5.23***

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2010 (diolah) . * = angka sementara

Inflasi tahunan (y-o-y) Kabupaten Sintang pada akhir tahun 2009 sebesar 6,47%, atau turun dibandingkan inflasi tahun 2008 yang mencapai 8,05%. Tekanan harga secara umum melemah selama triwulan IV-2009, yang

disebabkan oleh menurunnya permintaan bahan makanan, makanan jadi, dan sandang seiring berlalunya Ramadhan dan Idul Fitri.

Gambar 2.5
Inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009



Tekanan harga yang secara umum melemah selama tahun 2009 diperkirakan juga terjadi pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 diprediksikan perbaikan daya beli masyarakat juga akan memberi tekanan yang lebih tinggi terhadap kelompok bahan makanan jadi dan minuman. Faktor eksternal yang patut diwaspadai dan berpotensi menimbulkan gejolak harga adalah kenaikan tarif dasar listrik yang berpeluang menciptakan kenaikan inflasi cukup tinggi, termasuk pula kemungkinan penyesuaian harga BBM.

Industri dengan kategori sedang/menengah di Kabupaten Sintang sampai tahun 2009 sebanyak 185 unit usaha atau meningkat 19 unit dibandingkan tahun 2008, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 610 orang. Sementara untuk industri kecil sebanyak 1.757 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 1.849 orang. Kegiatan industri kecil yang menunjukkan potensi dan perkembangan usaha mendapat pembinaan dan bimbingan teknis dari dinas terkait melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan.

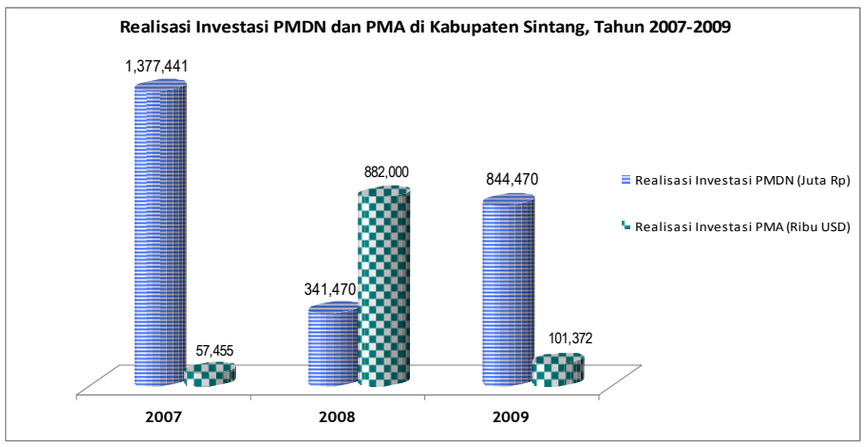
Selanjutnya, perkembangan perekonomian Kabupaten Sintang secara kuantitas juga dikarenakan meningkatnya aktivitas perdagangan menengah/besar dan eceran. Keberadaan sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Selama ini, peningkatan kegiatan perdagangan daerah dilaksanakan melalui promosi hasil produksi industri kerajinan, pembinaan terhadap pedagang eceran maupun pedagang kaki lima, peningkatan dan pengawasan distribusi barang, serta peningkatan aktivitas bongkar muat barang. Pada tahun 2009, aktivitas bongkar muat berbagai bahan kebutuhan pokok, bahan makanan, dan

barang kelontong mencapai 2.778 Ton (bongkar) dan 1.305 Ton (muat), meningkat tajam dibandingkan tahun 2006 yang jumlahnya mencapai 859 Ton (bongkar) dan 1.063 Ton (muat). Trend peningkatan kegiatan perdagangan di Kabupaten Sintang diikuti dengan meningkatnya pengurusan tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Pada tahun 2009 pengurusan TDP sebanyak 590 unit (tahun 2007=470 TDP), dan SIUP sebanyak 577 unit (tahun 2007=289 SIUP).

Adapun realisasi investasi di kabupaten sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.6
Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang Tahun 2007-2009



Dinamika perekonomian Kabupaten Sintang juga tidak terlepas dari aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi sebagai kekuatan riil ekonomi kerakyatan. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif tidak begitu besar, perannya semakin meningkat manakala kegiatan UMKM di sektor informal dilibatkan. Sesuai dengan lingkup usahanya, saat ini tercatat UMKM formal sebanyak 1.820 unit usaha, dan menyerap sekitar 2.293 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah KUD pada tahun 2009 sebanyak 55 unit (tahun 2007=52 unit) dengan anggota sebanyak 12.478 orang (2007=10.190 orang), dan volume usaha sebesar Rp 2.245,04 Milyar (tahun 2007=1.765,55 Milyar). Sedangkan koperasi Non KUD berjumlah 216 unit (tahun 2007=183 unit) dengan anggota sebanyak 52.622 orang (2007=32.382 orang), dan volume usaha sebesar Rp 156,18 Milyar (tahun 2007=30,13 Milyar). Koperasi yang ada, baik KUD maupun non KUD tersebar cukup merata di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2005 penduduk miskin tercatat sebesar 69.400 jiwa (19,09%) dengan garis kemiskinan Rp.135.390/kapita/bulan. Kemudian pada tahun 2006

jumlah penduduk miskin berkurang 100 jiwa menjadi 69.300 jiwa (19.80%) dengan garis kemiskinan Rp.154.585/kapita/bulan. Selanjutnya pada tahun 2007 penduduk miskin berkurang sangat banyak (3.100 jiwa) menjadi 66.200 jiwa (17,10%) dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi (Rp.169.606/kapita/bulan). Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin berkurang lebih banyak lagi (12.100 jiwa) menjadi 54.100 jiwa (13,61%) dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi (Rp.182.626/bulan/kapita).

Keberhasilan mengurangi jumlah penduduk miskin disertai dengan peningkatan tingkat pendidikannya merupakan prestasi positif dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang. Penduduk miskin sebagian besar (sekitar 92,96 persen) bekerja di sektor informal. Lapangan kerja yang digeluti adalah sektor pertanian (seperti petani, nelayan, buruh tani). Jam kerja mereka relatif panjang. Sebagian besar (77,29%) di antara mereka bekerja antara 35 – 42 jam per minggu. Penduduk miskin yang tidak bekerja sangat sedikit (0,56 persen). Bantuan pemerintah yang mereka peroleh selain BLT dan beras miskin (raskin) adalah pengobatan gratis. Selain memperoleh pengobatan gratis, anak usia balita yang dimiliki rumah tangga miskin diberi imunisasi BCG (87,67%), DPT (86,53%), Polio (88,83%), Campak (79,61%) dan Hepatitis B (84,91%).

Pada aspek ketenagakerjaan, dari 363.978 jiwa penduduk Kabupaten Sintang, 285.614 jiwa atau 78,47% di antaranya tergolong penduduk usia kerja (tenaga kerja). Hasil Sakernas 2009 mengungkapkan bahwa angkatan kerja yang bekerja 195.531 jiwa (96,86%) dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 6.287 jiwa (3,12%). Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar (72,94%) terserap di sektor pertanian, selebihnya terserap di sektor jasa (7,30%), konstruksi (5,14%), industri (0,45%) dan sektor lainnya (14,16%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baru mencapai 78,72%. TPAK Laki-laki (89,34%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (67,71%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran laki-laki lebih sedikit (2,10%) dari tingkat pengangguran perempuan (71,72%). Angkatan kerja yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal. Laki-laki yang terserap di sektor informal 83,13% dan perempuan yang terserap di sektor informal 90,16%. Ini berarti peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal masih rendah dan cenderung stagnan. Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja. Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (67,70%) pekerja berpendidikan SLTP ke

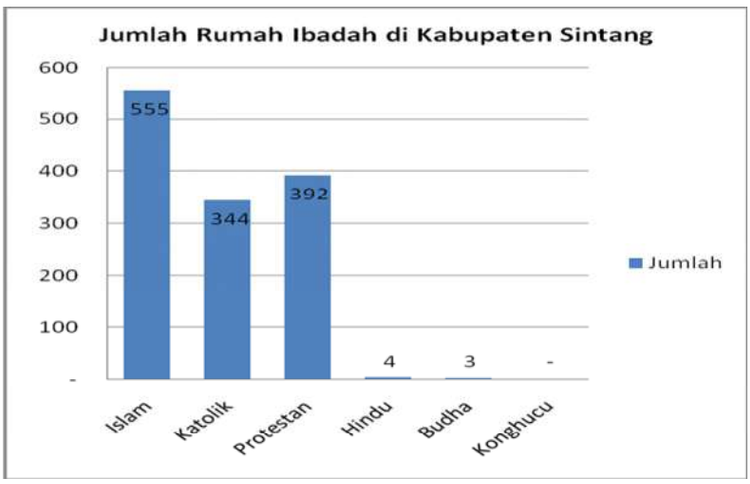
bawah. Produktivitas pekerja dinilai dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp.5,874 juta per tahun.

Pembangunan Pemuda dan Olah Raga adalah bagian penting dari berbagai upaya peningkatan kualitas generasi muda. Sampai dengan tahun 2010 penyelenggaraan pemerintah untuk urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Pembangunan bidang ini diarahkan pada upaya-upaya: Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; serta Pembinaan kepengurusan organisasi olah raga di semua tingkatan pemerintahan. Pembangunan bidang kepemudaan secara khusus difokuskan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda. Pemerintah Kabupaten Sintang selama periode tahun 2005-2009 telah dapat melaksanakan kegiatan Pelatihan dan pendidikan dasar kepemimpinan (Paskibra) dan Pembinaan organisasi kepemudaan.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan di bidang olah raga Pemerintah Kabupaten Sintang selama periode tahun 2005-2009 melaksanakan penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan output berupa terlaksananya kompetisi olah raga antar klub pelajar SD/SMP/SMA/SMK, POPDA, Porseni tingkat SD/SMP/SMA/SMK, dan olah raga usia dini. Selain itu juga diupayakan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, dan berbagai kegiatan pendukungnya.

Sebagai masyarakat religius, keberagaman penduduk Kabupaten Sintang dan sarana peribadatannya tahun 2009 cukup memadai dengan komposisi rumah ibadah Islam 555 buah, Katolik 344 buah, Protestan 392 buah, Hindu 4 buah, Budha 3 buah. Dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2.7
Jumlah Rumah Ibadah Kabupaten Sintang Tahun 2009



Pembangunan budaya merupakan bagian dari membangun citra bangsa baik yang telah ada pada masa lalu maupun di masa sekarang. Kondisi obyektif yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang budaya pada umumnya adalah berkisar pada bergesernya budaya hidup dan tata lelaku masyarakat sebagai pengaruh dari serbuan budaya global, kurangnya partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan yang berbau budaya, lemahnya potensi SDM yang kompeten dan berkualitas di bidang kebudayaan, kurangnya sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata, serta masih terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan yang ada.

Sebagai wilayah yang memiliki alam luas dan sejarah yang panjang, Kabupaten Sintang memiliki potensi pariwisata yang cukup kaya. Potensi yang terbesar adalah air terjun. Sekurang-kurangnya terdapat 19 air terjun di lima kecamatan (Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu), dengan ketinggian antara 5 m sampai 200 m. Hingga tahun 2010, satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Penyelenggaraan Pemerintah untuk Urusan Pariwisata diarahkan pada upaya mendata kekayaan seni dan budaya daerah yang telah ada dan bernilai untuk dijadikan suatu daya tarik daerah, seperti sanggar budaya yang dibina; Cagar Budaya/situs sejarah yang dipelihara; kegiatan pagelaran/festival/pameran seni dan budaya yang diselenggarakan/diikuti setiap tahunnya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Aspek Pelayanan Urusan Wajib

Pembangunan sektor pendidikan terbilang sukses terlihat dari peningkatan indikator-indikator pendidikan. Tingkat kelulusan di Kabupaten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Angka Kelulusan

Jenjang	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
SD/MI	93,02	98,06	92,65	92,65	98,92	98,92
SMP/MTs	91,94	84,25	86,20	87,71	91,21	91,90
SMA/MA	94,79	80,75	96,62	96,62	90,70	94,45
SMK	98,65	96,50	78,75	78,75	96,37	96,50

Rata-rata nilai UAN perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Rata-rata Nilai UAN

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	5,66	5,82	5,82	5,82	5,96	6,00
SMP/MTs	3,56	4,76	3,43	3,43	4,55	4,75
SMA/MA	5,68	4,48	4,48	4,48	5,05	5,55
SMK	4,15	4,92	6,91	6,91	6,89	6,90

Guru layak mengajar perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Guru Layak Mengajar

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009
SD/MI	33,90	47,08	47,08	47,08	48,11
SMP/MTs	53,90	56,04	56,04	56,04	57,01
SMA/MA	49,53	54,35	54,35	54,35	55,15
SMK	32,43	29,93	29,93	29,93	30,03

Anak putus sekolah perkembangannya selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Angka Anak Putus Sekolah

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009
SD/MI	0,95	0,97	0,97	0,97	1,32
SMP/MTs	3,31	3,57	3,57	3,57	2,32
SMA/MA	1,17	1,19	1,19	1,19	0,64
SMK	1,81	1,91	1,91	1,51	1,43

Mengenai Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Sintang, perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	98,75	108,18	112,38	112,38	118,19	118,21
SMP/MTs	84,77	71,40	73,96	73,96	78,38	84,59
SMA/MA	23,77	23,09	25,18	25,18	28,55	29,84
SMK	5,79	4,22	5,59	5,59	5,26	10,42

Adapun Angka Partisipasi Murni di kabuapten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	77,83	84,79	90,81	90,81	88,63	93,64
SMP/MTs	68,39	47,34	52,86	52,86	56,21	59,68
SMA/MA	16,16	14,74	16,43	16,43	17,60	27,28
SMK	3,87	3,29	3,62	3,62	3,95	27,28

Mengenai rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Rasio Murid Terhadap Sekolah

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	142,00	143,74	147,01	147,01	143,00	155,96
SMP/MTs	177,00	181,43	169,80	169,80	172,00	184,23
SMA/MA	269,00	286,22	290,17	290,17	235,00	295,92
SMK	146,00	150,38	129,91	129,91	149,00	268,70

Sedangkan rasio murid terhadap ruang kelas perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	22,00	23,09	22,00	22,00	27,00	28,52
SMP/MTs	24,00	33,90	32,00	32,00	25,00	29,83
SMA/MA	36,00	35,02	38,00	38,00	34,00	39,66
SMK	26,00	24,55	23,00	23,00	16,00	

Mengenai rasio murid terhadap guru di kabupaten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Rasio Murid Terhadap Guru

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	20,00	18,13	18,95	18,95	20,00	18,43
SMP/MTs	14,00	13,12	13,26	13,26	14,00	14,15
SMA/MA	15,00	12,71	14,10	14,10	13,00	12,56
SMK	9,00	13,22	9,92	9,92	8,00	17,45

Dalam hal rasio guru terhadap sekolah di Kabupaten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Rasio Guru Terhadap Sekolah

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	7,00	7,93	7,76	7,76	7,00	8,44
SMP/MTs	12,00	13,82	12,81	12,81	12,00	12,24
SMA/MA	18,00	22,52	20,58	20,58	18,00	18,26
SMK	17,00	11,38	13,09	13,09	14,00	26.90

Mengenai rasio ruang kelas terhadap sekolah di Kabupaten Sintang perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Rasio Ruang Kelas Terhadap Sekolah

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	6,00	6,22	6,65	6,65	5,00	6,38
SMP/MTs	7,00	5,35	5,33	5,33	6,00	6,18
SMA/MA	8,00	8,17	7,54	7,54	7,00	4,97
SMK	6,00	6,13	5,73	5,73	7,00	5,08

Kondisi ruang kelas dengan kategori baik perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Kondisi Ruang Kelas Dengan Kategori Baik

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	44,07	44,07	44,07	44,07	51,86	53,46
SMP/MTs	81,80	81,80	81,80	81,80	81,01	60,50
SMA/MA	88,44	88,44	88,44	88,44	89,22	
SMK	-	100,00	100,00	100,00	98,11	

Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Tenaga Pendidik pada Tingkat Sekolah pada tahun 2010.

Tabel 2.23
Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Jenjang Pendidikan
Tahun 2010

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	SD/MI	389	1.327	718	532	2.577
2.	SMP/ MTs	91	340	155	67	562
3.	SMA/MA/SMALB	30				

Tabel 2.24
Jumlah Tenaga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan
Tahun 2010

No.	Jenjang	Tingkat Pendidikan Guru				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1.	SD/MI	657	414	239	-	1.310
2.	SMP/MTs	3	230	345	2	580
3.	SMA/MA/SMALB	-	55	201	3	259
4.	SMK	-	23	59	1	83

Tabel 2.25
Jumlah Guru Yang Sudah Bersertifikasi Per-Kecamatan
Kabupaten Sintang
Tahun 2010

No.	Kecamatan	Sertifikasi Guru			
		SD/MI	SMP/Mts	SMA/MA	SMK
1.	Sintang	249	111	78	21
2.	Sungai Tebelian	51	24	10	8
3.	Kelam Permai	26	12	5	2
4.	Binjai Hulu	20	6	1	0
5.	Ketungau Hilir	10	8	1	0
6.	Ketungau Tengah	16	6	4	1
7.	Ketungau Hulu	16	7	2	0
8.	Dedai	27	30	1	0
9.	Tempunak	26	22	1	0
10.	Sepauk	65	14	14	1
11.	Kayan Hilir	14	8	4	0
12	Kayan Hulu	25	7	1	0
13.	Serawai	31	6	5	1
14.	Ambalau	5	3	0	0
	Jumlah	***581***	***264***	***127***	***34***

Pada urusan kesehatan, di Kabupaten Sintang menunjukkan trend positif dalam arti tampak ada peningkatan dalam indikator kesehatan. Tingkat pencapaian SPM dari tahun 2005 - 2009 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut.

Jumlah Kematian Bayi dan Ibu yang tercatat di fasilitas kesehatan selama tiga tahun tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Kematian Bayi Yang Tercatat di Kabupaten Sintang
Tahun 2007-2009

Uaraian	2007	2008	2009
Jumlah Kematian Bayi	20	78	39
Jumlah Kematian Ibu	3	7	5

Angka Cakupan rawat jalan puskesmas menunjukkan berapa banyak orang mengunjungi puskesmas untuk berobat jalan, makin rendah kunjungan seharusnya menunjukkan semakin baik taraf kesehatan masyarakat. Pada tahun 2005 kunjungan sebanyak 145.883 pasien di seluruh Puskesmas Kabupaten Sintang, pada tahun 2006 turun menjadi 144.529 pasien, namun pada tahun 2007 sebesar 215.930 pasien, tahun 2008 sebesar 200.370 pasien dan tahun 2009 naik menjadi angka berkisar 392.299 pasien. Semoga dengan upaya yang dilakukan dengan penyuluhan dan pola hidup sehat akan dapat ditekan angka kunjungan pasien ke Puskesmas.

Indikator Pelayanan Rumah Sakit perkembangan selama lima tahun tampak pada tabel di bawah :

Tabel 2.27
Indikator Pelayanan Rumah Sakit Ade M. Djoen
Tahun 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Bed Occuoancy Rate (BOR)	50,31	70,17	96,72	73,11	98,35
Length of Stay (LOS)	12,09	3,87	4,67	4,36	4,91
Net Death Rate (NDR)	23,91	17,80	16,62	15,84	19,63
Gross Death Rate (GDR)	39,29	40,30	41,63	38,43	43,27

Persalinan diharapkan dapat dilayani oleh tenaga kesehatan mulai dari dokter, bidan atau dukun yang telah dilatih, dengan harapan bahwa persalinan menjadi lancar. Cakupan pelayanan terhadap proses kelahiran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami trend kenaikan, pada tahun 2005 terlayani 57,66% sedangkan pada tahun 2009 terlayani sebesar 58,84%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.28
Cakupan Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Puskesmas Se- Kabupaten Sintang
Tahun 2005-2009

Uraian	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
Cakupan pertolongan persalinan oleh NAKES	57,66	62,73	63,52	45,86	58,84
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78,38	80,97	83,17	67,54	75,50

Tingkat keberhasilan dalam penanganan kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis dan paramedis, baik dokter umum, dokter gigi, perawat maupun bidan. Perkembangan dari ke empat tenaga medis dan paramedis selama 5 tahun tampak berikut :

Tabel 2.29
Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan Paramedis (Perawat dan Bidan) per 100.000 penduduk Kabupaten Sintang
Tahun 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Dokter umum	7,03	10,38	9,23	10,23	10,98
Dokter gigi	1,47	2,31	2,24	3,04	2,68
Perawat	72,39	90,53	93,43	97,58	84,63
Bidan	21,39	40,36	37,76	43,12	39,37

Obat yang tersedia dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu obat esensial dan obat generik. Perkembangan pemakaian 2 jenis obat selama lima tahun terakhir tampak seperti tabel berikut.

Tabel 2.30
Ketersediaan Obat Sesuai Dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009

Uraian	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
Ketersediaan Obat	65,00	86,09	92,65	92,64	99,40

Universal Child Immunization adalah merupakan indikator berapa banyak bayi dalam lingkup kelurahan/desa yang telah diberi vaksin immunisasi secara lengkap. Perkembangan selama lima tahun tampak sebagai berikut :

Tabel 2.31
Cakupan Vitamin A, Fe 90, Fe 30 dan UCI Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2009

Uaraian	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit.A 2 kali per tahun	76,46	98,37	68,81	85,63	38,32
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	74,83	80,67	60,86	26,87	40,80
Cakupan ibu hamil mendapat 30 tablet Fe	80,78	82,23	72,81	31,66	46,22
UCI Desa	69,31	74,07	69,84	51,70	38,33

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. Pencapaian hasil pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang berdasarkan IPM, meningkat dari 64,3 tahun 2004 (rangking 6 dari 12 Kabupaten/Kota) menjadi 67,44 tahun 2008 (rangking 8 dari 14 Kab/Kota). Perkembangan IPM Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir (2004–2008) seperti berikut :

Tabel 2.32
IPM Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2004-2008

No	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Usia Harapan Hidup (th)	67,00	67,25	67,50	67,68	67,91
2.	Angka Melek Huruf (%)	85,40	85,80	86,20	90,41	90,41
3.	Rata –rata lama sekolah (tahun)	5,50	5,75	6,25	6,25	6,58
4.	Pengeluaran Riel Per Kapita / bulan (Rp.)	592.400	594.900	597.150	599.600	602.010
5.	IPM	64,30	64,73	65,66	66,89	67,44

Sumber : Indek IPM Kalbar tahun 2004, dan 2006 – 2008.

Mengenai urusan pekerjaan umum, tingkat pencapaian SPM dari tahun 2005 - 2009 yaitu jenis Permukaan Jalan, perkembangan selama lima tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.33
Jenis Permukaan Jalan Tahun 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009*
Aspal	477,01	542,36	584,07	665,41	754,60
Kerikil	98,40	74,93	86,50	129,44	186,40
Tanah	528,51	810,91	1 126,01	863,63	956,70
Lainnya			2,50	-	-

Kondisi jalan diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi, yaitu baik; sedang; rusak; dan rusak berat perkembangan selama 5 tahun lihat tabel berikut :

Tabel 2.34
Klasifikasi Jalan Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat
Tahun 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009*
Baik	289,89	252,78	302,74	384,58	425,79
Sedang	436,99	441,29	241,08	803,51	954,20
Rusak	139,07	245,93	987,32	250,46	354,76
Rusak Berat	237,97	488,20	267,94	219,93	235,98

Kabupaten Dalam Angka *Angka Sementara

Jembatan yang ada di Kabupaten sintang secara umum dalam kondisi yang cukup baik yaitu 80%, walaupun masih banyak dijumpai jembatan dengan konstruksi kayu, namun masih layak untuk dilewati. Gorong-gorong yang ada diperkotaan khususnya masih dapat berfungsi walaupun belum optimal, karena banyak dijumpai beberapa tempat ada kerusakan. Namun demikian tingkat berfungsinya masih 80%. Berfungsinya Sarana dan Prsarana Air Bersih Pedesaan, setiap tahun telah dilakukan pembangunan air bersih di desa, selain itu juga dilakukan perawatan. Secara keseluruhan tingkat berfungsinya saluran air minum di pesesaan masih 85%.

Mengenai Urusan perumahan, Rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.35
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2005-2009

Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Rumah tangga pengguna air Bersih	4.613	3.219	3.017	3.206	3.300

Sedangkan lingkungan pemukiman kumuh di kabupaten Sintang sebesar 17,60 m2, dalam hal mengurangi pemukiman kumuh, selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman, Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman. Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan keberadaan pemukiman kumuh dapat diminimalisir. Selain itu pemerintah kabupaten telah menyediakan sarana pemakaman dan menyediakan sarana dan prasarana kebakaran dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran yang terjadi di wilayah lingkungan perumahan di kabupaten Sintang.
Urusan Penataan ruang, kelengkapan dokumen perencanaan yang menyangkut penataan ruang telah diterbikan dengan peraturan daerah, namun demikian masih perlu ditindak lanjuti penataan tata ruang sampai tingkat kecamatan. Indiktor tingkat kesesuaian pembangunan Dengan Rencana Pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2009 telah menunjukkan angka 90%, hal ini masih perlu ditingkatkan. Indikator tingkat pemanfaatan data survey dan pemetaan tata ruang, belummenunjukkan angka yang maksimal, karena sangat tergantung dengan kesiapan dana untuk implementasi, sehingga tingkat capaian baru 70%. Indikator tingkat kelengkapan data perencanaan pembangunan infra struktur, belum menunjukkan angka maksimal karena masih banyak diperlukan rencana pembangunan infrastuktur terutama untuk menghadapi kota propinsi.

Mengenai urusan perencanaan pembangunan, Secara umum selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, keberhasilan yang telah dicapai antara lain telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang meskipun sampai saat ini belum ditetapkan dengan Peraturan daerah, telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2006, terlah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun

2006 sampai dengan tahun 2009 dan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD rata-rata tahun 2009 telah mencapai sebesar 74,74%.

Mengenai urusan peruhubungan, Kelayakan kondisi Terminal dari tahun 2005 - 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.36
Kelayakan Kondisi Terminal dan Kondisi Dermaga
Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Kelayakan kondisi terminal	50,00	70,00	60,00	50,00	55,00
Kelayakan kondisi dermaga	40,00	55,00	50,00	60,00	60,00

Jumlah Kendaraan yang lulus uji dari tahun 2005 - 2009 belum semua mencapai target. Jumlah Kendaraan yang lulus uji dari tahun 2005 - 2009 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Kendaraan Lulus Uji Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Kendaraan yang lulus uji (unit)		567[1]	567[1]	643[1]	713
Target		1.051	677	2.208	2.417
Realisasi capaian		53,95%	83,75%	28,71%	29,50%

Dalam urusan lingkungan hidup, tingkat pencapaian SPM dari tahun 2005 - 2009 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Kasus pencemaran masih terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 2005 sebanyak 6 kasus dan dapat ditangani 30%. Tingkat pencemaran air terlihat dari kadar zat berbahaya dalam air yaitu Ph dan Hg, pada tahun 2005 0,002 mg/L pada tahun 2005 naik menjadi 0,0042 hal ini menunjukkan kualitas air yang semakin jelek sehingga perlu dilakukan penanganan segera. Pada tahun 2005 kadar Hg pada air sebesar 0,0020 mg/L pada tahun 2009 menunjukkan angka 0,0021 hal ini perlu diwaspadai karena ada kecenderungan naik. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang relatif masih baik, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang dapat mengganggu kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Adanya

kebakaran Hutan, indikasi penambangan emas tanpa izin (PETI), gangguan DAS (Daerah Aliran Sungai), konversi lahan dapat mengancam keseimbangan ekosistem secara luas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai urusan pertanahan, luas lahan Kabupaten Sintang yang telah bersertifikat dari tahun 2005 - 2009 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.38
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2006-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Luas lahan bersertifikat (M^2)		970.621	1.170.621		111.700.048
Realisasi dari target		7,00%	8,15%	4,94	1,34

Penyelesaian kasus tanah Negara dari tahun 2005 - 2009 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.39
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2007-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Penyelesaian kasus tanah Negara			100,00%	83,00%	85,00%

Penyelesaian ijin lokasi dari tahun 2005 - 2009 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.40
Penyelesaian Ijin Lokasi Tahun 2007-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Penyelesaian ijin lokasi			75,00%	90,00%	40,00%

Urusan kependudukan dan catatan sipil, Rasio penduduk yang memiliki KTP dari tahun 2005 – 2009 belum semua telah mencapai target seperti dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41
Rasio Penduduk Yang Memiliki KTP Tahun 2005-2009

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009
Rasio penduduk yang memiliki KTP	77,00%	-	-	80,13%[1]	78,64%[2]

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan prestasi kinerja yang cukup baik pada tahun 2008 namun mengalami penurunan di tahun 2009, namun upaya untuk menjadikan rasio penduduk yang memiliki KTP mendekati 100,00% tetap perlu di upayakan secara serius dan terpadu di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun rasio penduduk yang memiliki akte kelahiran dari tahun 2005 – 2009 belum semua mencapai target seperti dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.42
Rasio Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2005-2009

Jenjang	2005	2006	2007	2008	2009
Rasio Akte Kelahiran per 1000 penduduk	-	-	-	1,26[1]	44,55[2]

Urusan keluarga berencana, peserta KB aktif tahun 2008 di Kabupaten Sintang jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat sebanyak 64.944. Dari sejumlah PUS ini, 72,12% di antaranya adalah peserta KB aktif. Dalam empat tahun berjalan - sejak tahun 2005 hingga 2008 - jumlah peserta KB aktif cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Alat kontrasepsi yang dipakai ada 8 (delapan) jenis, yaitu IUD, MOP, MOW, Implant, Suntik, Pil, Kondom dan OV. Dari delapan jenis kontrasepsi tersebut, hingga tahun 2008, yang paling banyak digunakan oleh akseptor adalah pil (20.478). Kemudian disusul dengan pemakaian kontrasepsi jenis suntik (19.953). Kontrasepsi yang paling sedikit dipakai adalah MOP (152) dan Kondom (389).

Pada tahun yang sama, Akseptor KB baru berjumlah 8.051. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan (7.704). Para akseptor baru ini lebih banyak memakai alat kontrasepsi suntik (4.377) dan pil (2.823). Sementara itu, MOW, MOP dan Kondom kurang diminati akseptor KB baru. Sarana pelayanan KB nasional di Kabupaten Sintang berjumlah 786 unit. Sarana pelayanan ini adalah KKB, PPKBD, Posyandu, DBS/apotik, Kelompok Akseptor.

Peserta KB lestari cenderung menurun. Tahun 2005 peserta KB lestari tercatat sebanyak 25.085, tiga tahun berikutnya (2008) turun menjadi 23.743 dengan kategori 5 tahun (53,47%), 10 tahun (26,77%), kurang dari 16 tahun (13,16%) dan lebih dari 16 tahun (6,60%).Dari 81.935 keluarga yang berada di Kabupaten Sintang tahun 2008, sebagian besar di antaranya adalah tergolong keluarga pra KS (15,86%) dan KS-1 (35,07%). Selebihnya adalah keluarga yang

tergolong KS-II (30,14%), KS III (15,77%) dan KS-III Plus (3,77%). Dari data ini terungkap bahwa di Kabupaten Sintang masih banyak keluarga yang tergolong miskin (hampir 51%).

Tantangan pembangunan KB lima tahun ke depan antara lain mencegah prilaku seks bebas yang dapat mengakibatkan HIV/AIDS peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan masyarakat umum. Selain itu, peningkatan layanan KB di setiap desa dan penyediaan alat kontrasepsi bagi penduduk miskin dan peningkatan partisipasi kaum pria ber-KB.

Anak merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Maka dari itu, anak harus dilindungi sejak usia dini, meningkatkan kualitas hidup anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai Urusan tenaga kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2005 - 2009 belum semua mencapai target. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2005 - 2009 untuk tingkat partisipasi angkatan kerja sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	18,4%	-	84,60%

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada tahun 2009 sebanyak 3.210 orang, tahun 2010 sebanyak 2.65 dan pencari kerja yang dapat ditempatkan pada tahun 2009 berjumlah 577 orang, tahun 2010 berjumlah 402 orang, sedangka jumlah penganggur dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.44
Jumlah Pengangguran Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Pengangguran (orang)	5.740	1.542	-	6.899	3.210

Untuk pencari kerja di Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Jumlah pencari kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah,Tingkat perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dari setiap jenjang pendidikan dari tahun 2005 - 2009 di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.45
Jumlah Koperasi Tahun 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Koperasi Unit Desa	43	48	52	54	59
Anggota KUD	8.017	10.127	10.190	10.320	10.320
Volume Usaha (000. Rp)	1.041.838	1.261.633	1.765.554	2.062.058	2.062.058
Jumlah Koperasi Non KUD	177	177	183	203	213
Anggota Non KUD	17.782	30.896	32.382	33.390	33.390
Volume Usaha (000. Rp)	12.210.454	24.721.078	30.134.300	31.123.924	31.123.924

Mengenai urusan penanaman modal, Tingkat Penanaman modal pada Proyek Penanaman Modal Asing maupun Penanaman modal dalam negeri dari tahun 2005 - 2009 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Proyek PMA, Proyek PMDN dan Nilai Investasi Tahun 2005-2009

IKK	2005	2006	2007	2008
Proyek PMA	1	3	2	2
Nilai Investasi (Ribu)	135.470	5.017.282	57.455	882.000
Proyek PMDN	22	9	12	18
Nilai Investasi (ribu)	522.000.000	49.127.817.000	1.377.441	341.470

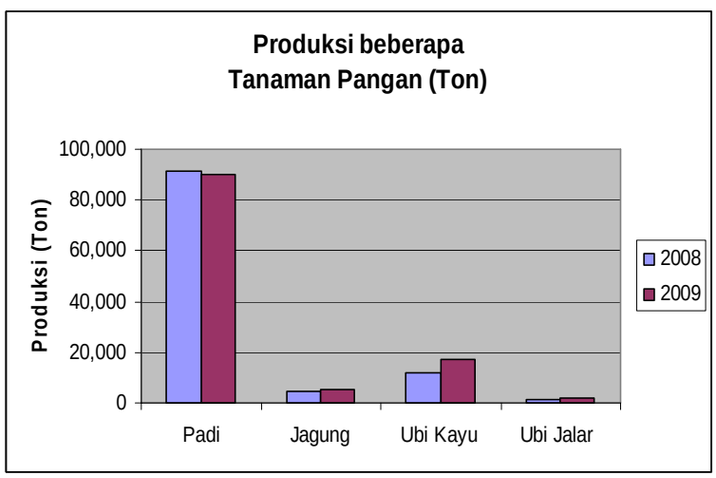
Sumber Data : Kabupaten Sintang Dalam Angka

2.3.2 Aspek Pelayanan Urusan Pilihan

Urusan pertanian, potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Sintang cukup besar. Pada tahun 2010 produksi padi di Kabupaten Sintang sebesar 90.820 ton yang terdiri padi sawah sebesar 68.918 ton dan padi ladang sebesar 21.902 ton dengan luas tanam sebesar 33.089 Ha yang terdiri dari padi sawah seluas 20.355 Ha dan padi ladang seluas 12,734 ha dan rata-rata produksi sebesar 28,10 kuintal/Ha. Produksi padi terbesar yaitu padi sawah sebesar 73.904 ton dengan luas panen sebesar 23.224 Ha dan rata-rata produksi sebesar 31,82 kuintal/Ha. Sedangkan sisanya adalah padi ladang dengan produksi sebesar 15.436 ton dengan luas panen sebesar 8.875 Ha dan rata-rata produksi sebesar 18,37 kuintal/Ha. Sedangkan untuk tanaman palawija produksinya ada yang mengalami peningkatan ada pula yang mengalami penurunan. Produksi tanaman palawija yang mengalami peningkatan yaitu jagung, kedelai dan kacang hijau. Produksi tanaman kacang hijau mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 444,32 persen menjadi 54 ton, produksi kedelai juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 130,26 persen menjadi 187 ton, sedangkan jagung meningkat sebesar 66,26 persen. Produksi tanaman ubi kayu, kacang tanah dan ubi jalar mengalami penurunan masing-masing sebesar 52,48 persen, 18,12 persen dan 14,64 persen.

Luas tanaman palawija tahun 2010 sebesar 2.979 Ha yang terdiri dari (luas tanam sumber dana pusat sebesar 480 Ha dan Kabupaten sebesar 2.499 Ha) dengan produksi sebesar 67.265,82 Ton (produksi dana pusat sebesar 10.838 Ton dan dana kabupaten sebesar 56.427 Ton).

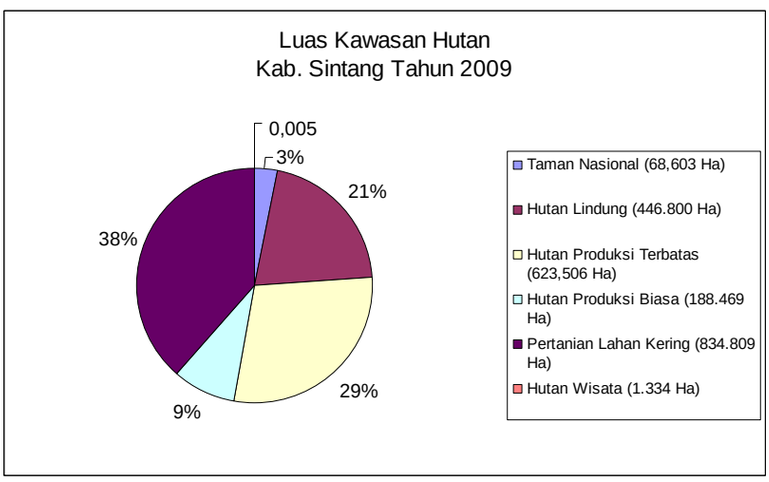
Gambar 2.8
Produksi Beberapa Tanaman Pangan (Ton)



Meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya ekspansi kelapa sawit diprediksi menyebabkan : (a) lahan potensial pengembangan tanaman pangan dan hortikultura semakin menyempit. (b) Karena penguasaan teknologi yang diaplikasikan petani pada tanaman pangan dan hortikultura masih relatif sangat sederhana sekali, disamping juga adanya keterbatasan informasi inovasi, maka produksi yang dihasilkan berkualitas rendah. Disamping masalah teknologi juga terbatasnya kemampuan petani dalam menguasai teknologi untuk membuat benih atau bibit unggul bermutu, terutama pada tanaman sayuran (c) Peningkatan jumlah dan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan selera yang semakin tinggi kualitasnya. Untuk ini akan dituntut pengamanan kualitas dan penerapan standarisasi produk yang lebih tinggi. Saat ini produktivitas usaha tani dan tenaga kerja petani masih relatif rendah dan laju pertumbuhan permintaan akan produk hortikultura diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Laju peningkatan produksi.

Dalam urusan kehutanan, Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat (9.178.760 ha).

Gambar 2.9
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sintang Tahun 2009



Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2009 seluas 2.163.920 Ha. Pemanfaatan terbesar untuk pertanian lahan kering yaitu 8,58 persen yang lainnya sebesar 29,01 persen untuk hutan produksi terbatas sebesar 20,47 persen untuk hutan lindung, sisanya untuk hutan produksi biasa dan taman nasional.

Adapun jumlah HPH dan HTI yang masih aktif dan luasnya di Kabupaten Sintang tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Nama Perusahaan HPH di Kabupaten Sintang

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi	Ket.
1.	CV PANGKAR BEGILI	30.195	SERAWAI	
2.	PT. BATASAN	49.150	SERAWAI	
3.	PT. SARI BUMI KUSUMA	75.200	SERAWAI	
	Jumlah	**154.545**		

Tabel 2.48
Nama Perusahaan HTI di Kabupaten Sintang

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi	Ket.
1.	PT. FINANTARA INTIGA	3.654	KET. HILIR & KET. TENGAH	

Hasil perkebunan yang diutamakan untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui Program Pengembangan Perkebunan Rakyat. Jumlah petani karet rakyat mendominasi popluasi petani perkebunan di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2009 jumlah petani karet sebesar 39.998 orang, petani sawit 11.286 orang, petani lada 2.862 orang, petani kelapa hibrida 1.710 orang, petani kelapa dalam 1.419 orang, petani kapuk/randu 1.336 orang dan petani kopi 1093 orang.

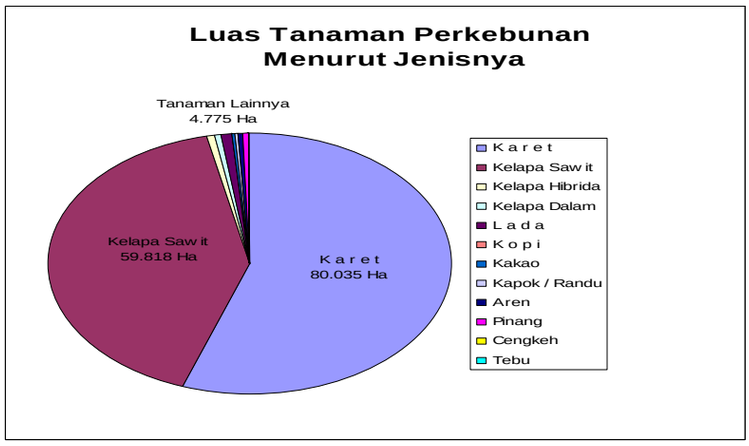
Perkembangannya selama lima tahun terakhir cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan luas areal maupun produksinya. Luas arel perkebunan pada tahun 2009 didominasi oleh karet dan kelapa sawit. Luas tanaman Karet pada tahun 2009 adalah 80.035 Ha dan luas tanaman kelapa sawit adalah 59.818 Ha. Pada tahun 2008 produksi tanaman karet sebesar 31.822,54 ton dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 34.600,74 ton. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan luas tanaman menghasilkan dari 31.505 Ha pada tahun 2008 menjadi 32.985 Ha pada tahun 2009. Kenaikan produksi ini juga terjadi pada produksi kelapa sawit.

Data luas kebun karet hasil program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan Produksinya hingga tahun 2010, terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Luas Kebun Karet di Kabupaten Sintang Berdasarkan Sumber Dana
Di Kabupaten Sintang Tahun 2005-2010

No.	Tahun Anggaran	APBD Kab. (Ha)	APBD Prov. (Ha)	APBN (Ha)	Luas Total (Ha)	Produksi (Ton)
1.	2005	606	200	350	1.156	952,54
2.	2006	2.825	450	1.013	4.288	3.533,31
3.	2007	2.750	350	0	3.100	0
4.	2008	4.000	465	8.692	5.157	0
5.	2009	1.875	300	449	2.624	0
6.	2010	1.000	350	250	1.600	0

Gambar 2.10
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya



Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2008 sebesar 82.268,93 ton, sedangkan pada tahun 2009 meningkat secara signifikan menjadi 503.355,85 ton. Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan lainnya mengalami peningkatan walaupun sumbangannya sangat kecil.

Untuk jumlah investasi perusahaan sawit dan karet di Kabupaten Sintang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi	Ket.
1.	PT. Sinar Dinamika Kapuas II	9.000	Sungai Tebelian	
2.	PT. Sinar Dinamika Kapuas III	12.000	Sungai Tebelian	
3.	PT. Bonti Permai Jayaraya	80.000	Binjai Hulu & Ketungau Hilir	

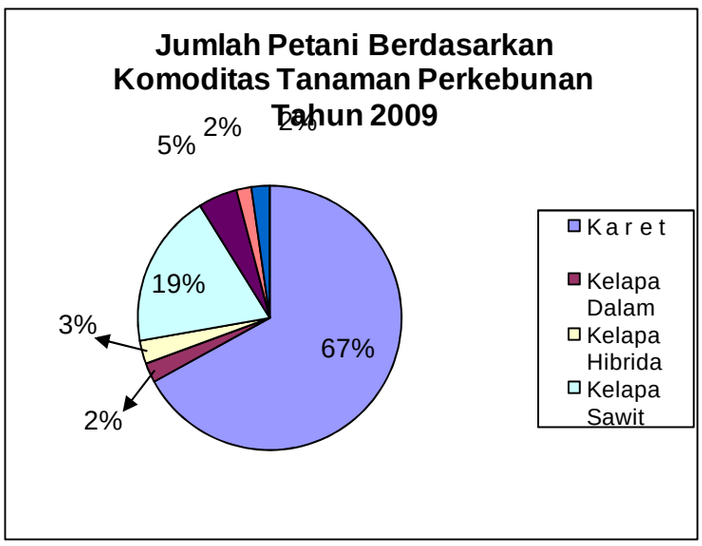
4.	PT. Bukit Prima Platindo	10.000	Sintang	
5.	PT. Satyanusa Indah Perkasa	22.000	Ketungau Hilir & Binjai Hulu	
6.	PT. Permata Hijau Sarana	7.000	Sepauk	
7.	PT. Bukit Hijau Lestari	4.000	Sepauk & Tempunak	
8.	PT. Citra Kalbar Sarana	20.000	Sepauk & Tempunak	
9.	PT. Inma Jaya Group	17.500	Ketungau Hulu	
10.	PT. Inma Makmur Lestari	14.000	Ketungau Hulu	
11.	PT. Indomal Sawit Jaya	15.000	Ketungau Hulu & Ketungau Tengah	
12.	PT. Makmur Jaya Malindo	13.000	Ketungau Tengah	
13.	PT. Sumatera Makmur Lestari	15.366	Kayan Hilir	
14.	PT. Megasawindo Perkasa	12.150	Kayan Hilir	
15.	PT. Binatara Tani Nusantara	11.034	Kayan Hilir & Kayan Hulu	
16.	PT. Grand Mandiri Utama	18.000	Kayan Hilir & Dedai	
17.	PT. Jake Sarana	14.000	Sepauk	
18.	PT. Kiara Sawit Abadi	20.755	Ketungau Tengah & Ketungau Hulu	
19.	PT. Sintang Agro Mandiri	17.000	Tempunak, Sintang, Binjai Hulu & Sepauk	
20.	PT. Bumi Sentosa Lestari	5.650	Dedai & Kayan Hlir	
21.	PT. Makmur Agro Lestari	9.550	Ketungau Hilir	
22.	PT. Agro Sukses Lestari	12.250	Binjai Hulu & Kelam Permai	
23.	PT. Sumber Hasil Prima	20.000	Serawai & Ambalau	
24.	PT. Wahana Plantation & Production	24.600	Sungai Tebelian, Sintang & Dedai	
25.	PT. Duta Sejahtera Utama	17.000	Ketungau Hilir	
26.	PT. Sinar Sawit Andalan	20.000	Serawai, Ambalau,	
27.	PT. Prima Sawit Andalan	18.000	Sepauk & Tempunak	
28.	PT. Buana Hijau Abadi	19.837	Ketungau Hilir, Ketungau Tengah & Ketungau Hulu	
29.	PT. Agro Gading Sejahtera	8.500	Tempunak, Sungai Tebelian & Sintang	
30.	PT. Bonti Permai Jayaraya II	12.590	Binjai Hulu & Ketungau Hilir	
31.	PT. Sinar Dinamika Kapuas IV	13.250	Sungai Tebelian & Tempunak	
32.	PT. Perdana Sawit Plantition	20.000	Ketungau Hilir & Ketungau Tengah	

33.	PT. Kencana Alam Permai	16.500	Sepauk & Tempunak	
34.	PT. Duta Agro Prima	14.000	Ketungau Hulu	
35.	PT. Dinamika Multi Prakarsa	6.000	Ketungau hilir, Ketungau Tengah	
36.	PT. Darma Persada Sejahtera	4.500	Sepauk	
37.	PT. Agro Tani Mandiri	19.500	Kelam Permai & Dedai	
38.	PT. Palmindo Lestari	5.700	Ketungau Hulu	
39.	PT. Duta Rendra Mulia	7.400	Ketungau Hilir, Binjai Hulu & Kelam Permai	
40.	PT. Perkasa Mas Langgeng	19.360	Sepauk, Binjai Hulu, Ketungau Hili & Ketungau Tengah	

Tabel 2.51
Perusahaan Karet di Kabupaten Sintang

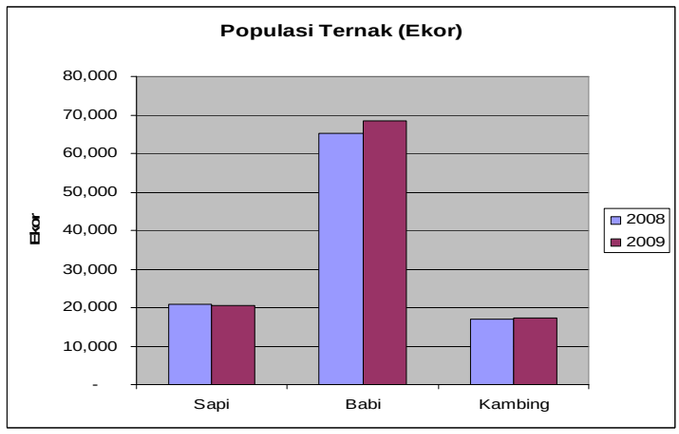
No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi	Ket.
1.	PT. Perkebunan Nusantara XIII	7.856,48	Dedai	

Gambar 2.11
Jumlah Petani Berdasarkan Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2009



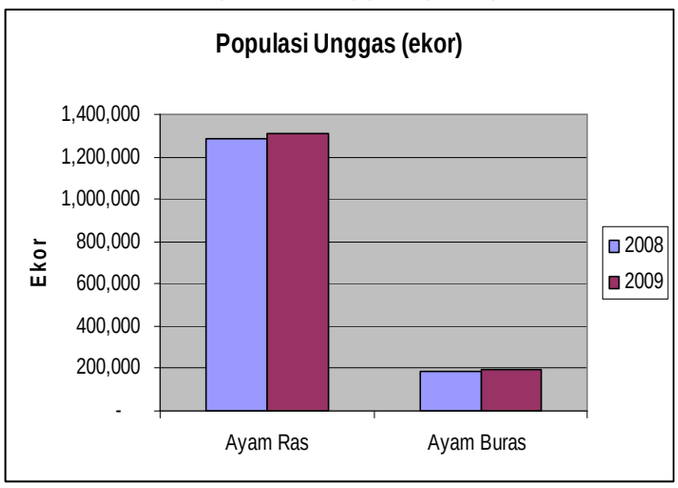
Dalam urusan peternakan, populasi ternak dibedakan menurut jenis ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas.

Gambar 2.12
Populasi Ternak (Ekor)



Populasi tenak besar maupun kecil di Kabupaten Sintang pada tahun 2010 pada umumnya mengalami kenaikan, kecuali ternak sapi yang sedikit mengalami penurunan. Populasi ternak besar pada tahun 2010 yaitu babi berjumlah 68.562 ekor dan sapi berjumlah 20.577 ekor, sedangkan ternak kecil seperti kambing 17.175 ekor, ayam ras dan ayam buras 1.206.737 ekor.

Gambar 2.13
Populasi Unggas (Ekor)



Meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pengembangan karet dan kelapa sawit diperkirakan keperluan akan sumber protein yang berasal dari ternak akan meningkat. Selain itu juga perlu diwaspadai penyakit ternak yang berasal dari luar.

Dalam urusan perikanan, pada tahun 2008 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 1,57 persen, di mana produksi terbesar berasal dari perairan umum yaitu sebesar 58,65 persen atau sebesar 1.568 ton dan sisanya

dari budidaya kolam dan keramba yaitu sebesar 41,35 persen atau sebesar 1.105,3 ton. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan toman yang terdapat di perairan umum dengan jumlah tangkapan sebesar 254,7 ton. Pada tahun 2010 memiliki keramba sebesar 54 unit dengan total produksi ikan sebesar 1.116,85 Ton.

Lima tahun ke depan perikanan budidaya perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat sabagian besar produksi ikan berasal dari sungai dan danau. Pencemaran akibat penggunaan pestisida dalam bidang pertanian dan perkebunan dan menyebabkan menurunnya kuallitas air, disamping itu perlu dilakukan upaya pengawasan penangkapan ikan agar tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan.

Dalam urusan pertambangan, berdasarkan geologi daerah, Kabupaten Sintang mempunyai potensi sumber daya mineral dan energi cukup potencial untuk dikelola dan diusahakan, antara lain; air raksa (Hg), emas (Au), perak (Ag), zirkon (Zr), mika, pasir kuarsa, air garam, pasir sungai, sirtu, tanah uruk, andesit, basalt, granit, batu sabak, batubara, gambut, air terjun, sumber air panas dan minyak bumi. Sumber daya mineral yang sedang diminati oleh para investor saat ini antara lain; batu bara, emas, zirkon, dan andesit

Adapun jenis bahan tambang, lokasi dan statusnya dapat terlihat ditabel berikut :

Tabel 2.52
Jenis Bahan Tambang, Lokasi dan Status

Jenis Bahan Tambang	Lokasi	Status
1. Batubara	1. Kec. Ketungau Hulu 2. Kec. Ketungau Tengah 3. Kec. Kayan Hulu 5. Kec. Ambalau	Diusahakan oleh Perusahaan
2. Tembaga	1. Kec. Ketungau Hulu 2. Kec. Sei. Tebelian 3. Kec. Tempunak	Diusahakan oleh Perusahaan
3. Emas	1. Kec. Ketungau Hulu 2. Kec. Sepauk Rawak 3. Kec. Ambalau 4. Kec. Tempunak	Diusahakan oleh Perusahaan
4. Zircon	1. Kec. Sepauk 2. Kec. Sintang 3. Kec. Tempunak	Diusahakan oleh Perusahaan

Tabel 2.53
Jenis Logam dan Lokasinya

No.	Jenis Bahan Tambang
1.	***Mineral Logam berupa :***
	- Air raksa terdapat di Kec. Ketungau Hilir, Ketungau Tengah - Emas terdapat di Sungai Melawi, Kec. Sintang, Kec. Dedai, Desa S. Empanang dan S. Sebawak, S. Keronang di Kec. Ketungai Hilir, S. Senaning (2 lokasi) di Kec. Kec. Ketungau Hulu, S. Tempunak Kec. Tempunak, Sei Serawai. - Perak terdapat di Nanga Toe S. Ketungau (setengah jam jalan kaki) Kec. Ketungau Hilir, Sei Melawi Kec. Dedai, S. Empawang dan S. Entagak Kec. Ketungau Hilir
2.	***Mineral Industri berupa :***
	- Mika terdapat di Kp. Sili Kec. Sepauk dan Bukit Kemintung Kec. Sintang - Pasir Kuarsa terdapat di Kp. Gandis Kec. Dedai
3.	***Mineral Kontruksi berupa :***
	- Andesit G. Gembah Kec. Sintang dengan cadangan 300 miliar, Bukit Kelam Kec. Kelam Permai cadangan > 200 miliar, G. Luit Kec. Sintang dengan cadangan > 25 miliar, G. Rentap Kec. Sintang dengan cadangan > 200 miliar, G. Labu Kec. Dedai cadangan sebesar 100 miliar, G. Saran Kec. Tempunak cadangan sebesar > 100 miliar, Bk. Kedang Kec. Ketungau Hilir cadangan sebesar > 25 miliar, Nanga Dedai Kec. Dedai cadangan sebesar > 25 miliar. - Basal terdapat di Kec. Ketungau Hulu sebesar 3.000 miliar. - Granit terdapat di Hulu S. Jelimbu Kec. Tempunak sebesar > 200 miliar
4.	***Bahan Energi***
	- Batubara terdapat di Senaning, Boyan, Kec. Ketungau Hulu dengan cadangan keseluruhan 13.670.000 ton, Desa Merakai/S. Tabun, S. Peturan, S. Jirak, S. Pedian, S. Kulan dan Hulu S. Seluah dengan kadar 7075 dan cadangan sebesar 18.000.000 ton. - Gambut terindukasi di Kec. Sintang, Tempunak dan Kec. Dedai - Sumber air panas terindikasi terdapat di Kec. Ketungau Tengah.

Adanya peningkatan investasi di bidang pertambangan selain aktivitas penambangan ilegal akan meningkatkan degradasi lingkungan dalam lima tahun mendatang. Antisipasi terhadap dampak ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Hingga tahun 2010, panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 3.122,78 kilometer. Dilihat dari segi kondisinya, terdapat penurunan panjang jalan dengan kondisi baik dari 531, 97 kilometer pada tahun 2009 menjadi 433,76 kilometer pada tahun 2010. Hal yang sama juga terjadi pada kondisi rusak berat yang mengalami peningkatan dari 1.112,28 kilometer pada tahun 2009 menjadi 1.115,52 kilometer pada tahun 2010. Secara keseluruhan pada

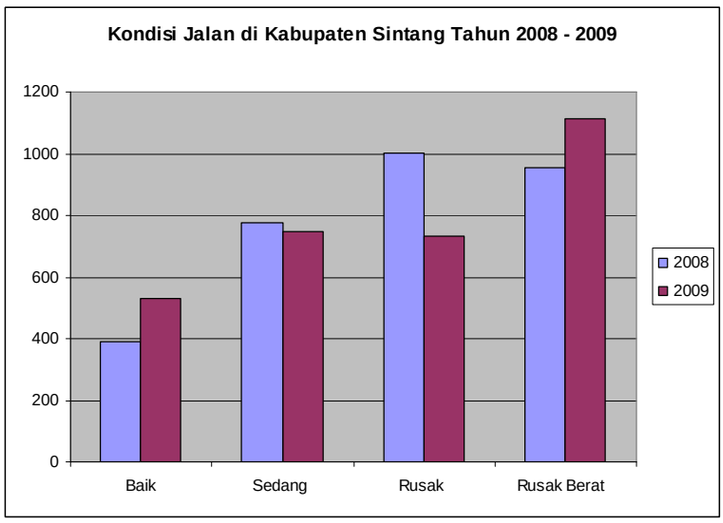
tahun 2010, 14,21 persen dalam kondisi baik dan 35,72 persen dalam kondisi rusak berat.

Tabel 2.54
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sintang

Status	Panjang Jalan(km)	Rasio (%)	Jembatan		Rasio (%)
			Jumlah (Unit)	Panjang (m)	
Nasional	193,56	6,20	62	1143,40	15,60
Provinsi	135,30	4,36	-	-	
Kabupaten	1099,34	35,20	189	3012,00	41,10
Desa	1694,58	54,27	270	1858,00	25,35
Non Status	967,73		102	1315,00	17,94
Jumlah	3122,78		623	7328,40	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Gambar 2.14
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Berdasarkan Kondisi Jalan tahun 2008-2009



Sumber : KDA Sintang 2010

Untuk kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Kondisi Jalan
Tahun 2009-2010 (Kilometer)

No.	Kondisi Jalan	2009	2010
1.	Baik	531,97	433,76
2.	Sedang	745,83	773,37
3.	Rusak	732,20	800,13
4.	Rusak Berat	1.112,78	1.115,52
Jumlah		3.122,78	3.122,78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam KDA Sintang, Tahun 2011

Berdasarkan status pengawasannya, kondisi jalan di Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2010 (Kilometer)

No.	Status Pengawasan	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1.	Negara	78,00	74,30	35,63	5,63	193,56
2.	Provinsi	38,50	47,30	45,80	3,67	135,27
3.	Kabupaten	147,72	312,87	210,30	428,45	1.099,34
4.	Desa	169,54	338,90	508,40	677,74	1.694,58
2 0 1 0		433,76	773,37	800,13	1.115,49	3.122,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang (dalam KDA Sintang, Tahun 2011

Dari segi jenis permukaannya, jalan yang ada di Kabupaten Sintang terdiri dari 19,33 persen merupakan jalan aspal, 4,68 persen jalan kerikil dan 75,40 persen jalan tanah dan 0,59 persen jenis lainnya.

Tabel 2.57
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Jenis Permukaan
Tahun 2009-2010 (Kilometer)

No.	Jenis Permukaan	2009	2010
1.	Aspal	651,19	603,62
2.	Kerikil	165,92	146,09
3.	Tanah	2.299,02	2.354,67
4.	Lainnya	6,65	18,40
Jumlah		3.122,78	3.122,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam KDA Sintang, Tahun 2011

Sedangkan panjang jalan lingkungan sampai pada tahun 2010 yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum sepanjang 4.000 m, sedangkan panjang jalan lingkungan yang dibangun oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran tahun 2010 sepanjang 13.579 m yang terdiri dari 2.301 m jalan rabat beton/aspal dan 11.269 m jalan kerikil/tanah.

Tabel 2.58
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2010 (Kilometer)

No.	Status Pengawasan	Jenis Permukaan				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	*Lainnya*	
1.	Negara	193,56	-	-	-	193,56
2.	Provinsi	76,43	-	52,87	6,00	135,30
3.	Kabupaten	381,20	55,10	741,51	-	1.099,34
4.	Desa	30,90	90,99	1.560,29	12,40	1.694,58
Jumlah		603,62	146,09	2.354,67	18,40	3.122,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam KDA Sintang, Tahun 2011

Pada akhir tahun 2010, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat pada Polres Sintang sebanyak 14.795 dengan jumlah terbesar sepeda motor sebanyak 14.438 atau 97,59 persen.

Tabel 2.59
Banyaknya Kendaraan Wajib Uji yang Terdata di Kabupaten Sintang
Tahun 2010

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Truck	1.090
2.	Bis Sedang dan Bis Besar	321
3.	Pick Up	1.881
4.	Oplet	308
5.	Mobil Tanki	51
6.	Tronton	-
Jumlah		3.651

Sumber : Dinas Perhubungan Sintang Dalam KDA Sintang 2011

Perkembangan penambahan kendaraan di Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2010 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Penambahan Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya
Tahun 2010

Bulan	Mobil Penumpang	Mobil Beban	Bis	Sepeda Motor
Januari	9	21	-	922
Pebruari	5	6	-	764
Maret	14	19	-	990
April	1	12	4	986
M e i	0	29	10	1.289
J u n i	0	17	4	1.207
J u l i	0	21	15	1.280
Agustus	9	19	0	995
September	5	17	0	1.445
Oktober	2	32	0	1.368
Nopember	0	23	6	1.403
Desember	10	47	0	1.789
Jumlah	55	263	39	14.438

Sumber : Polres Kabupaten Sintang dalam KDA Sintang 2011

Dalam dua tahun terakhir dari 2009 sampai dengan 2010, jumlah penumpang angkutan udara baik yang berangkat maupun yang datang melalui Bandar Udara Susilo Sintang mengalami peningkatan. Untuk penumpang yang

berangkat menurun sebesar 12,66 persen, sedangkan yang datang menurun sebesar 38,60 persen.

Tabel 2.61
Lalu Lintas Melalui Bandar Udara Susilo Tahun 2010

Bulan	Pesawat		Penumpang		
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Transit
Januari	2	2	5	5	-
Pebruari	1	1	3	-	-
Maret	1	1	5	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	3	3	5	8	-
Juni	2	2	-	7	-
Juli	5	5	19	16	-
Agustus	5	5	17	21	-
September	8	8	155	171	-
Oktober	30	30	776	864	-
Nopember	15	15	436	468	-
Desember	12	12	491	474	-
2010	84	84	1.912	2.034	-
2009	16	16	69	35	-
2008	24	24	79	57	41

Sumber : Bandar Udara Susilo, setelah diolah Dalam KDA Sintang 2011

Berdasarkan data tahun 2010, selain kantor pos, sarana telekomunikasi yang tersedia di di Kabupaten Sintang antara lain adalah telepon seluler, Wartel, dan Warnet.

Tabel 2.62
Banyaknya Kantor Pos Menurut Klasifikasi Tahun 2010

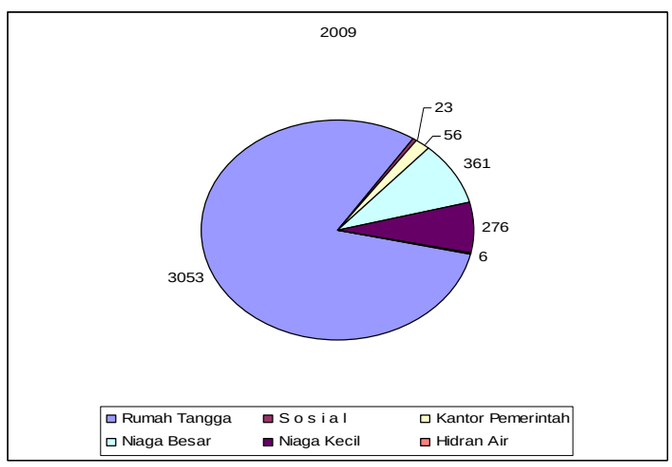
No.	Kecamatan	Kantor Pos Induk	Kantor Pos Pembantu	Kantor Pos Kec.	Rumah Pos	Kantor Pos Desa	Warpos Kesra
1.	Serawai	-	1	1	-	-	-
2.	Ambalau	-	-	-	-	1	-
3.	Kayan Hulu	-	-	-	-	1	-
4.	Sepauk	-	1	1	-	-	-
5.	Tempunak	-	-	-	-	1	-
6.	Dedai	-	-	-	-	1	-
7.	Kayan Hilir	-	-	-	-	1	-
8.	Sintang	1	-	-	-	-	-
9.	Sei. Tebelian	-	1	1	-	-	-

10.	Kelam Permai	-	1	1	-	-	-
11.	Binjai Hulu	-	1	1	-	1	-
12.	Ketungau Hilir	-	-	-	-	1	-
13.	Ketungau Tengah	-	1	1	-	-	-
14.	Ketungau Hulu	-	-	-	-	1	-
2 0 1 0		1	6	6	-	8	-
2 0 0 9		1	5	5	-	8	-
2 0 0 8		1	4	-	-	9	-

Sumber: Kantor Pos dan Giro Kabupaten Sintang (Dalam KDA Sintang 2011

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak /minum maupun mencuci/ mandi. Bagi daerah Kabupaten Sintang, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/ danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan peranannya.

Gambar 2.15
Komposisi Pelanggan Air Minum Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2009



Perkembangan jumlah pelanggan air minum dari tahun 2005 hingga tahun 2009 di Kabupaten Sintang telihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Banyaknya Pelanggan Air Minum Menurut Jenis Pelanggan
Tahun 2005-2009

No.	Jenis Pelanggan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Rumah Tangga	3832	3.219	3.017	3.206	3.053
2.	S o s i a l	20	26	26	23	23
3.	Kantor Pemerintah	59	46	47	49	56
4.	Niaga Besar	166	165	189	198	361
5.	Niaga Kecil	503	388	369	367	276
6.	I n d u s t r i	-	-	-	-	-
7.	Hidran Air	8	11	11	11	6
Jumlah		4568	3.855	3.659	3.854	3.775

Sumber : PDAM Kabupaten Sintang Dalam KDA Sintang 2010

Pada infrastruktur listrik, hingga tahun 2008 di Kabupaten Sintang tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 53.627.667 Kwh dan tenaga listrik yang terjual sebesar 48.057.061 Kwh. Dengan demikian tenaga listrik yang dibangkitkan maupun yang terjual mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007. Sampai tahun 2008 ini jumlah pelanggan listrik PLN mencapai 25.786, dengan jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga yaitu sebesar 87,41 persen.

Tabel 2.64
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Golongan Pelanggan
Tahun 2009

No.	L o k a s i	Rumah Tangga	Industri& Usaha	Badan Sosial	Peme-rintah	Jumlah
1.	Ranting Sintang	14.388	1.903	457	187	16.935
2.	Sub Ranting Tempunak	1.075	9	44	13	1.141
3.	Sub Ranting Sepauk	1.654	121	106	22	1.903
4.	Listrik Desa Nanga Mau	544	37	29	12	622
5.	Listrik Desa Ng. Tebidah	261	29	9	9	308
6.	Listrik Desa Ketungau	133	11	9	7	160
7.	Listrik Desa Merakai	401	70	11	8	490
8.	Listrik Desa Senaning	293	20	17	9	339
9.	Listrik Desa Nanga Lebang	136	14	5	1	156
10.	Listrik Desa Sinar Pekayau	219	21	9	1	250

11.	Listrik Desa Nanga Dedai	2.892	115	81	23	3.111
12.	Sub Ranting Nanga Silat	386	19	12	10	427
13.	Llistrik Desa Pangeran	219	19	16	3	257
2 0 0 9		22.601	2.388	805	305	26.099
2 0 0 8		22.539	2.245	713	289	25.786
2 0 0 7		22.656	1.731	687	287	25.361

Sumber : KDA Sintang 2010

Kabupaten Sintang memiliki 60 potensi PLTMH dan PLTS yang tersebar di 17 lokasi. dua diantaranya telah dibangun PLTMH. Dalam lima tahun kedepan, ketidakseimbangan antara permintaan dengan jumlah ketersediaan pasokan listrik merupakan masalah yang masih harus diselesaikan.

Adapun konsep pengembangan tata ruang Kabupaten Sintang ditetapkan dalam konteks pengembangan wilayah Kabupaten Sintang secara menyeluruh dan terintegrasi, yang diuraikan berikut ini.

(1) **Konsep pusat pertumbuhan**, menyatakan bahwa pengembangan wilayah inti yang mempunyai kecenderungan pertumbuhan tinggi, ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dengan maksud untuk menciptakan pertumbuhan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang melalui *trikcling down effect* yang ditimbulkannya. Sesuai hirarkinya, wilayah di pusat SWP dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, dengan pusat pertumbuhan utama di Kota Sintang dan sekitarnya (Sintang Raya). Selain itu perlu pengembangan pusat (hirarki) dibawahnya untuk memperluas wilayah *hinterland* dari wilayah inti tersebut, sehingga perkembangan tidak hanya terpusat di pusat kawasan itu saja, maka diperlukan perluasan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau seluruh kawasan potensial di wilayah Kabupaten Sintang, terutama kawasan pusat-pusat ekonomi perkebunan, tambang, permukiman lainnya.

(2) **Pengembangan pusat pertumbuhan baru** sebagai *counterpoles*, yaitu wilayah yang berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan serta posisi geografisnya berpeluang menjadi pusat pertumbuhan sub wilayah. Pentingnya keberadaan pusat baru ini untuk lebih menjamin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang, melalui perluasan pelayanan ke kawasan-kawasan pedalaman dan terisolir yang memiliki potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Dengan demikian produktivitas kegiatan usaha tidak hanya

terpusat di wilayah inti saja tetapi meluas ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Perluasan pelayanan ke wilayah pedalaman dan terisolir dilakukan dengan meningkatkan eksesibilitas ke wilayah tersebut. Pusat-pusat inti baru di wilayah Kabupaten Sintang, meliputi Kota Sepauk, (di barat), Kota Nanga Merakai (utara), Kayan Hilir dan Serawai di Bagian timur. Untuk menjamin bisa berperannya kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan sub wilayah, maka langkah awal yang dibutuhkan adalah pendanaan dalam biaya pembangunan dari pihak pemerintah dalam upaya lebih melengkapi sarana dan prasarana perkotaan di pusat inti baru tersebut dan perluasan jaringan transportasi, sehingga pihak swasta dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

(3) **Pengembangan wilayah perbatasan** Kabupaten Sintang dengan Sarawak-Malaysia, yang meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Tujuan pengembangan wilayah perbatasan ini adalah untuk melayani kegiatan produksi wilayah tersebut melalui penyediaan fasilitas produksi, sistem pemasaran yang memadai serta pelayanan sosial ekonomi lainnya, sehingga dapat mencegah perdagangan ilegal dan tersedotnya sumberdaya alam ke wilayah Sarawak (Malaysia).

(4) **Pengembangan distrik agropolitan**, sebagai media pembangunan perdesaan yang paling efektif mengingat Kabupaten sintang memiliki potensi agroindustri yang sangat potensial khususnya di sektor perkebunan, kehutanan dan jenih pertanian rakyat lainnya. Kawasan Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Dalam kawasan agropolitan terdapat integrasi spasial antara daerah penghasil bahan baku, sentra produksi, pusat industri pengolahan, dan pusat pemasaran regional.

(5) **Pengamanan dan pemantapan kawasan-kawasan fungsi lindung**, mengigat makin meningkatnya penebangan kayu hutan ilegal beberapa tahun terakhir, yang bila tidak diantisipasi dapat menghambat terciptanya *Sustainable development* di wilayah Kabupaten Sintang. Meningkatnya penebangan kayu ilegal, dikhawatirkan akan merusak sistem ekologis keseluruhan wilayah Kalimantan, mengingat besarnya potensi hutan lindung wilayah ini. Kawasan-kawasan lindung yang dimaksud disini, meliputi kawasan yang berfungsi melindungi kawasan dibawahnya, daerah resapan air, kawasan suaka alam dan

cagar budaya; kawasan yang berfungsi melindungi kawasan setempat seperti sempadan sungai dan kawasan danau serta mata air.

2.8.1. Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Sintang

Secara keseluruhan Kabupaten Sintang dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), seperti disajikan diuraikan berikut ini.

(1) **SWP I (Bagian Utara)**

Berpusat di Kecamatan Ketungau Tengah. Wilayah pendukungnya adalah Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir. Sektor potensial sebagai basis pengembangan wilayah diantaranya adalah pertambangan batubara, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan perkebunan

(2) **SWP II (Bagian Selatan)**

Berpusat di Kecamatan Sepauk, dan hanya memiliki satu wilayah pendukung yaitu Tempunak. Potensi strategis pada sektor pertambangan batubara dan perkebunan.

(3) **SWP III (Sintang Raya)**

Berpusat di Kecamatan Kota Sintang, sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pusat orientasi permodalan perdagangan tingkat kabupaten, pusat pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kabupaten, pusat wilayah pengembangan parsial, pusat pengembangan obyek wisata, dan pusat permukiman. Sektor potensinya adalah perkebunan dan hutan wisata. Wilayah pendukungnya adalah Kecamatan Binjai, Kelam Permai, Dedai, dan Sei Tebelian.

(4) **SWP IV (Bagian Tengah)**

Berpusat di Kayan Hilir, dan hanya memiliki satu wilayah pendukung yaitu Kayan Hulu. SWP IV memiliki potensi ekonomi berbasis kehutanan, khususnya hutan produksi

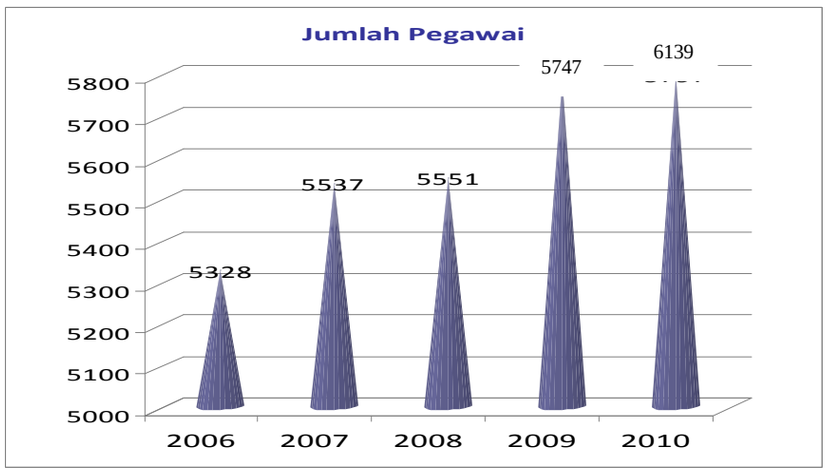
(5) **SWP V (Bagian Timur)**

Berpusat di Serawai, dan hanya memiliki satu wilayah pendukung yaitu Ambalau. Pada hakekatnya wilayah ini relatif lebih terorientasi atau memiliki hubungan fungsional dengan Kabupaten Melawi, khususnya dengan Nanga Pinoh. SWP V memiliki potensi panjaga lingkungan karena sebagian besar wilayahnya adalah kawasan lindung berupa Taman nasional. Potensi perekonomiannya berbasis kehutanan, khususnya hutan produksi.

Dalam bidang pemerintahan, sebagai sebuah Kabupaten yang relatif cukup berkembang diwilayah bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat, permasalahan-

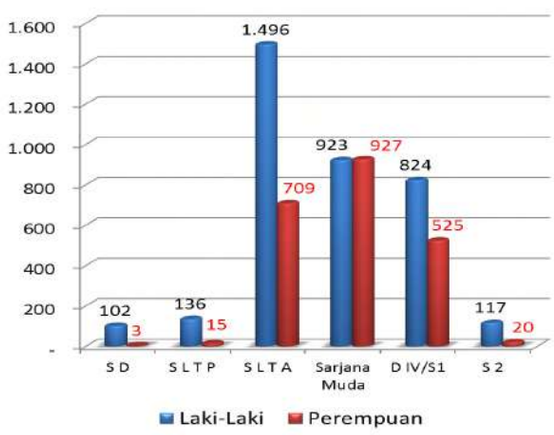
permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan di antaranya adalah, bagaimana meningkatkan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 6.139 orang.

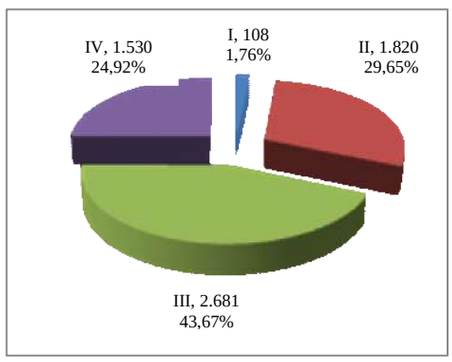
Gambar 2.16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sintang



Dari jumlah PNS yang ada tersebut, 1,76 persennya golongan I; 29,65 persen golongan II; 43,67 persen golongan III; dan 24,92 persennya golongan IV. Jika jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dirinci menurut jenjang pendidikan formalnya, maka yang berpendidikan SD sebanyak 99 orang, SLTP sebanyak 136 orang, SLTA sebanyak 2.238 orang, Sarjana Muda sebanyak 1.931 orang, DIV atau setara S1 sebanyak 1.553 orang, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 182 orang. Dengan demikian, sebagian besar atau 36,47% dari jumlah keseluruha PNS di Kabupaten Sintang adalah berpendidikan SLTA dan 1,61% saja yang berpendidikan SD.

Gambar 2.17
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan



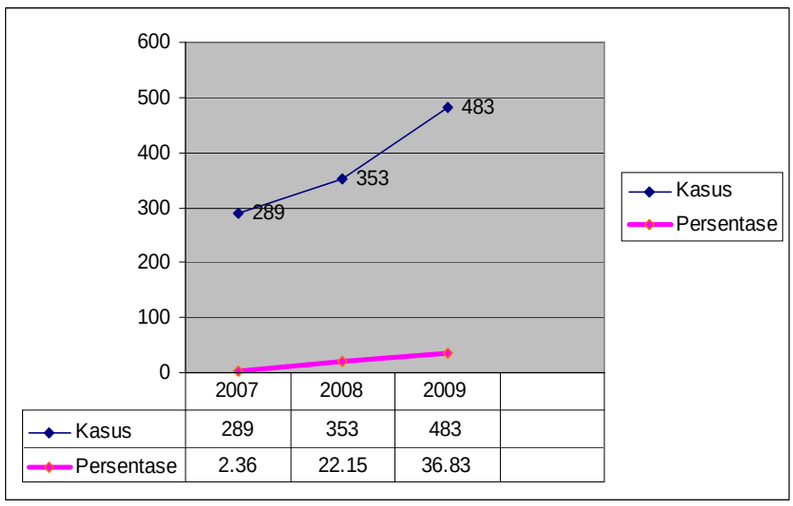


Kelembagaan pemerintahan daerah atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 13 Dinas, 6 Badan, Inspektorat, 3 Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan satu RSUD. Secara Administratif, Pemerintahan Kabupaten Sintang memiliki 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah dan dibentuknya suatu daerah otonom adalah, untuk meretas rentang kendali yang begitu jauh dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih memadai. Kondisi pelayanan umum yang bersifat mendasar di Kabupaten Sintang saat ini masih belum sepenuhnya mampu terpenuhi. Pelayanan listrik misalnya, masih menjadi persoalan yang cukup krusial hampir diseluruh daerah Kabupaten Sintang. Begitu juga halnya dengan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan yang di dasarkan pada SPM masih belum begitu optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan selain belum di dukung oleh bangunan sistem managemen yang berbasis pada e-government, juga masih terbatasnya berbagai fasilitas pendukung dan belum sepenuhnya mampu di dukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional.

Dalam kaitannya dengan bidang hukum yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, program merancang dan menghasilkan Perda yang dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang masih belum sepenuhnya mampu terpenuhi. Menurut data BPS tahun 2009, baru ada 9 Perda, 68 Peraturan Bupati dan 1318 dalam bentuk Keputusan Bupati. Kemudian tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Kepolisian dari tahun 2007 sampai dengan 2009, tingkat pelanggaran hukum yang mendominasi di Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir adalah tindakan curat, curanmor dan perjudian. Berdasarkan peringkat kerawanan tindak pidana perwilayah di wilayah kepolisian daerah Kalimantan Barat pada tahun 2009, Kabupaten Sintang berada pada rangking ke 8 (kedelapan). Berdasarkan data Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, pada tahun 2007 tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Sintang sebanyak 289 kasus atau turun 2,36% jika dibandingkan dengan tahun 2006 (296 kasus), pada tahun 2008 kasus tindakan kriminal naik menjadi 22,15% (353 kasus) jika dibandingkan dengan tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009, indeks kriminalitas juga mengalami kenaikan sebesar 36,83% (483 kasus) jika dibandingkan dengan tahun 2008.

Pemerintahan Desa sampai saat ini di Kabupaten Sintang berjumlah 281 Desa. Kondisi sampai tahun 2010, Kabupaten Sintang memiliki 281 Pemerintahan Desa, sebanyak 113 desa telah memiliki kantor dan 168 desa belum memiliki gedung kantor. Dari 113 desa yang memiliki kantor sebanyak 79 kantor rusak berat dan 34 kantor dalam kondisi baik.

Gambar 2.18
Tindakan Kriminal Persatuan Wilayah Kabupaten Sintang



	2007	2008	2009	
Kasus	289	353	483	
Persentase	2.36	22.15	36.83	

Dari grafik tersebut terlihat bahwa tindakan kriminalitas di Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Namun demikian, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang relatif cukup baik, relatif tenang, dan stabil. Kondisi ini tercipta karena berkat kesigapan aparat keamanan dan peran serta aktif masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Namun demikian, jika dilihat dari angka kriminalitas dalam tiga tahun terakhir, terutama tindakan kejahatan curat dan curanmor dari tahun ke tahun cenderung meningkatkan.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Sintang dalam bidang hukum dan ketertiban umum untuk lima tahun kedepan adalah: (1) Mempersiapkan dan merancang berbagai Perda yang dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang, (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, (3) Menurunkan indeks kriminalitas.

Mengenai perkembangan politik dan demokrasi di era desentralisasi di Kabupaten Sintang saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin dinamisnya peran politik masyarakat, partai politik, DPRD dan institusi lainnya

yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, tingkat kualitas dalam kehidupan berdemokrasi masih belum sepenuhnya mampu untuk ditegakkan, hal ini dikarenakan selain faktor tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dan juga faktor kapasitas dan kapabilitas elit politik yang belum sepenuhnya mampu menegimplementasikan norma-norma politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Secara kuantitatif, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sintang dalam setiap pesta demokrasi semakin meningkat. Pada Pilkada Gubernur 2007 tingkat partisipasi politiknya 80,24%, Pemilu tahun 2009 tingkat partisipasinya 82,23%, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 tingkat partisipasinya 83,21%, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85,82%.

Namun demikian, sikap dan budaya partisipasi politik masyarakat secara umum masih bersifat dimobilisir dan belum sepenuhnya bersifat rasional dan otonom. Persaingan politik ditengah masyarakat masih terlalu kental dengan isu-isu yang didasarkan pada politik primordialistik. Budaya demokrasi yang seperti itulah yang saat ini masih berkembang dikalangan elit dan masyarakat di Kabupaten Sintang. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sintang sudah cukup berhasil menciptakan situasi dan kondisi politik yang kondusif bagi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang diselenggarakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Selama tahun 2006-2010, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sintang rata-rata sebesar 7,02% per tahun. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski sumbangannya dalam total pendapatan daerah relatif masih kecil namun rata-rata pertumbuhan PAD (11,13% per tahun) lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan dana perimbangan (3,73% per tahun).

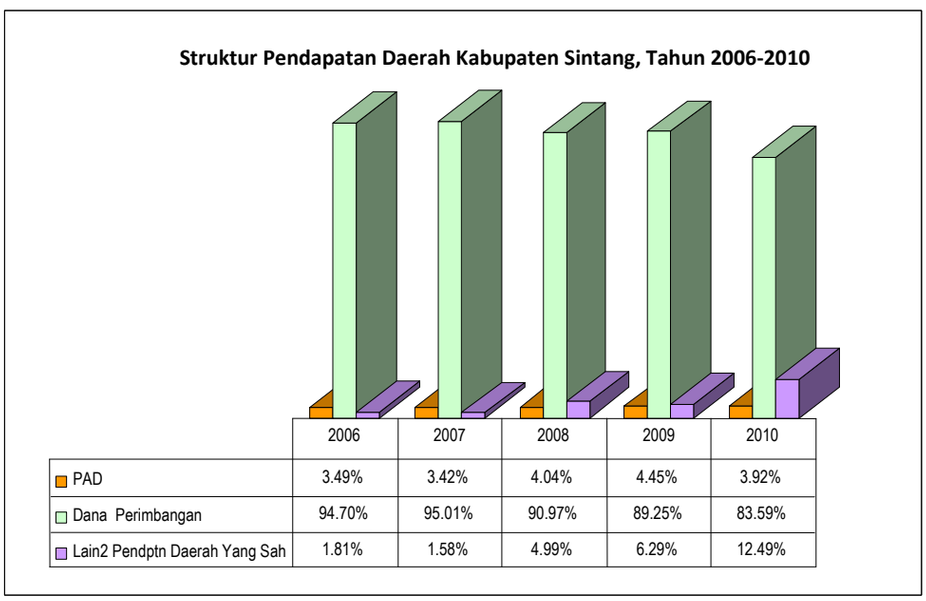
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)

Tahun	P.A.D	Dana Perimbangan	Lain2 Pendptn Daerah Yang Sah	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2006	18.61	504.59	9.64	532.84
2007	20.02	556.62	9.24	585.88
2008	28.45	640.43	35.13	704.01
2009	29.12	583.56	41.14	653.82
2010	26.93	574.40	85.81	687.14

Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

Pendapatan daerah pada 2008 mengalami peningkatan 20,16% dibandingan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 7,13%. Memasuki tahun 2010, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 5,10%.

Gambar 3.1
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)



Sumber pendapatan daerah yang utama bagi Kabupaten Sintang berasal dari dana perimbangan, rata-rata kontribusi sebesar 90,70% per tahun selama periode 2006-2010. Pada periode yang sama, kontribusi PAD dalam pendapatan daerah rata-rata sekitar 3,86% per tahun dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah rata-rata sekitar 5,43%.

Struktur pendapatan daerah demikian mencerminkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sintang dari sumber-sumber lokal. Mencermati struktur pendapatan daerah di atas, tantangan pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang adalah perlunya optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat dikurangi.

Selanjutnya, kemampuan penerimaan PAD berimplikasi langsung dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karenanya, pengelolaan PAD di Kabupaten Sintang pada kurun waktu 2006-2010 diupayakan pada intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah mengingat sumber-sumber PAD ini sangat strategis.

Peluang peningkatan PAD dimungkinkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan adanya penambahan objek pajak baru sehingga optimalisasi penerimaan daerah diupayakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam membayar pajak maupun retribusi.

Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah pendataan objek dan subjek pajak serta sosialisasi dan penyuluhan pajak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak. Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antar dinas/instansi pemungut. Penerimaan retribusi daerah selama tahun 2006-2010 cenderung melebihi penerimaan pajak daerah. Dalam dua tahun terakhir, retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

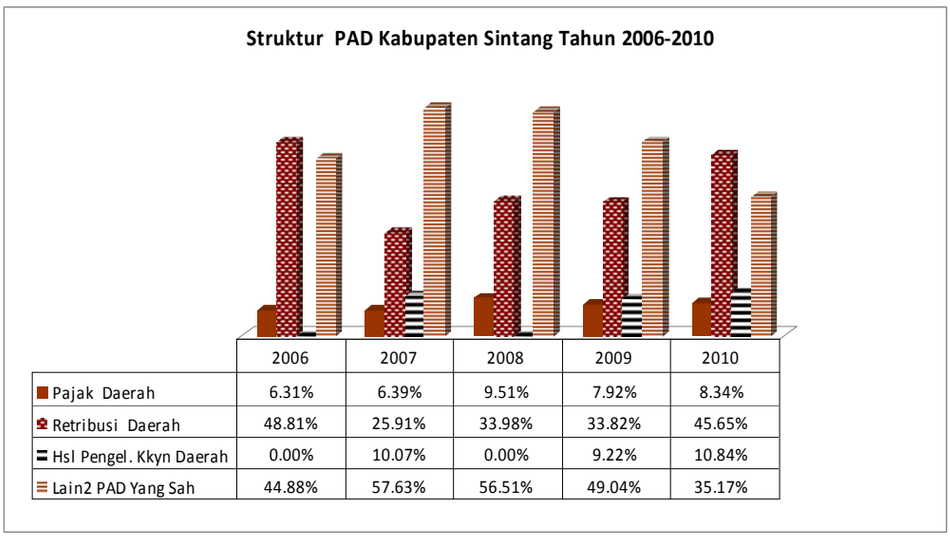
Tabel 3.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain2 PAD Yang Sah	TOTAL PAD
2006	1.175,12	9.083,79	-	8.352,86	18.611,76
2007	1.279,98	5.187,25	2.016,00	11.540,16	20.023,39
2008	2.706,18	9.666,45	-	16.074,05	28.446,68
2009	2.304,67	9.846,64	2.685,90	14.279,76	29.116,97
2010	2.245,70	12.292,99	2.919,00	9.472,22	26.929,91

Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan sumber utama PAD (pajak daerah dan retribusi daerah) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang sah. Penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan, dan menjadi dominan dalam struktur PAD Kabupaten Sintang.

Gambar 3.2
Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010 (Juta Rp)



	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Daerah	6.31%	6.39%	9.51%	7.92%	8.34%
Retribusi Daerah	48.81%	25.91%	33.98%	33.82%	45.65%
Hsl Pengel. Kkyn Daerah	0.00%	10.07%	0.00%	9.22%	10.84%
Lain2 PAD Yang Sah	44.88%	57.63%	56.51%	49.04%	35.17%

Selama tahun 2006-2010, Lain-lain PAD yang sah menyumbang PAD rata-rata sebesar 48,6% per tahun, retribusi daerah rata-rata sebesar 37,6% per tahun, dan pajak daerah sebesar 7,5% per tahun. Sedangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi dalam PAD Kabupaten Sintang rata-rata sebesar 6,0% per tahun.

Mengingat rendahnya kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) selama ini, maka tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya pengembangan kegiatan ekonomi daerah, pembenahan administrasi dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD pada umumnya.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sintang selama ini mengandalkan pada pungutan pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak pengambilan bahan galian C. Sementara penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak hiburan belum memberikan kontribusi yang memadai. Namun dengan penambahan objek pajak kabupaten menjadi 11 jenis pajak (ekstensifikasi reguler melalui UU No. 28 Tahun 2009) maka potensi peningkatan penerimaan pajak daerah masih memungkinkan untuk dioptimalkan.

Mencermati peluang peningkatan perpajakan daerah saat ini, peningkatan PAD Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, pembenahan dan peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	532.846.822.127,00	585.878.767.545,08	687.848.102.481,03	629.144.372.667,58	687.788.378.308,28	29,08
1.1	Pendapatan Asli Daerah	18.611.760.598,00	20.023.387.127,26	23.216.597.027,16	23.740.222.122,80	26.869.902.128,28	44,37
1.1.1	Pajak Daerah	1.175.114.836,00	1.279.974.850,00	1.695.112.898,00	2.150.491.101,60	2.245.698.056,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	9.083.790.216,00	5.187.250.360,00	8.407.760.960,00	9.002.166.992,00	12.232.988.416,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	2.016.000.002,16	2.016.000.002,16	2.685.896.324,16	2.919.000.006,32	
	Yang Dipisahkan						
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	8.352.855.546,00	11.540.161.915,10	11.097.723.167,00	9.901.667.705,04	9.472.215.649,96	
1.2	Dana Perimbangan	504.598.131.425,00	556.619.340.417,82	629.216.229.353,28	578.156.920.544,78	574.404.600.511,00	13,83
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	17.670.035.941,00	21.796.340.417,82	35.344.019.353,28	37.508.170.544,78	31.106.059.511,00	
	Pajak						
1.2.2	Dana Alokasi Umum	445.568.000.000,00	488.394.000.000,00	538.389.210.000,00	486.881.750.000,00	490.697.841.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	35.160.095.484,00	46.429.000.000,00	55.483.000.000,00	53.767.000.000,00	52.600.700.000,00	
1.2.4	Dana Perimbanngan dari Provinsi	6.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	9.636.930.104,00	9.236.040.000,00	35.415.276.100,59	27.247.230.000,00	86.513.875.669,00	797,73
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan	0,00	7.746.040.000,00	13.563.760.900,59	11.577.405.000,00	14.815.369.880,00	
	Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	2.639.005.200,00	0,00	60.603.005.789,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	0,00	1.490.000.000,00	1.335.000.000,00	10.669.825.000,00	11.095.500.000,00	
	Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.6	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	17.877.510.000,00	0,00	0,00	

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	**1.271.313.621.881,21**	**1.395.083.547.472,57**	**1.515.995.801.169,18**	**4,58**
1.1	**ASET LANCAR**	**97.669.959.457,57**	**96.920.301.582,60**	**114.979.102.705,06**	**4,35**
1.1.1	Kas di Kas Daerah	82.585.176.098,57	86.830.001.238,60	106.031.293.283,06	4,57
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.338.990.769,00	31.844.003,00	83.366.879,00	7,88
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	59.597.809,00	6.912.550,00	42.385.857,00	17,52
1.1.4	Piutang Pajak	79.710.075,00	42.007.890,00	63.009.690,00	6,08
1.1.5	Piutang Retribusi	1.763.756.897,00	896.470.417,00	1.161.392.858,00	4,11
1.1.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan	0,00	808.788.000,00	0,00	
1.1.7	Piutang Lainnya	5.932.165.956,00	4.547.873.795,00	3.936.540.604,00	3,68
1.1.8	Persediaan	5.910.561.853,00	3.756.403.689,00	3.661.113.534,00	3,98
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**29.773.052.355,00**	**31.488.988.355,00**	**31.210.485.805,00**	**3,92**
1.2.1	**Investasi Non Permanen**	**-**	**1.715.936.000,00**	**1.437.433.450,00**	**2,51**
1.2.1.	Dana Bergulir	0,00	1.715.936.000,00	1.437.433.450,00	2,51
1.2.2	**Investasi Permanen**	**29.773.052.355,00**	**29.773.052.355,00**	**29.773.052.355,00**	**3,89**
1.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.773.052.355,00	29.773.052.355,00	29.773.052.355,00	3,89
1.3	**ASET TETAP**	**1.108.679.071.263,74**	**1.234.955.585.147,07**	**1.334.350.622.866,22**	**4,63**
1.3.1	Tanah	72.730.291.215,00	82.486.030.264,89	90.318.009.564,57	4,65
1.3.2	Peralatan dan Mesin	169.759.689.298,55	181.780.686.924,40	186.872.038.015,98	4,71
1.3.3	Gedung dan Bangunan	363.278.002.473,33	426.007.931.898,19	469.931.764.482,36	4,69
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	483.228.351.542,19	516.855.953.469,15	553.445.499.902,78	4,53
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	12.460.697.892,39	13.084.275.433,94	13.062.928.216,53	4,52
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.222.038.842,28	14.740.707.156,50	20.720.382.684,00	6,89
1.4	**DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.5	**ASET LAINNYA**	**35.191.538.804,90**	**31.718.672.387,90**	**35.455.589.792,90**	**5,31**
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	949.002.272,90	777.938.897,90	3.374.927.967,90	14,56
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	93.920.035,00	
1.5.3	Aset Tak Berwujud	1.833.400.000,00	1.958.635.000,00	1.958.635.000,00	5,57
1.5.4	Aset Lain-lain	32.409.136.532,00	28.982.098.490,00	30.028.106.790,00	5,04
	JUMLAH ASET DAERAH	**1.271.313.621.881,21**	**1.395.083.547.472,57**	**1.515.995.801.169,18**	
2	**KEWAJIBAN**	**4.284.855.275,00**	**48.140.900,00**	**1.967.246.482,00**	**121,95**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4.284.855.275,00**	**48.140.900,00**	**1.967.246.482,00**	**121,95**
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.284.855.275,00	0,00	145.182,00	2,35
2.2.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	48.140.900,00	1.967.101.300,00	122,58
3	**EKUITAS DANA**	**1.267.028.766.606,20**	**1.395.035.406.572,57**	**1.514.028.554.687,18**	**4,59**
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	**93.385.104.182,56**	**96.872.160.682,60**	**113.011.856.223,06**	**4,39**
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	82.601.479.724,56	86.836.913.788,60	106.073.533.958,06	4,56
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	1.338.990.769,00	31.844.003,00	83.366.879,00	6,88
3.1.3	Cadangan Piutang	7.775.632.928,00	6.295.140.102,00	5.160.943.152,00	3,29
3.1.4	Cadangan Persediaan	5.910.561.853,00	3.756.403.689,00	3.661.113.534,00	3,98
3.1.5	Pendek	(4.241.561.092,00)	(48.140.900,00)	(1.967.101.300,00)	121,60
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**1.173.643.662.423,64**	**1.298.163.245.889,97**	**1.401.016.698.464,12**	**4,62**
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka	29.773.052.355,00	31.488.988.355,00	31.210.485.805,00	3,92
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.108.679.071.263,74	1.234.955.585.147,07	1.334.350.622.866,22	4,63
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	35.191.538.804,90	31.718.672.387,90	35.455.589.792,90	5,31
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.271.313.621.881,20**	**1.395.083.547.472,57**	**1.515.995.801.169,18**	**4,58**

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	Keterangan
1.	Rasio lancar (current ratio)	22,79	2.013,26	58,45	Aktiva Lancar dibagi Hutang Lancar
2.	Rasio quick (quick ratio)	21,41	1.935,23	56,59	Aktiva Lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,00	0,00	0,00	Total hutang dibagi total aktiva
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,00	0,00	0,00	Total hutang dibagi total modal
Catatan :					
	Aktiva Lancar	97.669.959.457,57	96.920.301.582,60	114.979.102.705,06	
	Hutang Lancar	4.284.855.275,00	48.140.900,00	1.967.246.482,00	
	Persediaan	5.910.561.853,00	3.756.403.689,00	3.661.113.534,00	
	Total Hutang	4.284.855.275,00	48.140.900,00	1.967.246.482,00	
	Total Modal (Ekuitas)	1.267.028.766.606,21	1.395.035.406.572,57	1.514.028.554.687,18	
	Total Aktiva	1.271.313.621.881,21	1.395.083.547.472,57	1.515.995.801.169,18	

3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karenanya, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Belanja daerah diarahkan/difokuskan pada pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah secara bertahap mulai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja diklasifikasikan menurut belanja tidak langsung/belanja aparatur dan belanja langsung/belanja pelayanan publik. Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Pengelolaan belanja yang utama adalah meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja, meningkatkan pelayanan publik, dan mengedepankan alokasi belanja yang ideal antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Belanja tidak langsung diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan

untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu. Belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas tingkat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kependidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, serta menggiatkan pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Belanja daerah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Peningkatan cukup besar pada belanja daerah terjadi pada tahun 2006. Semula belanja daerah sebesar Rp 292,21 Milyar pada tahun 2005, dan meningkat menjadi Rp 547,90 Milyar pada tahun 2006. Memasuki tahun 2008, alokasi belanja kembali mengalami peningkatan, menjadi Rp 769,98 Milyar (tahun 2007=Rp 658,36 Milyar). Pada tahun 2008, alokasi terbesar untuk belanja tidak langsung adalah pada belanja pegawai.

Pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan volume belanja daerah Kabupaten Sintang secara keseluruhan dibandingkan tahun 2009, dan tetap disertai dengan peningkatan alokasi belanja tidak langsung. Peningkatan belanja pada kelompok ini dikarenakan belanja pegawai mengalami kenaikan cukup tajam. Sementara belanja langsung mengalami penurunan, yakni dari Rp 371,24 Milyar menjadi Rp 355,88 Milyar.

Tabel 3.6
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

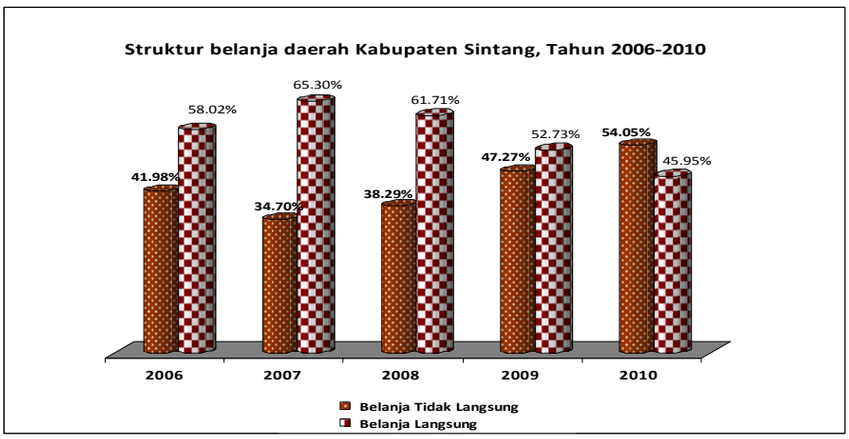
Kelompok Belanja	2006	2007	2008	2009	2010
I. Belanja Tidak Langsung	**230.03**	**228.45**	**294.81**	**332.80**	**418.64**
1. Belanja Pegawai	204.89	181.21	232.21	267.56	329.21
2. Belanja Bunga	-	2.00	2.30	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-	3.14	10.51
4. Belanja Hibah	-	-	0.94	8.64	28.04
5. Belanja Bantuan Sosial	-	14.60	21.81	8.19	7.56
6. Belanja Bagi Hasil kpd Pem.	-	-	-	-	-
7. Blnj. Bantuan Keu. kpd Pem.Desa	23.69	28.71	37.05	44.71	43.11
8. Belanja Tidak Terduga	1.45	1.93	0.50	0.56	0.21
II. Belanja Langsung	**317.87**	**429.91**	**475.17**	**371.24**	**355.88**
1. Belanja Pegawai	-	43.97	44.84	41.20	27.14
2. Belanja Barang dan Jasa	-	170.49	200.51	190.47	180.46
3. Belanja Modal	-	215.45	229.82	139.57	148.28
Total Belanja (I + II)	**547.90**	**658.36**	**769.98**	**704.04**	**774.52**

Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

Perkembangan struktur belanja daerah selama tahun 2008-2010 menunjukkan trend peningkatan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun. Meningkatnya alokasi belanja pegawai menjadikan proporsi belanja langsung mengalami penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir ini. Struktur belanja daerah menjadi kurang berimbang, dan puncaknya terjadi pada tahun 2010 ketika

proporsi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung.

Gambar 3.3
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)



Meski belanja langsung mengalami penurunan, namun komponen belanja modal terjadi peningkatan alokasi belanja. Sejalan dengan meningkatnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sintang di masa mendatang, memberikan konsekwensinya bahwa kemampuan keuangan daerah juga harus diupayakan meningkat seirama dengan peningkatan belanja daerah.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x 100%
1.	Tahun Anggaran 2008	348.663.190.618,85	785.766.019.416,45	44,37
2.	Tahun Anggaran 2009	357.808.692.682,28	712.326.347.392,15	50,23
3.	Tahun Anggaran 2010	416.686.170.207,52	775.263.292.097,43	53,75

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**687.848.102.481,03**	**629.144.372.667,58**	**687.788.378.308,83**
	Dikurangi Realisasi :			
2	Belanja Daerah	769.986.869.416,45	704.040.451.063,15	775.163.292.097,43
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.779.150.000,00	8.285.896.329,00	100.000.000,00
A	**Defisit Riil**	**(97.917.916.935,42)**	**(83.181.974.724,57)**	**(87.474.913.788,60)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	97.517.916.935,42	82.601.974.724,57	86.836.913.788,60
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	400.000.000,00	580.000.000,00	638.000.000,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**97.917.916.935,42**	**83.181.974.724,57**	**87.474.913.788,60**
A + B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 3.9
Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	99,59	99,30	99,27
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,41	0,70	0,73
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.10

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008		2009		2010		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	
1	Jumlah SiLPA	97.517.916.935,42	100,00	82.601.974.724,57	100,00	86.836.913.788,60	100,00	-10.95
2	Pelampauan Penerimaan PAD	23.216.597.027,16	23,81	23.740.222.122,80	28,74	26.869.902.128,28	30,94	15,74
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	629.216.229.353,28	645,23	578.156.920.544,78	699,93	574.404.600.511,00	661,48	-8.71
4	Pelampauan Penerimaan Lain-laian Pendapatan Daerah yang sah	35.415.276.100,59	36,32	27.247.230.000,00	32,99	86.513.875.669,55	99,63	144,28
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang lima tahun yang akan datang. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber pendapatan yang baru.

Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah periode 2006-2010 prediksi kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Sintang tahun 2011 sampai tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang,
2011-2015

PENDAPATAN DAERAH	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2012 (Rp.)	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)
- PAD	28.944.950.275,96	35.395.851.296,00	47.354.262.428,85	49.372.663.554,80	50.971.152.835,71
- Dana Perimbangan	660.315.776.511,00	759.128.287.500,00	758.205.287.500,00	756.871.956.000,00	759.762.336.000,00
- Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	15.119.400.000,00	16.327.272.000,00	17.794.836.480,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**701.260.726.786,96**	**808.524.138.796,00**	**820.678.949.928,85**	**822.571.891.554,80**	**828.528.325.315,71**

Sumber: Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

Sebagaimana kondisi beberapa tahun sebelumnya, pada kurun tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Sintang masih tetap mengandalkan sumber pendanaan dari transfer pusat, dengan tetap mengupayakan peningkatan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari PAD maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan seoptimal mungkin dalam rangka memperkecil pembiayaan netto.

Selain mengandalkan penerimaan dana perimbangan, untuk lima tahun mendatang pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang juga dimungkinkan dari penerimaan sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan perkembangan pendapatan asli daerah periode 2006-2010, diprediksikan perolehan PAD Kabupaten Sintang tahun 2011 sampai tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Prediksi PAD Kabupaten Sintang, 2011-2015

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2012 (Rp.)	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)
- Pajak Daerah	2.243.280.397,00	4.435.080.397,00	4.445.778.859,55	5.423.047.789,50	6.142.942.061,38
- Retribusi Daerah	13.370.798.278,00	15.684.847.712,00	27.609.854.195,00	28.602.447.266,00	29.459.940.322,28
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.000.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
- Lain-lain PAD Yang Sah	10.330.871.600,96	11.875.923.187,00	11.898.629.374,30	11.847.168.499,30	11.868.270.452,05
TOTAL PAD	**28.944.950.275,96**	**35.395.851.296,00**	**47.354.262.428,85**	**49.372.663.554,80**	**50.971.152.835,71**

Sumber: Hasil proyeksi PAD Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

Untuk mendukung kemampuan pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang, diperkirakan peningkatan penerimaan PAD sebagian diperoleh dari retribusi daerah dan pajak daerah mengingat adanya perluasan objek pajak sejak diberlakukannya Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Komponen lainnya yang diperkirakan mengalami peningkatan adalah lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi diperkirakan akan meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Sintang untuk lima tahun mendatang. Mencermati penerimaan dana perimbangan selama tahun 2006-2010, maka diprediksikan penerimaan dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2011-2015. Total dana perimbangan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 660,31 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 759,76 Milyar pada tahun 2015.

Tabel 3.13
Prediksi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, 2011-2015

DANA PERIMBANGAN	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2012 (Rp.)	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)
- Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	29.106.059.511,00	35.106.059.500,00	34.183.059.500,00	32.849.728.000,00	35.740.108.000,00
- Dana Alokasi Umum	553.592.817.000,00	646.998.388.000,00	646.998.388.000,00	646.998.388.000,00	646.998.388.000,00
- Dana Alokasi Khusus	77.616.900.000,00	77.023.840.000,00	77.023.840.000,00	77.023.840.000,00	77.023.840.000,00
TOTAL DANA PERIMBANGAN	**660.315.776.511,00**	**759.128.287.500,00**	**758.205.287.500,00**	**756.871.956.000,00**	**759.762.336.000,00**

Sumber: Hasil proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

Sebagian besar perolehan dana perimbangan berasal dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana pusat dalam bentuk bagi hasil pajak (PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29) dan bagi hasil bukan pajak (PSDH, sumberdaya perikanan, dan pertambangan umum), serta dana perimbangan dari provinsi (termasuk dana bagi hasil pajak) merupakan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Keseluruhan perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Sintang diperuntukkan untuk menunjang belanja daerah. Berdasarkan perkembangan belanja daerah periode 2006-2010, diperkirakan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Sintang terus meningkat untuk beberapa tahun mendatang.

Tabel 3.14
Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, 2011-2015

BELANJA DAERAH	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2012 (Rp.)	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)
- Belanja Tidak Langsung	341.198.976.000,00	349.728.950.000,00	352.351.917.000,00	357.637.196.000,00	359.425.382.000,00
- Belanja Langsung	360.061.750.786,96	458.795.188.796,00	468.327.032.928,85	464.934.695.554,80	469.102.943.315,71
Total Belanja Daerah	*701.260.726.786,96*	*808.524.138.796,00*	*820.678.949.928,85*	*822.571.891.554,80*	*828.528.325.315,71*
- % Belanja Tidak Langsung	48,66	43,26	42,93	43,48	43,38
- % Belanja Langsung	51,34	56,74	57,07	56,52	56,62

Sumber: Hasil proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

Pada tahun 2011 proporsi belanja tidak langsung diperkirakan masih relatif tinggi, mencapai 48,66% dari total belanja sebesar Rp 701,26 Milyar. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan sektor publik, maka diperkirakan proporsi belanja tidak langsung semakin berkurang pada tahun 2015, yakni hanya sekitar 43,38% dari total belanja sebesar Rp 828,53 Milyar.

Dengan demikian, kerangka pendanaan pembangunan dalam APBD Kabupaten Sintang yang mencakup pendapatan daerah dan belanja daerah secara keseluruhan menunjukkan *trend* kenaikan selama tahun 2011-2015, dengan

tetap mengupayakan pembiayaan netto yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 3.15
Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2008 Rp.	2009 Rp.	2010 Rp.	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**233.518.638.073,12**	**277.871.191.475,13**	**294.908.224.101,52**	**26,29**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	195.893.063.219,84	221.404.675.730,62	252.549.941.225,52	
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD Operasional KDH/WKDH	2.281.555.500,00	2.326.080.000,00	2.326.080.000,00	
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Bagi Hasil	35.344.019.353,28	54.140.435.744,51	40.032.202.876,00	
B	**Belanja Langsung**	**29.566.891.997,96**	**42.042.484.763,40**	**52.978.348.952,00**	**79,18**
1	Belanja Honorarium PNS Khusu untuk Guru dan	22.015.124.900,00	34.392.840.000,00	45.383.015.000,00	
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.628.450.000,00	2.317.951.720,00	2.035.387.500,00	
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan listrik, air, telepon dan sejenisnya)	5.923.317.097,96	5.331.693.043,40	5.559.946.452,00	
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada panjangnya)	0,00	0,00	0,00	
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ada kontrak jangka panjangnya)	0,00	0,00	0,00	
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
2	Pembayaran Utang Pokok	0,00	0,00	0,00	
Total (A+B+C)		**263.085.530.071,08**	**319.913.676.238,53**	**347.886.573.053,52**	**32,23**

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)
1	Pendapatan	701.260.726.786,96	808.524.138.796,00	820.678.949.928,85	822.571.891.554,80	828.528.325.315,71
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	106.073.533.958,06	90.081.345.531,60	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Total Penerimaan	**807.334.260.745,02**	**898.605.484.327,60**	**860.678.949.928,85**	**852.571.891.554,80**	**848.528.325.315,71**
	Dikurangi :					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Mengikat serta Prioritas Utama	464.409.077.809,15	465.261.756.193,28	530.670.890.633,61	583.816.502.337,28	644.901.691.506,24
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan		**342.925.182.935,87**	**433.343.728.134,32**	**330.008.059.295,24**	**268.755.389.217,52**	**203.626.633.809,47**

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)
I	**Kapasitas riil Kemampuan Keuangan**	**342.925.182.935,87**	**433.343.728.134,32**	**330.008.059.295,24**	**268.755.389.217,52**	**203.626.633.809,47**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	**Belanja Langsung**	**60.545.334.597,20**	**69.209.391.419,42**	**79.131.282.428,24**	**90.495.505.317,97**	**103.513.814.693,71**
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi :					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	60.545.334.597,20	69.209.391.419,42	79.131.282.428,24	90.495.505.317,97	103.513.814.693,71
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	**342.925.182.935,87**	**433.343.728.134,32**	**330.008.059.295,24**	**268.755.389.217,52**	**203.626.633.809,47**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	**Belanja Tidak Langsung**	**308.663.562.783,93**	**353.407.483.364,06**	**404.785.211.339,33**	**463.787.928.784,44**	**531.555.300.633,52**
	Dikurangi :					
III.b	Belanja Tidak Langsung Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	60.545.334.597,20	69.209.391.419,42	79.131.282.428,24	90.495.505.317,97	103.513.814.693,71
III	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)**	**248.118.228.186,73**	**284.198.091.944,64**	**325.653.928.911,09**	**373.292.423.466,47**	**428.041.485.939,81**
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-II-III)	**187.345.739.755,58**	**129.842.035.051,58**	**61.082.397.720,60**	**26.936.485.240,79**	**2.757.088.485,81**

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2010 Kabupaten Sintang sudah berusia lebih dari setengah abad. Pada usia ini, jika merujuk pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, angka Kemiskinan, dan angka Pengangguran, maka tampak bahwa posisi Kabupaten Sintang relatif baik karena pada tahun 2009 secara umum memiliki ukuran yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan Barat. Disamping itu, khusus dalam pengelolaan keuangan, daerah ini menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai kabupaten yang 3 (tiga) tahun berturut-turut mengesahkan APBD tepat waktu.

Meskipun demikian, karena posisi geografisnya yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, daerah ini diyakini berpeluang besar menjadi daerah yang lebih maju dan lebih berdaya saing. Hanya saja untuk mewujudkan itu, dibutuhkan adanya percepatan pembangunan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dan masuknya investasi yang berkelanjutan. Hal ini tentu saja membutuhkan sejumlah prasyarat, yaitu antara lain:

1. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintahan daerah yang disamping mau dan mampu mendorong sinergitas antara birokrasi, masyarakat, dan dunia usaha juga mau memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Harus diakui bahwa tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sintang hingga saat ini masih memerlukan perhatian dan proses optimalisasi yang sungguh-sungguh.
2. Adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Fakta menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang masih terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kecamatan dan antar sektoral. Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya ekonomi biaya tinggi dan menghambat masuknya investasi.
3. Adanya tertib hukum yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kondisi Kabupaten Sintang yang selama ini cukup kondusif harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Dampak negatif dari Pilkada langsung yang membuat masyarakat seakan terkotak-kotak harus segera dihilangkan.

Bupati dan wakil Bupati terpilih adalah pemimpin bagi semua rakyat Sintang tanpa membedakan suku, agama, partai, dan golongan.

4. Adanya orientasi pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Sintang merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang sangat potensial dikembangkan untuk perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu, basis utama pengelolaan sumberdaya alam tersebut adalah keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan rakyat miskin.
5. Adanya keserasian dengan lingkungan strategis yang melingkupinya. Pembangunan Kabupaten Sintang harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategisnya baik pada tataran regional, nasional, maupun global. Karena hanya dengan demikian daerah ini dapat mengukur kelebihan dan kekurangannya, menentukan sinergi yang mungkin dilakukannya, serta mengevaluasi ketertinggalannya untuk kemudian memilih prioritas dan mempercepat laju pembangunannya baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

a. Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat sebagai akibat terbatasnya jaringan irigasi, sulitnya mendapat benih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasana jalan usaha tani dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.

b. Belum optimalnya pengembangan mutu sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh relatif rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, banyaknya angka pengangguran, dan terbatasnya pasokan air bersih dan listrik.

c. Belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan yang sangat potensial dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang dari dan ke Malaysia.

d. Terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik serta mengganggu daya dukung jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran.

e. Kondisi infrastruktur demikian mempersulit upaya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman sekaligus yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Panjang jalan di Kabupaten Sintang saat ini hanya 3.122,78 kilometer termasuk jalan desa. Dari total panjang jalan tersebut hanya 20,85% yang beraspal, 5,31% jalan kerikil dan 73,62% masih berupa jalan tanah.

f. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, terutama disebabkan oleh luas dan jauhnya rentang kendali pemerintahan provinsi.

g. Belum optimalnya investasi swasta. Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa realisasi dari rencana investasi PMDN dan PMA sangat rendah, yaitu kurang dari 30%.

h. Peraturan perundangan di daerah belum kondusif bagi pengembangan usaha, antara lain ditunjukkan oleh belum dioperasionalkannya penyederhanaan birokrasi perizinan dalam bentuk One Stop Service (OSS).

i. Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru. Kondisi pada tahun 2008 misalnya, jumlah murid SD mencapai 57.266 orang dan jumlah guru yang ada hanya 2.795 orang. Hal ini berarti rasio murid terhadap guru mencapai 20,49 yang artinya bahwa setiap guru mempunyai beban mendidik rata–rata sebanyak 21 murid. Di tingkat SLTP, jumlah murid mengalami peningkatan sekitar 8,29 persen. Namun berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah murid tersebut jumlah guru justru mengalami penurunan sebesar 2,03 persen.

j. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerah perdesaan, dan sangat bervariasinya jenis penyakit di masyarakat. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya ada 4 orang dokter spesialis dari 55 dokter yang bertugas di seluruh Kabupaten Sintang.

k. Semakin tingginya frekuensi tindak kriminal yang merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara keseluruhan jumlah kejahatan di Kabupaten Sintang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dari 289 kasus pada tahun 2007 menjadi 483 kasus pada tahun 2009.

l. Sintang memiliki permasalahan sosial yang cukup beragam dan meningkat

jumlahnya, di antaranya anak terlantar dan anak nakal, tuna-susila dan waria, pengemis dan gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Menurut catatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang**,** pada tahun 2008 terdapat sebanyak 1.447 penyandang cacat tubuh, 669 cacat mental dan 180 cacat ganda. Jumlah ini meningkat secara total sebesar 274,55 persen dibandingkan tahun 2007. Terjadi peningkatan jumlah korban narkoba, yaitu dari 9 orang pada tahun 2007 menjadi 66 orang pada tahun 2008.

4.2 ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah, ditetapkan beberapa isu strategis daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun (2011-2015) mendatang adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat.
b. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi.
c. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran.
d. Sulitnya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman sekaligus yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
e. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik, dan investasi.
f. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidik dan kesehatan.
g. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
h. Mendesaknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk meningkatkan pelayanan publik, yang rencana ibu kotanya adalah Sintang sehingga koordinasi antar SKPD dan antar Kabupaten di kawasan timur Kalimantan Barat semakin optimal untuk mendukung keserasian dan percepatan pembangunan daerah.

i. Rendahnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang sehingga membawa dampak terhadap nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta kedaulatan negara. Oleh karenanya perlu pembentukan Kabupaten Ketungau sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kembali pemerintahan dan pelayanan publik.

j. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang ramah investasi.

k. Tingginya frekuensi tindak kriminal yang merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Visi

Visi Kabupaten Sintang 2011-2015, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang 2006-2026, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, yaitu:

"KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"

RPJPD Kabupaten Sintang 2006-2026 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi Kabupaten Sintang 2011-2015 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan "*Millenium Development Goals* (MDG's)" yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia. Seperti diketahui bahwa MDG's meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan pada 2015. Ke-delapan aspek tersebut meliputi:

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; serta
8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Dengan mempertimbangkan RPJPN, RPJPD, dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2011-2015 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG PRODUKTIF, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS” MELALUI GERBANG EMAS JAKARTA SELATAN

Ada lima kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang 2011-2015, yaitu:

- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif**, adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, berkembangnya aktifitas perdagangan dan industri dengan tetap berwawasan lingkungan.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berkualitas**, adalah masyarakat yang derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya semakin membaik dan berkualitas tinggi, berakhlak mulia dan memiliki ketahanan budaya.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera**, adalah masyarakat yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi didukung infrastruktur dasar yang merata dan baik, pemanfaatan Sumber Daya Alam yang optimal serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Demokratis**, adalah masyarakat yang kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan prinsip–prinsip *good governance*.
- **Gerbang Emas Jakarta Selatan,** adalah semangat (jiwa) yang menginspirasi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Sintang untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunannya, melalui Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk peningkatan kapasitas (ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik) dalam program pembangunan Jalan, Karet, Tanaman Pangan, Sekolah, dan Kesehatan.

Visi ini didasari oleh kondisi masyarakat Kabupaten Sintang, yang meskipun indikator pembangunannya jika dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan Barat tidaklah buruk, akan tetapi dengan potensi yang ada sesungguhnya masih bisa dicapai lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Dengan demikian dibutuhkan adanya percepatan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis.

5.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2011-2015 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan insfrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Berdasarkan penjelasan misi, secara sederhana dapat diuraikan keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabuapten Sintang seperti Bagan 5.1 sebagai berikut:

Bagan 5.1.
KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN



5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya, dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Terlaksananya upaya penegakan supremasi hukum dan HAM.

5.3.2. Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, maka sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan.
2. Meningkatnya akses petani terhadap sumber daya produktif dan pasar.
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani.
4. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan
5. Meningkatnya peluang mengembangkan usaha produktif
6. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
8. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.

9. Meningkatnya pembangunan transportasi darat, transportasi sungai, dan transportasi udara.
10. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
13. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
14. Optimalnya pelayanan publik.
15. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah.
16. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah.
17. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.
18. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik.
19. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana ditulis dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, Dan Demokratis" Melalui Gerbang Emas Jakarta Selatan			
Misi :		**Tujuan :**	**Sasaran :**
Misi 1	: Memberdayakan Potensi Usaha Ekonomi Kerakyatan Yang Mengarah Pada Kemampuan Produksi dan Pemasaran.	Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.	1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan. 2. Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan pasar. 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani.
Misi 2	: Meningkatkan Peluang Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Usaha Produktif.	Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.	1. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan. 2. Meningkatnya peluang usaha produktif.
Misi 3	: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 4. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
Misi 4	: Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.	Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.	1. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 3. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.
Misi 5	: Meningkatkan pembangunan isfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.	Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.	1. Meningkatnya pembangunan transportasi darat. 2. Meningkatnya pembangunan transportasi sungai. 3. Meningkatnya pembangunan transportasi udara.
Misi 6	: Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.	Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.	1. Optimalnya pelayanan publik. 2. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah. 3. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah. 4. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.

Misi 7	: Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.	Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik;menegakkan supremasi hukum dan HAM.	1. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM.

5.4. Penggerak Utama (*Prime Mover*) Pembangunan Daerah

Penggerak utama pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah Gerbang Emas Jakarta Selatan. Yaitu suatu Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik melalui program pembangunan Jalan-Karet-Tanaman Pangan-Sekolah-Kesehatan.

JALAN *merupakan simbol insfrastruktur yang harus dibangun dan diperbaiki serta dibenahi baik kualitas maupun kuantitas*.

Pembangunan insfrastruktur yang dimaksud adalah insfrastruktur dasar yang meliputi: insfrastruktur Jalan, Jembatan, Pelabuhan Sungai, Bandar Udara, Energi/Kelistrikan, Air bersih, dan insfrastruktur lainnya untuk kepentingan orang, barang, dan jasa.

KARET *merupakan simbol perkebunan dan kehutanan*.

Pembenahan sektor perkebunan adalah pada sektor perkebunan rakyat melalui penerapan teknologi dan bibit unggul perkebunan yang berorientasi pasar dengan mempertimbangkan aspek agroekosistem dan budaya lokal dengan mendorong pengembangan agribisnis karet rakyat, sawit rakyat dan buah–buahan lokal seperti durian, cempedak, rambutan, dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Hutan juga menjadi perhatian dalam program ini, terutama pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri melalui pengembangan hutan tanaman industri (HTI), Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RLH) baik melalui dana kegiatan tingkat pusat (seperti Gerhan) maupun dana alokasi khusus tingkat kabupaten (seperti DAK–DR) yang melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman.

TANAMAN PANGAN *adalah simbol pertanian secara umum seperti tanaman padi, palawija, perikanan dan peternakan*.

Pembangunan Tanaman Pangan diharapkan antara lain akan mendorong: (1) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan; (2) Meningkatnya produksi perikanan; (3) Meningkatnya produksi kehewanan dan peternakan rakyat skala ekonomi berbasis sumber daya lokal; (4) Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein nabati maupun hewani; dan (5) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui program pengembangan agribisnis.

SEKOLAH *merupakan simbol pembangunan di bidang pendidikan, dalam rangka mencetak keunggulan sumber daya manusia Kabupaten Sintang*.

Mengingat pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pembangunan, maka arah kegiatan dalam progran ini adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan dukungan pengadaan prasarana/sarana pendidikan dasar di kantong–kantong kemiskinan dan tertinggal; (2) Fasilitasi bantuan dan perluasan cakupan pemberian beasiswa khusus untuk anak miskin; (3) Pembebasan beban biaya pendidikan dalam bentuk apapun bagi anak miskin; (4) Peningkatan program paket A dan paket B bagi masyarakat miskin; dan (5) Memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penduduk miskin.

KESEHATAN *merupakan simbol gaya hidup*.

Dengan tema itu, kita mengajak masyarakat untuk kembali pada hakikatnya, yaitu menjadikan gaya hidup sehat sebagai instrumen atau modal untuk menjalankan kehidupan sehari–hari. Masyarakat yang berperilaku sehat akan dapat menciptakan dan memelihara lingkungan yang sehat. Arah kegiatan dalam program ini adalah: (1) Peningkatan/perluasan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (2) Peningkatan keterjangkauan dan intensitas pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, tertinggal dan terisolasi; dan (3) Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya membangun sistem dan perilaku sehat masyarakat.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan lain-lain, serta dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis dengan melaksanakan secara bersama GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) melalui program JAKARTA–SELATAN (Jalan–Karet–Tanaman Pangan–Sekolah–Kesehatan).

6.1. Strategi Pembangunan

Dalam upaya menjamin terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis, maka strategi pembangunan yang akan dijalankan adalah:

1. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Human Basic Needs Strategy*):
   Adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar suatu masyarakat di suatu wilayah sehingga dapat hidup secara layak dan sejahtera. Strategi ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sintang.

2. Strategi Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Dasar (*Basic Infrastructure Development Strategy*):
   Adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya secara mudah, lancar, dan aman. Strategi ini diarahkan tidak hanya untuk membuka isolasi kawasan namun juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Sintang.

3. Strategi Perluasan Investasi (*Investment Development Strategy*):
   Adalah suatu srategi pembangunan yang terfokus pada upaya pengembangan investasi daerah pada sektor/bidang tertentu guna memacu pertumbuhan kemajuan daerah tersebut. Strategi ini diarahkan untuk memacu perekonomian daerah melalui perluasan kegiatan investasi di sektor perkebunan, sektor industri (yang mengolah hasil perkebunan), dan sektor pertambangan di Kabupaten Sintang.

4. Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja (*Creating Productive Employment Strategy*):
   Adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya penciptaan, perluasan, dan pembinaan kesempatan kerja suatu masyarakat. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang produktif di Kabupaten Sintang.

5. Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan Publik (*Improving of the Quality of Public Service Strategy*):
   Adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya peningkatan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat serta dengan tetap menerapkan azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Tabel 6.1.
Strategi, Arah dan Kebijakan
Kabupaten Sintang

Visi :	***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, Dan Demokratis" Melalui Gerbang Emas Jakarta Selatan***		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1 :	**Memberdayakan Potensi Usaha Ekonomi Kerakyatan Yang Mengarah Pada Kemampuan Produksi dan Pemasaran**		
Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan.	1.1 Memperluas areal lahan pertanian dan perkebunan. 1.2 Mengembangkan infrastruktur pendukung pertanian dan perkebunan.	1. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan komoditas unggulan karet rakyat.
	2. Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan pasar.	2.1 Menjalin kerjasama dengan sektor perbankan dalam peningkatan akses permodalan petani	2. Meningkatkan pengelolaan kehutanan dengan memantapkan dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan menjaga kelestariaannya.
	3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani.	3.1 Mengembangkan dukungan Iptek serta diseminasinya kepada petani. 3.2. Memfasilitasi dan mendorong kapasitas kelembagaan petani.	3. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan. dan meningkatkan akses terhadap pasar, melalui penyediaan informasi pasar dan peningkatan layanan promosi pasar.
Misi 2 :	**Meningkatkan Peluang Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Usaha Produktif**		
Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif	1. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan.	1.1 Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh sektor pembangunan. 1.2 kerjasama dengan pihak dunia usaha	1. Pengembangan penanaman modal daerah dengan memanfaatkan potensi lokal/ unggulan daerah. 2. Pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri) serta hasil pertambangan.
	2. Meningkatnya peluang usaha produktif.	2.1 Mengoptimalkan sistem informasi pasar kerja.	3. Pengembangan jaringan distribusi dan perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing daerah.

		2.2 Meningkatkan komptetensi tenaga kerja yang sesuai tututan dunia usaha	4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.
Misi 3	**: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan**		
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.	1.1 Mengoptimalkan peran swasta dalam pelayanan pendidikan. 1.2 Meningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pendidikan.	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan, pembiayaan. 2. Revitalisasi pendidikan kepelatihan, keahlian, dan dapat berpartisipasi dalam membangun dan dapat berpartisipasi dalam membangun dan mengembangan usaha.
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	2.1 Meningkatkan jumlah dan kompetensi para medis. 2.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendukung pelayanan kesehatan.	3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum), fasilitas kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	3.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.	4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
	4. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.	4.1 Mengembangkan kewirausahaan dan jika kepeloporan generasi muda . 4.2 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan kepemudaan. 4.3 Mengembangkan promosi seni budaya. 4.4 Memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga keagamaan.	5. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan. 6. Meningkatkan wawasan para pemuka agama untuk memantapkan toleransi antar umat beragama. 7. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi 4	**: Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur**		
Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur	1. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 3. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.	1.1 Meningkatkan koorinadi dan integrasi pembangunan daerah serasi dan seimbang. 1.2 Percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan strategis daerah. 2.1 Menjaga stabiltas ekonomi daerah. 2.2 Mengembangan sub sistem ekonomi daerah yang optimal dan menyeluruh. 3.1 Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar daerah. 3.2 Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan merata. 3.3 Pembenahan manajemen transporasi dasar daerah.	1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan dengan pola percepatan khusus daerah tertinggal. 2. Membangun infrastruktur interkoneksi antar kecamatan dan dengan daerah lain (jalan, telepon, dan internet), serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk merangsang pusat pertumbuhan ekonomi baru. 3. Menerbitkan kebijakan (regulasi dan deregulasi) dan promosi investasi khusus untuk daerah tertinggal.
Misi 5	**: Meningkatkan pembangunan isfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh**		
Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	1. Meningkatnya pembangunan transportasi darat. 2. Meningkatnya pembangunan transportasi sungai. 3. Meningkatnya pembangunan transportasi udara.	1.1 Menambah jumlah dan kualitas transportasi darat. 2.1 Menambah jumlah dan kualitas transportasi sungai. 3.1 Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pusat.	1. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi darat. 2. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi sungai. 3. Mempercepat pembangunan transportasi udara. 4. Mengembangkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor.

Misi 6	**:**	**Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah**	
Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah	1. Optimalnya pelayanan publik. 2. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah. 3. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah. 4. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	1.1 Pemantapan reformasi birokrasi pemerintah daerah. 2.1 Penataan dan peningkatan kualitas organisasi perangkat daerah. 3.1 Memperluas akses diklat terhadap aparatur Pemda. 4.1 Mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang berbasis kinerja.	1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan. 2. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. 3. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah. 4. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah. 6. Meningkatkan kemampuan pengelolaan belanja daerah. 7. Meningkatkan kemampuan manajemen administrasi dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
Misi 7	**:**	**Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM**	
Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik;menegakkan supremasi hukum dan HAM	1. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM.	1.1 Penerapan SPM pelayanan publik 2.1 Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan aparat keamanan.	1. Mengembangkan dan menerapkan azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan menghormati HAM. 3. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. 4. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan

a. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan komoditas unggulan karet rakyat.

b. Meningkatkan pengelolaan kehutanan dengan memantapkan dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan menjaga kelestariaannya

c. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan. dan meningkatkan akses terhadap pasar, melalui penyediaan informasi pasar dan peningkatan layanan promosi pasar

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

a. Ketahanan Pangan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
3. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6. Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
9. Pengembangan Budidaya Perikanan
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
11. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya
12. Pengembangan Budidaya Perikanan
13. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
14. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

c. Peningkatan Pengelolaan Kehutanan

1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
7. Perencanaan dan Pengembangan Hutan

d. Pertanahan

1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan
2. Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3. Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
4. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

6.2.2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif

a. Pengembangan penanaman modal daerah dengan memanfaatkan potensi lokal/ unggulan daerah.

b. Pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri) serta hasil pertambangan.

c. Pengembangan jaringan distribusi dan perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing daerah.

d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

a. Peningkatan Investasi.

1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana investasi

4. Pengendalian dan evaluasi investasi

b. Pengembangan Industri.

1. Pengembangan industri pengolahan
2. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknotogi Industri
4. Program Penataan Struktur Industri
5. Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi

c. Peningkatan Perdagangan.

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

d. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Baru Lokal Peningkatan daya saing perdagangan daerah

e. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Pengeloloan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Pengelolaan Areal Pemakaman
5. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

6.2.3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang

a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan dengan pola percepatan khusus daerah tertinggal.

b. Membangun infrastruktur interkoneksi antar kecamatan dan dengan daerah lain (jalan, telepon, dan internet), serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk merangsang pusat pertumbuhan ekonomi baru.

c. Menerbitkan kebijakan (regulasi dan deregulasi) dan promosi investasi khusus untuk daerah tertinggal.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

a. Penataan Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Tata Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b. Pekerjaan Umum

1. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
2. Program Pembangunan turap/talud/brojong
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
5. Program penyediaan dan pengolahan air baku
6. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8. Program pengendalian banjir
9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
10. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

c. Komunikasi dan Informatika

1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Komunlkasi dan Informasi

4. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
5. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
6. Kerjasama informsi dan media massa
7. Optimalisasi Peningkatan Teknologi Informasi
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11. Program Pengembangan Data dan Informasi
12. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Teknologi Informasi

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air
3. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
5. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
6. Inventarisasi dan Kajian Potensi Sumber energi
7. Pembangunan infrastruktur sumber energi dan ketenagalistrikan
8. Pemetaan potensi sumber daya mineral
9. Pembinaan dan Pengawasan MIGAS

e. Permukiman Perdesaan dan Perumahan

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6. Program pengelolaan areal pemakaman

f. Perencanaan Pembangunan

1. Pengembangan data/informasi
2. Kerjasama Pembangunan

3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program mengintesifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat
6. Pengembangan Wilayah Perbatasan
7. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
9. Perencanaan Pengembangan Kota
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
11. Perencanaan pembangunan daerah
12. Perencanaan pembangunan ekonomi
13. Perencanaan sosial budaya
14. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
15. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

g. Transmigrasi

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

6.2.4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh

a. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi darat dan sungai.

b. Mempercepat pembangunan transportasi udara.

c. Mengembangkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

a. Perhubungan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program peningkatan pelayanan angkutan

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

b. Pekerjaan umum

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
4. Tanggap darurat Jalan dan Jembatan
5. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

6.2.5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan kesejahteraan guru.

b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum), fasilitas kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

c. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

d. Revitalisasi pendidikan kepelatihan, keahlian, dan keterampilan untuk mempersiapkan generasi muda dapat berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif.

e. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.

f. Meningkatkan wawasan para pemuka agama untuk memantapkan toleransi antar umat beragama.

g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

h. Meningkatkan kesejahteraan, tumbuh kembang anak, perlindungan dan

partisipasi anak.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Pebaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pengembagan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
13. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

b. Penduduk dan Ketenagakerjaan

c. Pemberdayaan Perempuan

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

d. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Program Peningkatan Kualitas Layanan KB
2. Penambah jumlah tenaga PLKB
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (Program PKBR)
5. Program Pelayanan Kontrasepsi
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBIKR yang mandiri
7. Program Pengembangan Bahan lnformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BKB
9. Program Penataan Data dan lnformasi Keluarga Berencana dan PP

e. Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Penciptaan Lapangan Kerja
2. Program Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Penduduk Miskin
3. Peningkatan Tenaga Kerja

f. Pembangunan Bidang Keagamaan

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Agama
2. Program Peningkatan Kualitas Guru, Pengelolaan dan Layanan Sekolah Agama
3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

g. Pembangunan Bidang Kebudayaan

1. Pengembangan Nilai Budaya
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Destinasi Wisata
10. Program Pembangunan Kemitraan.

h. Kepemudaan dan Olahraga

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Peningkatan Upaya Penumbuhan
3. Peningkatan Upaya Penumbuhan
4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

6.2.6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah

a. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan.

b. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

c. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah.

d. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah.

f. Meningkatkan kemampuan pengelolaan belanja daerah.

g. Meningkatkan kemampuan manajemen administrasi dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
3. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan daerah.
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

6.2.7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM

a. Mengembangkan dan menerapkan azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan menghormati HAM.

c. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat.

d. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.

Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya akan dirinci ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
2. Membangun prinsip, standar dan pola pelayanan publik
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta menghormati HAM.
4. Membangun budaya politik yang demokratis
5. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.
7. Penataan Peraturan Perundang-undangan
8. Bantuan Hukum

6.2.8. Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis, maka kebijakan pembangunan wilayah kecamatan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menggerakkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat kecamatan di Kabupaten Sintang. Adapun konsep pengembangan wilayah kecamatan difokuskan pada potensi wilayah yang memiliki keunggulan komparatif sumber daya alam sekaligus menjadi penggerak perekonomian kecamatan maupun kabupaten.

Tabel 6.2
Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Potensi Wilayah	Arah Pengembangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	S e r a w a i	Potensi untuk tanaman perkebunan	Karet, Sawit, dan Kakao
2.	A m b a l a u	Potensi untuk tanaman perkebunan	Karet dan Sawit
3.	Kayan Hulu	Potensi untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya ikan	Karet, Sawit, Padi, dan Budidaya ikan
4.	S e p a u k	Potensi untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan Peternakan	Karet, Sawit, Padi, Budidaya ikan, dan Peternakan
5.	Tempunak	Potensi untuk tanaman Perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya ikan	Karet, Sawit, Padi, dan Budidya ikan
6.	D e d a i	Potensi untuk tanaman Perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya ikan	Karet, Sawit, Padi, dan Budidaya ikan
7.	Kayan Hilir	Potensi untuk tanaman Perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya ikan	Karet, Sawit, Padi, dan Budidya ikan
8.	S i n t a n g	Potensi untuk tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Karet, Sawit,dan Sayur-sayuran
9.	Sei. Tebelian	Potensi untuk tanaman Perkebunan, ternak Hortikultura	Karet, Sawit, ternak, dan Sayur-sayuran
10.	Kelam Permai	Potensi untuk tanaman Perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya ikan	Karet, Sawit, budidaya ikan, dan padi

11.	Binjai Hulu	Potensi untuk tanaman Perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura	Karet, Sawit, jagung, dan Sayur-sayuran
12.	Ketungau Hilir	Potensi untuk tanaman Perkebunan	Karet dan Sawit
13.	Ketungau Tengah	Potensi untuk tanaman Perkebunan	Karet, Sawit, Lada, dan Kakao
14.	Ketungau Hulu	Potensi untuk tanaman Perkebunan	Karet, Sawit, dan Kakao

Sumber: Analisis Tahun 2010.

Secara lebih sederhana keterkaitan antara misi, strategi, kebijakan, program pembangunan, dan urusan pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

6.3. Keterkaitan Misi, Strategi, Kebijakan, Program Pembangunan, dan Urusan Pemerintah

Tabel 6.3
Keterkaitan Misi, Strategi, Kebijakan, Program Pembangunan, dan Urusan Pemerintahan

Misi	Strategi	Kebijakan	Program	Urusan Pemerintahan
Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran	Strategi Perluasan Investasi	a. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan komoditas unggulan karet rakyat d. Meningkatkan pengelolaan kehutanan dengan memantapkan dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan menjaga kelestariaannya e. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan. dan meningkatkan akses terhadap pasar, melalui penyediaan informasi pasar dan peningkatan layanan promosi pasar.	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7. Program peningkatan produksi hasil peternakan 8. Program peningkatan penerapan teknologi	Urusan Pertanian; Urusan Kehutanan, Urusan Perikanan, Urusan Koperasi & UKM; Urusan Industri; Urusan Perdagangan, Urusan Penanaman Modal, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

			petemakan. 9. Program pengembangan budidaya perikanan. 10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 11. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 12. Program Pengendalian kebakaran hutan. 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 14. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam. 15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. 16. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah. 17. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 18. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 19. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.	
Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif	Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja	a. Pengembangan penanaman modal daerah dengan memanfaatkan potensi lokal/ unggulan daerah. b. Pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri) serta hasil pertambangan. c. Pengembangan jaringan distribusi dan perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing daerah. d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.	1. Peningkatan investasi. 2. Pengembangan industri. 3. Peningkatan perdagangan. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	Urusan Ketenagakerjaan; urusan Penanaman Modal, Urusan Ketahanan Pangan; Urusan Pertanian; Urusan Kehutanan, Urusan Perikanan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Industri, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur	Strategi Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Dasar	a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan dengan pola percepatan khusus daerah tertinggal. b. Membangun infrastruktur interkoneksi antar kecamatan dan dengan daerah lain (jalan, telepon, dan internet), serta infrastruktur teknologi inforrmasi dan komunikasi untuk merangsang pusat pertumbuhan ekonomi baru. c. Menerbitkan kebijakan (regulasi dan deregulasi) dan promosi investasi khusus untuk daerah tertinggal.	**Penataan Ruang** 1. Program Perencanaan Tata Ruang. 2. Program Pemanfaatan Tata Ruang. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. **Pekerjaan Umum** 1. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 2. Program Pembangunan turap/talud/brojong. 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong. 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 5. Program penyediaan dan pengolahan air baku. 6. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 8. Program pengendalian banjir. 9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan. **Komunikasi dan Informatika** 1. Program Pengembangan Data/Informasi. 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 4. Pembangunan infrastruktur ICT. 5. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi.	Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan; Urusan Pariwisata, Urusan energi dan sumber daya mineral, urusan pariwisata, urusan ketransmigrasian, urusan pertanahan

			6. Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. **Energi dan Sumberdaya Mineral** 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Program Penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD). 4. Program Inventarisasi dan Kajian Potensi Sumber energi. 5. Program Pembangunan Infrastruktur sumber energi dan ketenagalistrikan. **Permukiman Perdesaan dan Perumahan** 1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan. 4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. 5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 6. Program pengelolaan areal pemakaman. **Perencanaan Pembangunan** 1. Program Pengembangan data/informasi. 2. Program Kerjasama Pembangunan. 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat	

			tumbuh. 5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 6. Program perencanaan pembangunan daerah. 7. Program perencanaan pembangunan ekonomi. 8. Program perencanaan sosial budaya. 9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 10. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. **Transmigrasi** 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 2. Program Transmigrasi Lokal. 3. Program Transmigrasi Regional.	
Meningkatkan pembangunan isfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Strategi Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Dasar	a. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi darat dan sungai. b. Mempercepat pembangunan transportasi udara. c. Mengembangkan keterpaduan pembangunan infrstruktur antar wilayah dan antar sektor.	**Perhubungan** 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan. 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. **Pekerjaan umum** 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 3. Program Pembangunan turap/talud/brojong.	Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan

			4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong. 6. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan. 7. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan. 8. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan. 9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan .	
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan	Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan kesejahteraan guru. a. Menyediakan beasiswa daerah dan memfasilitasi perolehan beasiswa bagi putra-putri terbaik untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum), fasilitas kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. d. Revitalisasi pendidikan kepelatihan, keahlian, dan keterampilan untuk mempersiapkan generasi muda dapat berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan	**Urusan Wajib Pendidikan** 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini . 2. Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah . 4. Program Pendidikan Non Formal . 5. Program Pendidikan Luar Biasa. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. **Urusan Wajib Kesehatan** 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan. 3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 7. Program Pengembangan	Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Lingkungan Hidup; Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,Urusan Keluaraga berencana dan keluarga sejahtera, Urusan Kebudayaan; Urusan Kepemudaan & Olah Raga

		usaha ekonomi produktif. e. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan. f. Meningkatkan wawasan para pemuka agama untuk memantapkan toleransi antar ummat beragama. g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.	dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. **Lingkungan Hidup** 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Program Pengendalian Polusi. 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 5. Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau. **Urusan Pembinaan Kegiatan Keagamaan** 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Agama. 2. Program Peningkatan Kualitas Guru, Pengelolaan dan Layanan Sekolah Agama. 3. Program Peningkatan Kerukunan Ummat Beragama. **Urusan Kebudayaan** 1. Program Pengelolaan Kekayaan. 2. Program Pengembangan Nilai Budaya. 3. Program Pengembangan Pariwisata. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** 1. Program Pengembangan Penguasaan Teknologi dan Kreativitas Pemuda. 2. Program Peningkatan Uoaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 4. Program Peningkatan Peranserta Kemitraan Gender dalam	

			Pembangunan. 5. Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.	
Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah	Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	a. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan. b. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. c. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah. d. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. 2. Meningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur. 3. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan daerah. 5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. 6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, urusan perpustakaan, urusan statistik,
Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik; Menegakkan supremasi hukum dan HAM	Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	a. Mengembangkan dan menerapkan azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan menghormati HAM. c. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. d. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.	1. Membangun prinsip, standar dan pola pelayanan publik. 2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta menghormati HAM. 3. Membangun budaya politik yang demokratis. 4. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. 5. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.	Urusan Kependudukan & Catatan Sipil; Urusan Sosial; Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

6.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana diuraikan diatas akan sangat tergantung kepada ketersediaan dan kemampuan mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang memberi gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Proses awal pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sintang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD. Kemudian, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka tahapan berikutnya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dan Penetapan APBD

  Rencana anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan.
- Pelaksanaan APBD

  Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya.

  Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sebagai perwujudan akuntabilitas maka Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

6.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk melanjutkan proses pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang semakin berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Oleh karenanya, arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan fiskal di Kabupaten Sintang.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
2. Intensifikasi pendapatan asli daerah:
   - Melakukan pemutakhiran data objek pungutan (pajak dan retribusi) daerah.
   - Memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi dan manajemen pendapatan (retribusi dan pajak) daerah.
   - Mengembangkan sistem insentif pengelolaan pendapatan daerah.

3. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru (retribusi dan pajak) tanpa menciptakan ekonomi biaya tinggi.
4. Optimalisasi asset daerah:
   - Memperbaiki sistem informasi dan pengelolaan asset daerah
   - Mendorong pendirian Badan Usaha Daerah.
   - Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain/swasta dalam pengelolaan asset daerah.
5. Mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan, melalui:
   - Updating data dan informasi.
   - Mengoptimalkan penyerapan dan pengelolaan dana.

6.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik.
3. Mendorong pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel melalui publikasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap SKPD.
4. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
5. Mendukung pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan daerah.
6. Mendukung peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan antar kecamatan.

6.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan untuk memperkuat struktur anggaran daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:
   - Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
   - Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
   - Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (*cost recovery*).
2. Mendorong investasi swasta:
   - Menyederhanakan prosedur perijinan.
   - Melakukan sinkronisasi peraturan/kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan antarsektor.
   - Meningkatkan kepastian hukum terhadap pelaku usaha.
   - Mengembangkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
   - Meniadakan tumpang tindih pemungutan.
   - Meningkatkan infrastruktur pendukung.
   - Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang jelas dan seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Sintang

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	1. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan komoditas unggulan karet rakyat.				1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan petani. 3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan. 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan. 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 7. Program Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 9. Program pengembangan budidaya perikanan. 10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan.	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

						11. Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya. 12. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan. 13. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.		
2.	Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan pasar	1. Meningkatkan pengelolaan kehutanan dengan memantapkan dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan menjaga kelestariaannya.				1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Program Pengendalian kebakaran hutan. 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam. 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia kehutanan.	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Lingkungan Hidup

						7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.		
3.	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani	1. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan dan meningkatkan akses terhadap pasar, melalui penyediaan informasi pasar dan peningkatan layanan promosi pasar.				1. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah. 2. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 3. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.	Pertanahan	Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan	1. Pengembangan penanaman modal daerah dengan memanfaatkan potensi lokal/ unggulan daerah. 2. Pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri) serta hasil pertambangan.				1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana investasi. 4. Program Pengendalian dan evaluasi investasi. 1. Program Pengembangan industri pengolahan.	Penanaman Modal Industri	Sekretariat Daerah Dinas Perindagkop & UKM

						2. Program Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknotogi Industri. 4. Program Penataan Struktur Industri. 5. Program Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.		
5.	Meningkatnya peluang mengembangkan usaha produktif	1. Pengembangan jaringan distribusi dan perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing daerah. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.				1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan. 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM . 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.	Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindagkop & UKM Perindagkop & UKM

						3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 4. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Baru Lokal Peningkatan daya saing perdagangan daerah.		
6.	Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang	1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan dengan pola percepatan khusus daerah tertinggal.				1. Program Perencanaan Tata Ruang. 2. Program Pemanfaatan Tata Ruang. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 4. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 5. Program Pembangunan turap/talud/brojong. **6.** Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong. **7.** Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. **8.** Program penyediaan dan pengolahan air baku. **9.** Program pengemb, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

						10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 11. Program pengendalian banjir. 12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 13. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.		
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Membangun infrastruktur interkoneksi antar kecamatan dan dengan daerah lain (jalan, telepon, dan internet), serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk merangsang pusat pertumbuhan ekonomi baru.				1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Komunlkasi dan Informasi. 3. Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. 4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 5. Program Kerjasama informsi dan media massa. 6. Program Optimalisasi Peningkatan Teknologi Informasi.	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah

						7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 8. Program Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi. 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 10. Program Pengembangan Data dan Informasi. 11. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Teknologi Informasi.		
8.	Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.	1. Menerbitkan kebijakan (regulasi dan deregulasi) dan promosi investasi khusus untuk daerah tertinggal				1. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air. 3. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 4. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 5. Program Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 6. Program Inventarisasi dan Kajian Potensi Sumber energi.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

						7. Program Pembangunan infrastruktur sumber energi dan ketenagalistrikan. 8. Program Pemetaan potensi sumber daya mineral. 9. Program Pembinaan dan Pengawasan MIGAS 10. Program Pengembangan Perumahan. 11. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 12. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan. 13. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. 14. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.		
9.	Meningkatnya pembangunan transportasi darat, transportasi sungai, dan transportasi udara	1. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi darat dan sungai				1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan. 4. Program Pembangunan Sarana dan Program Pembangunan Sarana dan.	Perhubungan	Dinas Perhubungan

		2. Mengembangkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor				5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. 6. Program peningkatan kelaikan Program peningkatan kelaikan. 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan. 4. Program Tanggap darurat Jalan dan Jembatan. 5. Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan. 6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
10.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan kesejahteraan guru				1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Menengah. 5. Program Pendidikan Luar Biasa. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.	Pendidikan	Dinas Pendidikan

						7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.		
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum), fasilitas kesehatan, dan pembiayaan kesehatan				1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 8. Program Pebaikan Gizi Masyarakat. 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 11. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Ade M. Djoen Badan Keluarga Berencana dan PP Sekretariat Daerah

						12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. 14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 15. Program Peningkatan Kualitas Layanan KB. 16. Program Penambah jumlah tenaga PLKB. 17. Program Keluarga Berencana. 18. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (Program PKBR). 19. Program Pelayanan Kontrasepsi. 20. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBIKR yang mandiri. 21. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 22. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BKB. 23. Program Penataan Data dan Informasi Keluarga Berencana dan PP.		

12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.				1. Program Pengembagan Lingkungan Sehat. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 5. Program Pengeloloan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 8. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 9. Program Pengendalian Polusi.	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
		2. Revitalisasi pendidikan kepelatihan, keahlian, dan keterampilan untuk mempersiapkan generasi muda dapat berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif				1. Program Penciptaan Lapangan Kerja . 2. Program Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Penduduk Miskin. 3. Program Peningkatan Tenaga Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13.	Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda seni budaya dan kegiatan keagamaan	1. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.				1. Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Agama. 2. Program Peningkatan Kualitas Guru, Pengelolaan dan Layanan Sekolah Agama. 3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah Badan Kesbanglinmas dan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.				1. Program Pengembangan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 4. Program Program Pengembangan Nilai Budaya. 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 6. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 8. Program Pengembangan Destinasi Wisata.	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

						9. Program Pembangunan Kemitraan.		
14.	Optimalnya pelayanan publik	1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan				1. Program Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintahan Umum	Seluruh SKPD
15.	Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah	1. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah				1. Program Meningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur. 2. Program Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pemerintahan Umum	Seluruh SKPD
16.	Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah 2. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				1. Program Optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan daerah. 1. Program Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah 1. Program Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.	Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum	DPKKA DPKKA DPKKA

17.	Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik	1. Mengembangkan dan menerapkan azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik				1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. 2. Program Membangun prinsip, standar dan pola pelayanan publik.	Pemerintahan Umum	Seluruh SKPD
18.	Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan				1. Program Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta menghormati HAM. 2. Program Membangun budaya politik yang demokratis . 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Program Bantuan Hukum.	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah Badan Kesbanglinmas dan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat				1. Program Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat.	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sintang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcame)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1			**Urusan Wajib**														
1	01		**Pendidikan**														
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	2.630,45	100%	2.718,95	100%	2.718,95	100%	2.718,95	100%	2.718,95	100%	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	94%	100%	120,88	100%	114,50	100%	158,50	100%	174,55	100%	156,21	100%	Dinas Pendidikan
1	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	100%	102,94	100%	282,94	100%	102,94	100%	102,94	100%	312,94	100%	Dinas Pendidikan
1	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		100%	75,91	100%	62,36	100%	68,60	100%	75,45	100%	82,99	100%	Dinas Pendidikan
1	01	05	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	95%	100%	4.940,61	100%	3.941,77	100%	2.943,95	100%	1.948,35	100%	1.055,18	100%	Dinas Pendidikan
1	01	06	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	41%	100%	1.395.772,67	100%	1.065.106,18	100%	719.248,96	100%	406.335,67	100%	221.664,22	100%	Dinas Pendidikan
1	01	07	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya Program pendidikan Menengah	98%	100%	116.258,94	100%	88.658,43	100%	62.126,28	100%	35.508,91	100%	19.687,80	100%	Dinas Pendidikan
1	01	08	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	97%	100%	951,28	100%	1.372,98	100%	1.540,18	100%	1.707,75	100%	2.715,38	100%	Dinas Pendidikan
1	01	09	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100%	1.149,54	100%	1.162,34	100%	930,56	100%	967,52	100%	980,77	100%	Dinas Pendidikan
1	01	10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas manajemen pelayanan Pendidikan	90%	100%	134,05	100%	339,51	100%	165,15	100%	173,28	100%	390,11	100%	Dinas Pendidikan
1	01	11	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Program Pengembangan Nilai Budaya	92%	75%	438,32	75%	537,00	75%	537,00	75%	537,00	75%	537,00	100%	Dinas Pendidikan
1	01	12	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaaan	98%	70%	191,88	75%	195,60	75%	215,16	80%	236,68	80%	260,34	100%	Dinas Pendidikan
1	01	13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaaan	93%	65%	220,50	70%	265,50	75%	292,05	80%	321,31	85%	353,33	100%	Dinas Pendidikan
1	01	14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan Prasarana Olah Raga	100%		-	40%	20,00		-	45%	25,00		-	100%	Dinas Pendidikan
1	02		**Kesehatan**														
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnyan pelayanan administrasi perkantoran guna terciptanya tertib administrasi	95%	100%	3.582,43	100%	3.844,10	100%	4.104,20	100%	4.316,40	100%	4.530,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat	76%	80,6%	625,00	85,4%	1.145,00	90,3%	1.490,00	95,1%	1.635,00	100%	1.780,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Meningkatnya upaya kesehatan dasar,	54,30%	63%	7.655,20	72,6%	8.020,20	81,7%	9.184,10	90,9%	9.518,00	100%	10.938,10	100%	Dinas Kesehatan

				rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga, dan matra serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan														
1	02	04	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan dengan persyaratan makanan, mutu dan manfaat	54%	63%	14,72	72,4%	15,90	81,6%	17,49	90,8%	19,24	100%	21,16	100%	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak	41%	53%	1.916,00	64,8%	2.440,00	76,6%	3.176,00	88,3%	4.016,00	100%	4.866,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	06	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit	54%	63%	2.496,04	72,6%	2.574,43	81,7%	2.983,00	90,9%	3.327,04	100%	3.597,53	100%	Dinas Kesehatan
1	02	07	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	88,60%	90,9%	13.042,00	93,2%	13.339,00	95,4%	13.646,00	97,7%	14.123,00	100%	14.550,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	08	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya dukungan manajemen dan terlaksananya tugas lainnya pada Dinas Kesehatan	45%	56,3%	345,00	67,2%	401,00	78,2%	446,00	89,1%	488,00	100%	1.084,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat	94,27%	95,4%	2.520,00	96,6%	2.376,00		3.676,00		5.696,00		6.126,00	100%	Dinas Kesehatan
1	02	10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan	85%	88,2%	74,34	91,1%	80,40	94,1%	144,30	97%	159,10	100%	167,90	100%	Dinas Kesehatan
1	02	11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	21,18%	36,9%	245,00	52,7%	315,00	68,5%	1.113,00	84,2%	1.559,20	100%	1.889,40	100%	Dinas Kesehatan
1	02	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang pelayanan publik		100%	2.515,00	100%	3.157,97	100%	3.473,77	100%	3.821,15	100%	4.203,26	17.171,15	RSUD Ade M. Djoen
1	02	13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	347,24	100%	1.687,88	100%	1.939,83	100%	2.133,81	100%	2.347,19	8.455,94	RSUD Ade M. Djoen
1	02	14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan SD.Aparatur		100%	521,28	100%	400,77	100%	440,84	100%	484,93	100%	533,42	2.381,24	RSUD Ade M. Djoen
1	02	15	Program Pengendalian Mutu Pelayanan	Meningkatnya mutu pelayanan RS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	RSUD Ade M. Djoen
1	02	16	Program Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya cakupan layanan RS		100%	22.382,06	100%	24.722,49	100%	27.196,74	100%	18.550,98	100%	32.909,16	125.761,42	RSUD Ade M. Djoen
1	02	17	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin secara optimal		100%	165,28	100%	181,80	100%	199,98	100%	219,98	100%	241,98	1.009,02	RSUD Ade M. Djoen
1	02	18	Program Standarisasi Pelayanan	Terlaksananya pelayanan Standarisasi pelayanan kesehatan		100%	302,42	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	302,42	RSUD Ade M. Djoen
1	02	19	Program Rekruitmen SDM	Meningkatnya jumlah ketersediaan tenaga medis dan paramedis			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	RSUD Ade M. Djoen
1	02	20	Program Pengembangan Budaya Kerja				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	RSUD Ade M. Djoen
1	02	21	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS/RS Jiwa	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		100%	2.009,90	100%	18.128,90	100%	20.443,24	100%	23.064,22	100%	25.370,64	89.016,90	RSUD Ade M. Djoen
1	02	22	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang baik		100%	110,22	100%	175,92	100%	193,52	100%	212,87	100%	234,16	926,68	RSUD Ade M. Djoen
1	02	23	Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi	Tersedianya kelembagaan sistem informasi yang memadai		100%	0,00	100%	250,00	100%	275,00	100%	302,50	100%	332,75	1.160,25	RSUD Ade M. Djoen
1	02	24	Program Peningkatan Kinerja Keuangan			100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	-	RSUD Ade M. Djoen

1	**03**		**Pekerjaan Umum**														
1	03	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		3 unit	12.384,41	3 unit	17.650,00	4 unit	5.000,00	3 unit	5.500,00	3 unit	5.500,00	46.034,41	Dinas PU
1	03	02	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya Jalan, meningkatnya kelas jalan, tersedianya dokumen perencanaan jembatan dan terbangunnya jembatan		13,85 Km 14,57 Km 2 Unit 2 Unit	7.340,20	80,25 Km 139 Km 3 Unit 3 Unit	46.232,00	73,25 Km 135,75 Km 2 Unit 2 Unit	44.265,00	67,15 Km 110,45 Km 2 Unit 2 Unit	35.927,50	65,50 Km 100,15 Km 1 Unit 3 Unit	33.615,00	167.379,70	Dinas PU
1	03	03	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangun dan terpeliharanya Drainase		3000 m	2.193,85	2600 m	1.805,00	4000 m	2.230,00	4000 m	2.230,00	4000 m	1.396,00	9.854,85	Dinas PU
1	03	04	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Terbangunnya Turap/talud/bronjong		50 M	664,85	212M	236,00	373 M	345,00	423 M	1.009,85	423 M	1.009,85	3.265,54	Dinas PU
1	03	05	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan		24 Km 5 Unit	7.202,00 335,00	325 Km 8 Unit	97.500,00 536,00	220 Km 7 Unit	66.000,00 469,00	216 Km 5 Unit	62.800,00 335,00	215 Km 5 Unit	64.500,00 335,00	298.002,00 2.010,00	Dinas PU
1	03	06	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Tersedianya Turap/talud bronjong dalam kondisi baik		-	0,00	750 M	637,50	1050 m	887,50	1050 M	887,50	1050 M	887,50	3.300,00	Dinas PU
1	03	07	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan		242,7 25 unit	14.938,00 1.145,00		19.676,00 1.301,00	75 Km 3 Unit	18.750,00 500,00	75 Km 3 Unit	18.750,00 500,00	75 Km 3 Unit	18.750,00 500,00	90.864,00 3.946,00	Dinas PU
1	03	08	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya Dokumen data base jalan dan jembatan		100%	283,16	100%	5.430,00	100%	5.520,00	100%	2.492,50	100%	2.465,00	16.190,66	Dinas PU
1	03	09	Program Data Base Bidang Keciptakaryaan	Tersedianya Dokumen data base bidang keciptakaryaan			0,00	100%	100,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	150,00	550,00	Dinas PU
1	03	10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan workshop penunjang kegiatan		100%	183,16	100%	5.330,00	100%	5.320,00	100%	2.292,50	100%	2.265,00	15.390,66	Dinas PU
1	03	11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairannya			3.611,63		3.141,08		3.673,41	100%	2.571,99	100%	4.804,86	17.802,97	Dinas PU
1	03	12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Terlaksananya pengelolaan air minum dan air limbah		100%	-	100%	350,00	100%	3.200,00	100%	5.465,00	100%	5.150,00	14.165,00	Dinas PU
1	03	13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100%	1.016,70	4 dokume	2.900,00	6 Dokumen	2.600,00	6 Dokumen	2.600,00	4 dokumen	1.100,00	10.216,70	Dinas PU
1	03	14	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terbangunnya jalan lingkungan pedesaan dan terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan		100%	11.067,95	100%	93.232,10	100%	113.837,00	100%	76.450,00	100%	43.432,00	338.019,05	Dinas PU
1	03	15	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Tersedianya Fasilitas Umum		3 unit	550,00	7 unit	7.030,00	3 unit	6.500,00	2 unit	3.500,00	1 unit	500,00	18.080,00	Dinas PU
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Tertatanya Saluran Drainase Dalam Pemukiman kota		100%	2.748,89	100%	2.100,00	100%	2.150,00	100%	2.200,00	100%	2.400,00	11.598,89	DKPPK
1	03	17	Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Terbangunya Turap pada Kawasan Perkotaan		100%	3.667,21	100%	1.200,00	100%	1.600,00	100%	1.900,00	100%	2.500,00	10.867,21	DKPPK
1	03	18	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terbangunya Turap pada Kawasan Perkotaan			-	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	800,00	DKPPK
1	03	19	Program Pembangunan Tugu/Gapura	Terbangunnya Tugu/Gapura sebagai aksesoris Kota			460,00		560,00		560		560,00		750,00	2.890,00	DKPPK
1	03	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	60,41		66,45		73,10		80,41		88,45	368,81	BPBD
1	03	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur daerah		100%	170,00		187,00		205,70		226,27		248,90	1.037,87	BPBD
1	03	22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	5,70		6,27		6,90		7,59		8,35	34,80	BPBD
1	03	23	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bencana alam		100%	197,67		217,44		239,18		263,10		289,41	1.206,79	BPBD

1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		100%	277,26		304,99		335,48		369,03		405,94	1.692,70	BPBD
1	**04**		**Perumahan**														
1	04	01	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kemampuan Satgas Dalam Penanganan Kebakaran		100%	330,00	100%	625,00	100%	680,00	100%	875,00	100%	925,00	3.435,00	DKPPK
1	04	02	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tertatanya Pemakaman Umum Dalam Lingkungan Perkotaan			250,00	100%	760,00	100%	561,00	100%	765,00	100%	770,00	3.106,00	DKPPK
			Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya pengembangan perumahan						250 unit	1.250,00	400 unit	1.250,00	400 unit	1.250,00	3.750,00	Dinas PU
1	04	03	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya lingkungan sehat perumahan		100%	910,91	100%	12.052,00	100%	8.750,00	100%	8.350,00	100%	7.450,00	37.512,91	Dinas PU
1	04	04	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya pembangunan di wilayah perbatasan		68 KM	8.124,00	32 KM	5.832,00	125 KM	17.555,00	112 KM	15.785,00	87 KM	12.435,00	59.731,00	Dinas PU
1	**05**		**Penataan Ruang**														
1	05	01	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang		100%	1.060,00	100%	2.975,00	100%	800,00	100%	925,00	100%	1.150,00	6.910,00	Dinas PU
1	05	02	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Tersedianya Peraturan Tentang Pemanfaatan Tata Ruang		100%	120,00	100%	2.860,00	100%	2.320,00	100%	2.120,00	100%	1.700,00	9.120,00	Dinas PU
1	05	03	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan pemanfaatan Tata Ruang		100%	120,00	100%	1.359,00	100%	1.580,00	100%	1.520,00	100%	1.750,00	6.329,00	Dinas PU
1	05	04	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			72,00		600,00		600,00		600,00		600,00	2.472,00	DKPPK
1	05	05	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruangan yang sesuai dengan Peruntukannya			72,00		150,00		200,00		200,00		200,00	822,00	DKPPK
1	**06**		**Perencanaan Pembangunan**														
1	06	01	Program Pengembangan data/informasi	Tersedianya data/informasi daerah			55,84		150,00		200,00		235,00		271,00		Sekretariat Daerah
1	06	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	80%	85%	617,60	90%	983,76	90%	737,77	90%	788,54	95%	794,72	3.922,39	Bappeda
1	06	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	80%	85%	212,38	90%	309,97	90%	385,53	90%	443,06	90%	519,60	1.870,54	Bappeda
1	06	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	85%	85%	40,90	90%	42,15	90%	44,25	90%	44,25	90%	47,50	219,05	Bappeda
1	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur		1 Dok	385,51	1 Dok	458,85	1 Dok	498,98	1 Dok	529,51	1 Dok	553,85	5 Dok	Bappeda
1	06	06	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen kerjasama pembangunan	5 Dok	5 Dok	590,23	4 Dok	470,80	4 Dok	520,80	4 Dok	670,80	4 Dok	686,08	2.938,71	Bappeda
1	06	07	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tersedianya kegiatan pengembangan wilayah perbatasan	1 Keg	1 Keg	200,00	1 Keg	230,00	1 Keg	260,00	1 Keg	300,00	1 Keg	360,00	5 Keg	Bappeda
1	06	08	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pembangunan	1 Keg		62,46		625,00		935,00		1.085,00		1.226,00	3.933,46	Sekretariat Daerah
1	06	09	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Keg		39,37		150,00		300,00		325,00		375,00	1.189,37	Sekretariat Daerah
1	06	10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	1 Keg	1 Keg	250,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 Keg	Bappeda
1	06	11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Sintang	1 Dok	1 Dok	911,10	1 Dok	1.224,50	1 Dok	956,70	1 Dok	973,45	1 Dok	1.000,20	5.065,95	Bappeda
1	06	13	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	2 Dok	2 Dok	521,46	4 Dok	953,82	1 Dok	545,42	2 Dok	929,26	2 Dok	807,19	11 Dok	Bappeda

1	06	14	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya	1 Dok	1 Dok	1.160,00	6 Dok	3.610,00	3 Dok	3.890,00	2 Kec	3.300,00	2 Kec	2.050,00	14.010,00	Bappeda
1	06	15	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	2 Dok	2 Dok	0,00	1 Dok	250,00	1 Dok	1.350,00	1 Dok	285,00	1 Dok	0,00	1.885,00	Bappeda
1	06	16	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1 Keg		0,00		1.350,00		0,00		250,00		250,00	1.850,00	Bappeda
1	06	17	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen pengembangan kota-kota menengah dan besar			0,00		610,00		850,00		775,00		250,00	2.485,00	Bappeda
1	06	18	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan daerah	2 Dok		114,00		1.125,00		400,00		0,00		0,00	1.639,00	Bappeda
1	06	19	Program Pengkajian Nilai Budaya	Tersedianya dok pengkajian nilai budaya		1 Dok	114,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 Dok	Bappeda
1	06	20	Program Perencanaan Pengembangan Kota	Dokumen Perencanaan Penataan RT-RW			0,00	100%	500,00	100%	100,00	100%	50,00	100%	100,00		DKPPK
1	**07**		**Perhubungan**														
1	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya / tersedianya fasilitas kantor sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	60%	100%	392,30	100%	461,52	100%	542,97	100%	624,42	100%	718,08	2.739,28	Dinas Perhubungan
1	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	90%	80%	314,29	80%	369,75	80%	435,00	80%	500,25	80%	575,29	2.194,57	Dinas Perhubungan
1	07	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	80%	39,74	80%	46,75	80%	55,00	80%	63,25	80%	72,74	277,48	Dinas Perhubungan
1	07	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengikutsertakan personil Dinas Perhubungan dalam pelatihan atau diklat teknis maupun fungsional sehingga terpenuhinya tenaga teknis maupun fungsional yang handal pada bidang tugas nya masing-masing.	70%	90%	440,60	90%	130,00	90%	600,00	90%	175,00	90%	330,00	1.675,60	Dinas Perhubungan
1	07	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah,tersusunnya prognosis realisasi anggaran serta tersusunnya laporan keuangan pada akhira tahun	100%	100%	10,00	100%	10,00	100%	10,00	100%	10,00	100%	10,00	50,00	Dinas Perhubungan
1	07	06	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan, standar dan prosedur serta kebijakan dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	75%	185,86	75%	197,00	75%	203,00	75%	214,00	75%	215,00	1.014,86	Dinas Perhubungan
1	07	07	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat penguji kendaraan bermotor,fasilitas perlengkapan jalan,balai penguji kendaraan bermotor serta terminal dan pelabuhan	100%	75%	2.000,00	75%	2.050,00	75%	20.500,00	75%	2.350,00	75%	2.050,00	28.950,00	Dinas Perhubungan
1	07	08	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya pengawasan, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan dermaga,guna penyusunan perencanaan sistem tatralok secara terpadu (lanjutan)	100%	60%	267,47	60%	638,90	60%	310,60	60%	493,50	60%	367,00	2.077,47	Dinas Perhubungan
1	07	09	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasaranan perhubungan untuk pelayanan adminstrasi perkantoran dan masyarakat seperti,pembangun terminal,pelabuhan dan dermaga serta pembangunan badar udara dari	85%	85%	25.425,00	85%	11.300,00	85%	800,00	85%	800,00	85%	800,00	39.125,00	Dinas Perhubungan

				sisi darat perhubungan														
1	07	10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terciptanya arus lalu lintas yang tertib, aman dan lancar serta tercapainya keamanan dan kenyaman bagi masyarakat pengguna jalan	50%	50%	2.590,95	50%	1.002,75	50%	1.337,95	50%	1.004,75	50%	1.339,95	7.276,35	Dinas Perhubungan
1	07	11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya gedung serta alat - alat penguji kendaraan bermotor yang baik di Kabupaten Sintang	60%	60%	2.500,00	60%	1.000,00	60%	850,00	60%	1.000,00	60%	1.000,00	6.350,00	Dinas Perhubungan
1	**08**		**Lingkungan Hidup**															
1	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Pelayanan Admnnistrasi Perkantoran	100%	100%	965,00	100%	1.062,00	100%	1.167,00	100%	1.285,00	100%	1.413,00	100%	Badan Ling. Hidup
1	08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	100%	1.090,00	100%	1.200,00	100%	1.320,00	100%	1.452,00	100%	1.595,00	100%	Badan Ling. Hidup
1	08	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM BLH Sintang	50%	100%	150,00	100%	165,00	100%	182,00	100%	200,00	100%	220,00	100%	Badan Ling. Hidup
1	08	04	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	40%	50%	2.725,00	60%	3.105,00	70%	3.418,00	80%	3.543,00	90%	3.860,00	90%	Badan Ling. Hidup
1	08	05	Program Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Prosentase Peningkatan penilaian AMDAL, UKL/UPL dan SPPL	40%	50%	392,00	60%	820,00	70%	765,00	80%	800,00	90%	1.340,00	90%	Badan Ling. Hidup
1	08	06	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sintang	30%	40%	200,00	50%	150,00	60%	210,00	70%	210,00	80%	265,00	80%	Badan Ling. Hidup
1	08	07	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Perlindungan dan Terlaksanaanya Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Sintang	20%	30%	571,00	40%	2.020,00	50%	2.640,00	60%	2.550,00	70%	2.615,00	70%	Badan Ling. Hidup
1	08	08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	40%	50%	525,00	60%	1.830,00	70%	3.385,00	80%	2.360,00	90%	1.690,00	90%	Badan Ling. Hidup
1	08	09	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Prosentase efektifitas pengendalian Kebakaran Hutan	50%	55%	325,00	60%	400,00	65%	525,00	70%	525,00	75%	650,00	75%	Badan Ling. Hidup
1	08	10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Koordinasi Serta Pengawasan Tata Ruang	Prosentase pengawasan tata ruang dari aspek lingkungan hidup kabupaten sintang	10%	30%	375,00	40%	375,00	50%	510,00	60%	560,00	70%	590,00	75%	Badan Ling. Hidup
1	08	11	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tercapainya Pemeliharaan Taman dan Terciptanya Peningkatan RTH			500,00		1.172,77		1.285,00		1.521,77		1.692,77	6.172,31	DKPPK
1	08	12	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kemitraan	Prosentase peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	40%	50%	170,00	60%	1.830,00	70%	2.360,00	80%	2.410,00	90%	2.940,00	90%	Badan Ling. Hidup
1	08	13	Program Pengembangan Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan pencemaran/atau perusakan Lingkungan Hidup	60%	70%	800,00	75%	930,00	80%	1.135,00	85%	1.250,00	90%	1.490,00	90%	Badan Ling. Hidup
1	08	14	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase Peningkatan pengendalian Polusi udara kabupaten Sintang	10%	20%	400,00	30%	430,00	40%	510,00	50%	550,00	60%	640,00	60%	Badan Ling. Hidup
1	08		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA		100%	15,00	100%	75,00	100%	100,00	100%	110,00	100%	121,00		Sekretariat Daerah

1	08	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85%	85%	656,24	100%	1.009,24	100%	1.243,52	100%	1.253,52	100%	1.369,52	5.532,04	DKPPK
1	08	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	85%	85%	131,88	100%	137,84	100%	165,00	100%	165,00	100%	170,00	769,72	DKPPK
1	08	17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Laporan Kinerja dan Rencana kerja DKPPK		85%	-		-		-		-		-	-	DKPPK

1	08	18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Laporan Keuangan pada Akhir Tahun	95%	100%	11,87	100%	20,00	100%	25,00	1,00	25,00	1,00	40,00	121,87	DKPPK
1	08	19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	1.350,00	100%	1.485,00	100%	1.633,00	100%	1.796,00	100%	1.976,00	8.240,00	DKPPK
1	08	20	Program Pengembangan Kinerja Persampahan	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	100%	100%	2.552,00	100%	3.507,00	100%	3.806,00	100%	4.436,00	100%	4.995,00	19.296,00	DKPPK
1	**09**		**Pertanahan**														
1	09	01	Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Tersedianya sistem pendaftaran pertanahan			-		250,00		250		250,00		250,00		Sekretariat Daerah
1	09	02	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			3.225,00		4.000,00		4.525,00		5.175,00		5.700,00		Sekretariat Daerah
1	09	03	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya penyelesaian konfli-konflik pertanahan			150,00		300,00		300,00		300,00		300,00		Sekretariat Daerah
1	09	04	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi pertanahan			100,00		150,00		300,00		300,00		300,00		Sekretariat Daerah
1	**10**		**Kependudukan dan Catatan Sipil**														
1	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			321,74		321,74		321,74		321,74		321,74		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			40,00		5.000,00		50,00		50,00		40,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur			99,00		177,00		198,00		199,00		224,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	05	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan			1.921,00		1.757,00		2.061,00		2.351,00		2.616,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	06	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya peraturan perundang-undangan			0,00		154,00		138,00		151,00		148,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	10	07	Program Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya sistem pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			475,00		556,00		579,00		580,00		580,00		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1	**11**		**Pemberdayaan Perempuan**														
1	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			209,47		248,20		274,74		311,45		357,60		BKB & PP
1	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			149,40		312,02		327,41		349,04		368,24		BKB & PP
1	11	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			129,94		155,30		182,35		225,78		250,90		BKB & PP
1	11	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			201,22		130,31		524,84		131,36		445,89		BKB & PP
1	11	05	Program Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan			63,01		84,26		89,68		95,91		104,55		BKB & PP
1	11	06	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan			667,27		734,00		807,60		888,13		976,55		BKB & PP
1	11	07	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan			650,20	100%	655,03	100%	681,03	100%	724,15	100%	797,40		BKB & PP
1	**12**		**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**														
1	12	01	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya peserta program Keluarga Berencana			79,17		108,04		117,387		126,84		138,83		BKB & PP
1	12	02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi			39,23		53,18		58,26		64,09		70,49		BKB & PP

				remaja														
1	12	03	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pelayanan kontrasepsi			461,96		614,11		700,72		770,05		840,57		BKB & PP
1	12	04	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri			101,98	100%	118,62	100%	134,14	100%	150,18	100%	169,33		BKB & PP
1	12	05	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			4,80	100%	6,20	100%	7,00	100%	7,80	100%	8,80		BKB & PP
1	12	06	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatnya informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			-		36,50		40,15		44,17		48,58		BKB & PP
1	12	07	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga			15,00	100%	16,50	100%	18,15	100%	19,97	100%	21,96		BKB & PP
1	12	08	Program Rapat Evaluasi UPPKS	Terlaksananya evaluasi UPPKS			23,39		25,73		28,31		31,14		34,25		BKB & PP
1	**13**		**Sosial**														
1	13	01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		80%	169,64	83%	540,00	89%	590,00	100%	730,00	100%	825,00	2.854,64	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	02	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya Pembinaan Para Paca dan Trauma		5 Kec	70,00	5 Kec	1.149,00	5 Kec	1.204,00	5 Kec	1.264,00	5 Kec	1.334,00	5.021,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	03	Program Penanggulangan Korban Bencana	Pencegahan Dini dan upaya-upaya dalam Penanggulangan Korban Bencana		14 Kec	700,00	14 Kec	2.100,00	14 Kec	1.205,00	14 Kec	1.610,00	14 Kec	1.215,00	6.830,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	04	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terpenuhinya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan MKKS		80%	69,85	83%	525,00	85%	535,00	87%	545,00	90%	545,00	2.219,85	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	05	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan MKKS	Terciptanya Pemenuhan rumah layak huni dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat		50%	265,85	65%	420,00	70%	425,00	75%	460,00	80%	500,00	2.070,85	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	06	Program Keluarga Harapan	Terwujudnya Keluarga Harapan		0%	-	80%	332,00	80%	332,00	83%	340,00	85%	340,00	1.344,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	07	Program Bimbingan dan Latihan Manajemen	Tersusunnya Kegiatan PSM yang dapat meningkatkan kemampuan PSM			-	80%	175,00	80%	175,00	82%	180,00	84%	180,00	710,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	08	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan Kesos		70%	116,00	75%	370,00	75%	400,00	77%	420,00	77%	420,00	1.726,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	13	09	Program Bimbingan, Motivasi dan Konsolidasi	Terlaksananya tumbuhnya kesadaran semangat berorganisasi dikalangan generasi muda		75%	50,00	78%	53,00	80%	55,00	83%	59,00	85%	60,00	277,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	**14**		**Tenaga Kerja**														
1	14	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	853,00	100%	874,00	100%	954,00	100%	995,00	100%	1.119,00	4.795,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	101,24	100%	105,50	100%	110,00	100%	113,00	100%	125,00	554,74	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	48,00	100%	108,00	100%	120,00	100%	157,00	100%	162,00	595,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	665,37	100%	683,32	100%	697,61	100%	710,79	100%	733,97	3.491,06	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	05	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan		85%	815,00	87%	822,93	92%	827,56	94%	853,71	96%	836,54	4.155,74	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	06	Program Bursa Kerja On Line	Terlaksananya Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja on line		65%	110,00	66%	112,40	68%	114,20	70%	115,50	73%	119,99	572,09	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	07	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan	Tsedianya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Kerja		75%	754,10	75%	762,94	77%	766,36	80%	781,64	80%	805,38	3.870,42	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	14	08	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Terlaksananya Sosialisasi berbagai		60%	965,54	65%	1.010,17	70%	1.034,94	75%	1.067,44	80%	1.105,51	5.183,60	Dinas Sosial, Tenaga

				Peraturan tentang ketenagakerjaan dan tercipta hubungan industrial yang harmonis, kondusip dan Berkeadilan														
1	14	09	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja		144 Org	534,00	384 Org	1.408,00	384 Org	1.609,74	384 Org	1.657,99	384 Org	2.070,57	7.280,30	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
1	**15**		**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**															
1	15	01	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya kemampuan usaha mikro berwirausaha dgn baik	100 orang	100 orang	330,00	100 orang	363,00	100 orang	399,30	100 orang	439,25	100 orang	483,01	500 orang	Dinas Perindagkop UKM
1	15	02	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Meningkatnya kualitas SDM UMKM serta tersedianya sarana pemasaran produk	1 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 orang	3 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 org	1.005,00	3 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 org	985,75	3 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 org	1.083,55	3 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 org	1.191,88	3 event, 10 Kop, 5 KKM, 80 UMKM, 40 org	1.370,66	15 event, 50 Kop, 25 KKM, 400 UMKM, 200 org	Dinas Perindagkop UKM
1	15	03	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengelola koperasi	30 orang, 35 Koperasi	80 org, 55 Set Buku 60 Kop	557,00	80 org, 55 Set Buku 60 Kop	619,00	80 org, 55 Set Buku 60 Kop	670,59	80 org, 55 Set Buku 60 Kop	744,74	80 org, 55 Set Buku 60 Kop	830,80	400 orang, 275 Set Buku, 300 Koperasi	Dinas Perindagkop UKM
1	15	04	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM Yang Kondusif	Meningkatnya kemampuan KUMKM mengakses biaya dr perbankan dan lembaga pembiayaan	0	50 orang	185,00	50 orang	203,75	50 orang	223,85	50 orang	246,23	50 orang	270,85	250 orang	Dinas Perindagkop UKM
1	**16**		**Penanaman Modal Daerah**															
1	16	01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		100%	263,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00		Sekretariat Daerah
1	16	02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan rehabilitasi investasi		100%	81,58	100%	290,00	100%	90,00	100%	90,00	100%	90,00		Sekratariat Daerah
1	16	03	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi investasi		100%	177,20	100%	305,00	100%	460,00	100%	325,00	100%	335,00		Sekretariat Daerah
1	16	04	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana & Prasarana	Meningkatnya penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana			-		50,00		350,00		150,00		150,00		Sekretariat Daerah
1	**17**		**Kebudayaan**															
1	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran sumber daya air, komunikasi dan listrik serta Terwujudnya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran		100%	83,00	100%	94,00	100%	100,00	100%	91,00	100%	101,00	469,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor		100%	30,00	100%	1.637,00	100%	2.528,00	100%	2.672,00	100%	3.497,00	10.364,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	20,00	100%	40,00	100%	50,00	100%	30,00	100%	40,00	180,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	04	ProgramPengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya forum dialog tentang budaya akan mempermudah komunikasi, informasi yang efektif dan Terlaksananya Sadar Wisata dan guide Pelatihan kepada kelompok		100%	100,00	100%	125,00	100%	130,00	100%	150,00	100%	175,00	680,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	05	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terkumpulnya kesenian dan budaya lokal daerah		100%	-	100%	27,00	100%	46,00	100%	92,00	100%	125,00	290,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	06	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Menjadikan museum menjadi suatu sarana pendidikan		100%	448,00	100%	1.180,00	100%	1.410,00	100%	3.120,00	100%	1.880,00	8.038,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	07	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Masy. yang paham akan kebudayaan serta Terpeliharanya BCB dan dapat menjadi objek wisata		100%	250,00	100%	1.130,00	100%	1.610,00	100%	1.685,00	100%	2.040,00	6.715,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	08	Program Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri		100%	110,00	100%	250,00	100%	345,00	100%	375,00	100%	450,00	1.530,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	09	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya sistem informasi melalui teknologi internet dan media elektronik			90,00		110,00		275		280,00		345,00	1.100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

				menjadi informasi yang valid & benar														
1	**18**		**Pemuda dan Olah Raga**															
1	18	01	Program Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olahraga	Meningkatnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			45,00		60,00		70,00		85,00		100,00		Sekretariat Daerah
1	18	02	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			105,00		125,00		144,00		165,00		180,00		Sekretariat Daerah
1	18	03	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		100%	834,00	100%	939,00	100%	1.027,00	100%	1.121,00	100%	1.212,00		Sekretariat Daerah
1	18	04	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100%	3.900,00	100%	4.500,00	100%	4.280,00	100%	5.925,00	100%	4.880,00		Sekretariat Daerah
1	18	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga			2.700,00		2.700,00		1.700,00		1.500,00		700,00		Sekretariat Daerah
1	18	06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga			50,00	100%	6.700,00	100%	5.200,00	100%	4.300,00	100%	0,00		Dinas PU
1	**19**		**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**															
1	19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	85%	350,00	85%	350,00	85%	350,00	85%	350,00	85%	350,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	95%		0,00	85%	75,00	85%	150,00		0,00		0,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	03	Program Peningkatan Displin Aparatur	Meningkatnya Displin Adminstrasi	95%	0%	0,00	100%	241,00	100%	241,00	1,00	241,00	1,00	241,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	04	Program peningkatan sumber daya Aparatur	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	100%	37,00	100%	100,00		0,00		0,00		0,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	03	Program Pelaksanaan Koordinasi Daerah	Meningkatnya Fungsi Kominda Kabupaten Sintang	95%	85%	60,00	85%	148,00	85%	144,23	85%	154,23	85%	164,23	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	04	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Terlaksananya dan Termonitrnya rantramtibmas di masayarakat	95%	85%	61,00	85%	48,00	85%	157,20	85%	167,20	85%	177,20	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	05	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Tercapainya dan terkendalinya pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Sintang	95%	85%	53,00	85%	89,00	85%	120,50	85%	130,50	85%	140,50	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	06	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat di daerah perbatasan	95%	85%	88,00	85%	158,00	85%	151,24	85%	153,00	85%	160,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	07	Program Pengembangan Wasbang Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat	95%	85%	60,00	85%	265,00	85%	96,54	85%	98,00	85%	311,00	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	08	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakt terhadap proses Politik Masyarakat	95%	85%	174,00	85%	508,00	85%	204,35	85%	211,18	85%	101,75	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	09	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	95%	85%	118,00	85%	89,00	85%	294,97	85%	2.031,97	85%	354,47	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	10	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pemahaman masyarakat tenang penanggulangan bencana alam	95%	100%	57,00	85%	43,00	85%	15,60	85%	495,60	85%	15,60	100%	Badan Kesbangpol dan Linmas
1	19	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	188,38	100%	219,22	100%	251,94	100%	277,13	100%	304,85		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	67,52	100%	981,77	100%	96,70	100%	89,87	100%	98,86		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	55,26	100%	60,78	100%	66,86	100%	73,54	100%	80,90		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	369,90	100%	480,54	100%	581,94	100%	583,45	100%	698,31		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	15	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100%	45,12	100%	49,63	100%	54,59	100%	60,05	100%	66,06		Satuan Polisi Pamong Praja

1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100%	321,86	100%	639,05	100%	702,95	100%	773,25	100%	850,57		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan di masyarakat		100%	19,20	100%	81,12	100%	89,23	100%	98,16	100%	107,97		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnay wawasan kebangsaan masyarakat		100%	44,46	100%	48,91	100%	53,80	100%	59,18	100%	65,09		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	19	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat		100%	38,42	100%	104,26	100%	114,69	100%	126,16	100%	138,77		Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur daerah		100%	26,75	100%	29,43	100%	32,37	100%	35,60	100%	39,16		Satuan Polisi Pamong Praja
1	**20**		**Pemerintahan Umum**															
2	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	9.701,91	100%	10.825,65	100%	10.333,44	100%	10.524,75	100%	10.737,71		Sekretariat Daerah
2	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.958,38	100%	4.671,64	100%	3.920,24	100%	4.180,19	100%	3.381,36		Sekretariat Daerah
2	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			130,00	100%	215,00	100%	140,00	100%	145,00	100%	169,00		Sekretariat Daerah
2	20	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	1.565,64	100%	1.972,44	100%	2.497,39	100%	2.805,69	100%	2.918,97		Sekretariat Daerah
2	20	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik		100%	125,00	100%	150,00	100%	180,00	100%	216,00	100%	259,20		Sekretariat Daerah
2	20	06	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100%	2.198,22	100%	2.185,21	100%	2238,88	100%	2.294,00	100%	3.088,76		Sekretariat Daerah
2	20	07	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		100%	950,00	100%	866,00	100%	904,20	100%	1.230,00	100%	1.039,05		Sekretariat Daerah
2	20	08	Program Pembakuan Nama Rupabumi	Terlaksananya pembakuan nama rupabumi		100%	96,46	100%	106,10	100%	116,72	100%	128,39	100%	141,23		Sekretariat Daerah
2	20	09	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Intensifnya penanganan pengaduan masyarakat		100%	48,96	100%	100,00	100%	175,00	100%	195,00	100%	221,00		Sekretariat Daerah
2	20	10	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%	101,83	100%	117,11	100%	134,67	100%	146,39	100%	168,35		Sekretariat Daerah
2	20	11	Program Peningkatan Kesehatan/Pembinaan Upaya Kesehatan	Meningkatnya kesehatan/pembinaan upaya kesehatan			133,80		153,86		176,94		203,49		234,01		Sekretariat Daerah
2	20	12	Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan			55,03		61,63		69,03		77,31		-		Sekretariat Daerah
2	20	13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penataan peraturan Perundang-Undangan		100%	2.744,56	100%	3.260,00	100%	3.655,00	100%	4.115,00	100%	4.345,00		Sekretariat Daerah
2	20	14	Program Legislasi Daerah Kabupaten Sintang (PROLEGDA)	Meningkatnya program legislasi daerah			100,00		110,00		120,00		130,00		140,00		Sekretariat Daerah
2	20	15	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah otonomi baru		100%	513.547,00	100%	451,35	100%	512,87	100%	522,96	100%	563,52		Sekretariat Daerah
2	20	16	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksanya peringatan hari besar Nasional		100%	591,95	100%	247,60	100%	258,52	100%	269,49	100%	285,14		Sekretariat Daerah
2	20	17	Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan		100%	455,25	100%	523,54	100%	602,07	100%	692,38	100%	796,23		Sekretariat Daerah
2	20	18	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Meningkatnya penataan kelembagaan daerah		100%	60,00	100%	170,00	100%	-	100%	270,00	100%	80,00		Sekretariat Daerah
2	20	19	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur daerah		100%	125,00	100%	450,00	100%	321,00	100%	425,00	100%	375,00		Sekretariat Daerah
2	20	20	Program Bantuan Hukum	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum		100%	1.070,00	100%	1.220,00	100%	1.325,00	100%	1.426,00	100%	1.550,00		Sekretariat Daerah

2	20	21	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasana antar pemerintah daerah		100%	117,11	100%	749,50	100%	1.089,45	100%	1.197,50	100%	1.522,50		Sekretariat Daerah
2	20	22	Program Pendukung Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Meningkatnya kualitas pelayanan kunjungan pejabat negara			0,00	100%	55,00	100%	55,00	100%	55,00	100%	55,00		Sekretariat Daerah
2	20	23	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebuthan rumah tangga kator	423,10	100%	802,37	100%	739,57	100%	945,40	100%	1.087,21	100%	1.250,29	5.247,94	Inspektorat
1	20	24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	325,37	100%	991,53	100%	622,51	100%	473,00	100%	543,95	100%	625,54	3.581,90	Inspektorat
1	20	25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan dan Pengawasan Melekat (WASKAT)	0,99	100%	21,45	100%	-	100%	52,50	100%	60,38	100%	69,43	204,74	Inspektorat
1	20	26	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kedisiplinan pegawai dalam berpakaian	-	55 helai	1,53	100%	90,24	165 helai	70,00	180 helai	80,5	210 helai	92,58	334,85	Inspektorat
1	20	27	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya anggaran dan laporan keuangan	3,03	100%	2,49	100%	5,10	100%	15,12	100%	17,388	100%	20,00	63,13	Inspektorat
1	20	28	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	1.931,29	3 Dok	2.346,07	3 Dok	2.108,52	3 Dok	3.744,42	3 Dok	4.306,08	3 Dok	4.952,00	19.388,38	Inspektorat
1	20	29	Program Peningkatan Profesional Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pengawas	222,94	3 Ptlhan	362,42	3 Ptlhan	1.003,66	3 Ptlhan	686,25	3 Ptlhan	789,19	3 Ptlhan	907,57	3.972,02	Inspektorat
1	20	30	Program Penataan dan Penyempurnaan Kegiatan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya prosedur pengawasan dan laporan pelaksanaan pengawasan	2,83	100%	2,99	100%	3,29	100%	13,31	100%	15,31	100%	17,60	55,32	Inspektorat
1	20	31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan Adm.Perkantoran	356,66	20%	473,35	20%	465,00	20%	479,25	20%	561,85	20%	624,00	100%	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	338,35	3 Buah	107,68	3 Buah	173,47	3 Buah	1.127,50	1 Unit	977,20	1 Unit	370,00	9 Buah 2 Unit	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan SD.Aparatur	105,16	10 PNS	303,33	15 PNS	211,51	10 PNS	275,00	10 PNS	300,00	20 PNS	300,00	65 org/Kali	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	34	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercpainya Peningkatan Disiplin Aparatur	0	10 Stel	11,21	10 Stel	23,12	10 Stel	-		25,00	10 Stel	-	93 Stel	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	174,78	20%	272,36	20%	469,32	20%	550,00	20%	585,00	20%	615,00	100%	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	36	Program Mengintensifkan Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat	28,68	20%	72,80	20%	122,96	20%	130,00	20%	150,00	20%	175,00	100%	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	37	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penataan Peraturan UU	32,06	40 Bk	34,28	40 Bk	34,31	40 Bk	35,00	40 Bk	40 Bk	40 Bk	35,00	200 Buku	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	38	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang semakin baik	1.568.360.000	100%	1.573,86	100%	1.780,28	100%	1.663,77	100%	1.652,35	100%	1.686,07	8.356,33	DPPKA
1	20	39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang optimal	1.274.664.000,00	100%	913,07	100%	5.915,52	100%	442,31	100%	408,28	100%	413,63	8.092,82	DPPKA
1	20	40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang berkualitas	238.208.000,00	100%	219,73	100%	241,70	100%	241,70	100%	265,87	100%	265,87	1.234,88	DPPKA
1	20	41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi standar	46.253.250,00	100%	16,72	100%	15,85	100%	16,65	100%	17,48	100%	18,35	85,05	DPPKA
1	20	42	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah baik dan tepat waktu	5.052.652.620,00	100%	6.291,43	100%	7.491,86	100%	7.735,29	100%	7.867,96	100%	7.605,48	36.992,02	DPPKA
1	20	43	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa secara maksimal	422.411.500,00	100%	671,29	100%	861,12	100%	902,72	100%	946,24	100%	991,88	4.373,25	DPPKA

1	20	44	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik		75%	2.382,17	80%	2.620,38	85%	2.882,44	90%	3.169,99	95%	3.487,73	14.542,70	Sekretariat DPRD
1	20	45	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		75%	1.439,56	83%	1.583,48	88%	1.739,71	93%	2.535,77	98%	2.724,82	10.023,33	Sekretariat DPRD
1	20	46	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		77%	220,07	85%	242,07	87%	266,28	90%	292,91	95%	322,20	1.343,52	Sekretariat DPRD
1	20	47	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Diklat Pegawai		80%	382,72	88%	420,99	92%	463,09	97%	509,40	99%	560,34	2.336,54	Sekretariat DPRD
1	20	48	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Fungsi DPRD dalam Pengawasan		85%	6.188,18	80%	6.807,00	85%	7.487,70	90%	8.236,47	95%	9.060,12	37.779,48	Sekretariat DPRD
1	20	49	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Bertambahnya Informasi kepada Masyarakat		78%	60,00	82%	66,00	85%	72,60	93%	79,86	100%	87,85	366,31	Sekretariat DPRD
1	20	50	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terciptanya Pengarsipan Data yang baik		0%	-	80%	83,20	82%	84,00	90%	85,00	100%	86,00	338,20	Sekretariat DPRD
1	20	50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik		100%	250,00	100%	293,50	100%	257,00	100%	260,50	100%	264,00	1.325,00	Kec. Sungai Tebelian
1	20	51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	46,50	100%	314,00	100%	501,50	100%	570,00	100%	56,50	1.488,50	Kec. Sungai Tebelian
1	20	52	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur												-	Kec. Sungai Tebelian
1	20	53	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	60,00	100%	60,50	100%	61,00	100%	61,50	100%	80,50	323,50	Kec. Sungai Tebelian
1	20	54	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	955,00	100%	967,00	100%	1.020,00	100%	991,00	100%	1.003,00	4.936,00	Kec. Sungai Tebelian
1	20	55	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik		100%	100,68	100%	120,82	100%	144,98	100%	173,98	100%	208,77	749,23	Kec. Tempunak
1	20	56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	98,95	100%	118,74	100%	142,49	100%	170,99	100%	205,19	736,36	Kec. Tempunak
1	20	57	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	9,20	100%	11,04	100%	13,25	100%	15,90	100%	19,08	68,46	Kec. Tempunak
1	20	58	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	47,97	100%	57,57	100%	69,08	100%	82,90	100%	99,47	356,99	Kec. Tempunak
1	20	59	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	134,84	100%	161,81	100%	194,17	100%	233,00	100%	279,60	1.003,42	Kec. Tempunak
1	20	60	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	31,79	100%	38,15	100%	45,78	100%	54,94	100%	65,93	236,60	Kec. Tempunak
1	20	61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik		100%	136,89	100%	139,78	100%	174,18	100%	157,51	100%	210,40	818,76	Kec. Sepauk
1	20	62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	23,00	100%	117,68	100%	262,92	100%	133,66	100%	711,76	1.249,01	Kec. Sepauk
1	20	63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			0,00	100%	16,50		0,00	100%	17,90	100%	20,00	54,40	Kec. Sepauk
1	20	64	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	94,74	100%	105,65	100%	116,56	100%	129,55	100%	141,94	588,45	Kec. Sepauk
1	20	65	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	213,61	100%	315,11	100%	342,31	100%	360,25	100%	1.263,95	2.495,23	Kec. Sepauk
1	20	66	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	22,88	100%	23,11	100%	25,44	100%	27,98	100%	30,78	130,19	Kec. Sepauk
1	20	67	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	11,00	100%	27,80	100%	28,10	100%	28,90	100%	29,40	125,20	Kec. Sepauk
1	20	68	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan dengan lancar	187,35	100%	240,99	100%	253,72	100%	270,17	100%	287,27	100%	305,34	1.357,50	Kec. Sintang
1	20	69	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya tingkat kecukupan sarana dan prasarana	245,44	100%	257,62	100%	270,75	100%	108,50	100%	92,50	100%	100,00	829,37	Kec. Sintang

1	20	70	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatnya disiplin Aparatur	14,85	100%	31,75	100%	31,75	100%	32,00	100%	32,25	100%	35,00	162,75	Kec. Sintang
1	20	71	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya skill/ keahlian aparatur	160,11	100%	123,77	100%	123,77	100%	127,00	100%	132,00	100%	137,00	643,54	Kec. Sintang
1	20	72	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Tercapainya kelancaraan tugas pokok dan fungsi	303,86	100%	416,84	100%	453,19	100%	477,01	100%	491,32	100%	516,71	2.355,08	Kec. Sintang
1	20	73	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatnya kesadaran nasionalisme masyarakat	23,86	100%	26,24	100%	26,24	100%	28,87	100%	31,75	100%	34,93	148,03	Kec. Sintang
1	20	74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	112,68	100%	135,22	100%	162,26	100%	194,71	100%	233,66	838,53	Kec. Dedai
1	20	75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	418,18	100%	501,82	100%	602,18	100%	722,62	100%	867,14	3.111,94	Kec. Dedai
1	20	76	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													Kec. Dedai
1	20	78	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	80,42	100%	96,50	100%	115,80	100%	138,96	100%	166,75	598,42	Kec. Dedai
1	20	79	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	162,78	100%	195,33	100%	234,40	100%	281,28	100%	337,53	1.211,31	Kec. Dedai
1	20	80	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	19,80	100%	23,76	100%	28,52	100%	34,22	100%	41,07	147,37	Kec. Dedai
1	20	81	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	305,41	100%	366,50	100%	439,80	100%	527,76	100%	633,31	2.272,77	Kec. Kelam Permai
1	20	82	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	425,58	100%	510,70	100%	612,84	100%	735,40	100%	882,48	3.167,00	Kec. Kelam Permai
1	20	83	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													Kec. Kelam Permai
1	20	84	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur													Kec. Kelam Permai
1	20	85	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	120,30	100%	144,36	100%	173,23	100%	207,88	100%	249,46	895,23	Kec. Kelam Permai
1	20	86	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional													Kec. Kelam Permai
1	20	87	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													Kec. Kelam Permai
1	20	88	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	129,55	100%	155,46	100%	186,56	100%	223,87	100%	268,64	964,08	Kec. Kayan Hilir
1	20	89	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	53,22	100%	63,87	100%	76,64	100%	91,97	100%	110,36	396,06	Kec. Kayan Hilir
1	20		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													Kec. Kayan Hilir
1	20	90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	61,90	100%	74,28	100%	89,13	100%	106,96	100%	128,35	460,63	Kec. Kayan Hilir
1	20	91	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	115,87	100%	139,04	100%	166,85	100%	200,22	100%	240,27	862,25	Kec. Kayan Hilir
1	20	92	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	31,63	100%	37,96	100%	45,55	100%	54,66	100%	65,59	235,38	Kec. Kayan Hilir
1	20	93	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	133,68	100%	160,42	100%	192,50	100%	231,00	100%	277,21	994,82	Kec. Kayan Hulu
1	20	94	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	132,16	100%	158,59	100%	190,31	100%	228,37	100%	274,05	983,48	Kec. Kayan Hulu
1	20	95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	42,40	100%	50,88	100%	61,05	100%	73,27	100%	87,92	315,52	Kec. Kayan Hulu

1	20	97	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	117,12	100%	140,55	100%	168,66	100%	202,39	100%	242,87	871,58	Kec. Kayan Hulu
1	20	98	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	205,28	100%	246,33	100%	295,60	100%	354,72	100%	425,66	1.527,60	Kec. Serawai
1	20	99	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	50,00	100%	60,00	100%	72,00	100%	86,40	100%	103,68	372,08	Kec. Serawai
1	20	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													Kec. Serawai
1	20	101	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	52,78	100%	63,34	100%	76,00	100%	91,20	100%	109,44	392,77	Kec. Serawai
1	20	102	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	80,09	100%	96,11	100%	115,33	100%	138,40	100%	166,08	596,01	Kec. Serawai
1	20	103	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	202,46	100%	242,95	100%	291,54	100%	349,85	100%	419,82	1.506,62	Kec. Ambalau
1	20	104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	131,65	100%	157,98	100%	189,58	100%	227,49	100%	272,99	979,69	Kec. Ambalau
1	20	105	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													Kec. Ambalau
1	20	106	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	36,84	100%	44,21	100%	53,05	100%	63,66	100%	76,39	274,15	Kec. Ambalau
1	20	107	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	46,54	100%	55,85	100%	67,02	100%	80,42	100%	96,51	346,35	Kec. Ambalau
1	20	108	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	404,06	100%	484,87	100%	581,85	100%	698,22	100%	837,86	3.006,85	Kec. Binjai Hulu
1	20	109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	7,00	100%	8,40	100%	10,08	100%	12,10	100%	14,52	52,09	Kec. Binjai Hulu
1	20	110	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	7,00	100%	8,40	100%	10,08	100%	12,10	100%	14,52	52,09	Kec. Binjai Hulu
1	20	111	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	50,83	100%	61,00	100%	73,20	100%	87,83	100%	105,40	378,26	Kec. Binjai Hulu
1	20	112	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	164,04	100%	196,84	100%	236,21	100%	283,45	100%	340,14	1.220,68	Kec. Binjai Hulu
1	20	113	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	201,42	100%	241,71	100%	290,05	100%	348,06	100%	417,67	1.498,90	Kec. Ketungau Hilir
1	20	114	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	64,50	100%	77,40	100%	92,88	100%	111,46	100%	133,75	479,98	Kec. Ketungau Hilir
1	20	115	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur													
1	20	116	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	73,78	100%	88,54	100%	106,24	100%	127,49	100%	152,99	549,04	Kec. Ketungau Hilir
1	20	117	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	63,47	100%	76,17	100%	91,40	100%	109,68	100%	131,62	472,35	Kec. Ketungau Hilir
1	20	118	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	15,00	100%	15,00	100%	15	100%	15,00	100%	15,00	75,00	Kec. Ketungau Hilir
1	20	119	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	5,00	Kec. Ketungau Hilir
1	20	120	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	241,57	100%	289,88	100%	347,86	100%	417,43	100%	500,91	1.797,64	Kec. Ketungau Tengah
1	20	121	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	32,95	100%	39,54	100%	47,45	100%	56,94	100%	68,33	245,22	Kec. Ketungau Tengah
1	20	122	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	4,55	100%	5,46	100%	6,55	100%	7,86	100%	9,43	33,86	Kec. Ketungau Tengah

1	20	123	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	76,68	100%	92,02	100%	110,42	100%	132,50	100%	159,00	570,62	Kec. Ketungau Tengah
1	20	124	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	74,41	100%	89,29	100%	107,14	100%	128,57	100%	154,29	553,70	Kec. Ketungau Tengah
1	20	125	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	203,49	100%	244,18	100%	293,02	100%	351,62	100%	421,95	1.514,25	Kec. Ketungau Hulu
1	20	126	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	228,72	100%	274,46	100%	329,35	100%	395,22	100%	474,27	1.702,02	Kec. Ketungau Hulu
1	20	127	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	11,20	100%	13,44	100%	16,13	100%	19,35	100%	23,22	83,35	Kec. Ketungau Hulu
1	20	128	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	45,12	100%	54,14	100%	64,97	100%	77,96	100%	93,55	335,73	Kec. Ketungau Hulu
1	20	129	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	132,11	100%	158,53	100%	190,24	100%	228,29	100%	273,95	983,12	Kec. Ketungau Hulu
1	20	130	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Raya Besar Nasional		100%	15,00	100%	15,00	100%	15	100%	15,00	100%	15,00	75,00	Kec. Ketungau Hulu
1	20	131	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	54,04	100%	64,85	100%	77,81	100%	93,38	100%	112,05	402,13	Kel. Kapuas Kiri Hilir
1	20	132	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	2,12	100%	2,54	100%	3,05	100%	3,66	100%	4,40	15,78	Kel. Kapuas Kiri Hilir
1	20	133	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	5,67	100%	6,80	100%	8,16	100%	9,80	100%	11,76	42,19	Kel. Kapuas Kiri Hilir
1	20	134	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	23,32	100%	27,98	100%	33,57	100%	40,29	100%	48,35	173,50	Kel. Kapuas Kiri Hilir
1	20	135	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	20,23	100%	24,27	100%	29,13	100%	34,95	100%	41,94	150,52	Kel. Kapuas Kiri Hilir
1	20	136	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	39,93	100%	47,91	100%	57,50	100%	69,00	100%	82,80	297,13	Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	137	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	123,50	100%	148,20	100%	177,84	100%	213,41	100%	256,09	919,04	Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	138	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	4,95	100%	5,94	100%	7,13	100%	8,55	100%	10,26	36,84	Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	139	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	35,72	100%	42,86	100%	51,44	100%	61,72	100%	74,07	265,81	Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	140	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	141	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	23,69	100%	28,43	100%	34,11	100%	40,93	100%	49,12	176,28	Kel.Kapuas Kiri Hulu
1	20	142	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	68,61	100%	82,33	100%	98,80	100%	118,56	100%	142,27	510,58	Kel. Kapuas Kanan Hulu
1	20	143	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	261,60	100%	313,92	100%	376,70	100%	452,04	100%	542,45	1.946,70	Kel. Kapuas Kanan Hulu
1	20		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	4,60	100%	5,52	100%	6,62	100%	7,95	100%	9,53	34,22	Kel. Kapuas Kanan Hulu
1	20	144	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	23,32	100%	27,98	100%	33,57	100%	40,29	100%	48,35	173,50	Kel. Kapuas Kanan Hulu
1	20	145	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	38,55	100%	46,26	100%	55,51	100%	66,61	100%	79,94	286,87	Kel. Kapuas Kanan Hulu
1	20	146	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	47,28	100%	56,74	100%	68,09	100%	81,71	100%	98,05	351,87	Kel. Kapuas Kanan Hilir

1	20	147	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	20,08	100%	24,09	100%	28,91	100%	34,69	100%	41,63	149,41	Kel. Kapuas Kanan Hilir
1	20	148	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	2,80	100%	3,36	100%	4,03	100%	4,84	100%	5,81	20,84	Kel. Kapuas Kanan Hilir
1	20	149	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	23,32	100%	27,98	100%	33,57	100%	40,29	100%	48,35	173,50	Kel. Kapuas Kanan Hilir
1	20	150	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	22,65	100%	27,18	100%	32,61	100%	39,14	100%	46,96	168,54	Kel. Kapuas Kanan Hilir
1	20	151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	61,10	100%	73,32	100%	87,98	100%	105,57	100%	126,69	454,65	Kel. Tanjung Puri
1	20	152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	27,74	100%	33,29	100%	39,95	100%	47,94	100%	57,52	206,44	Kel. Tanjung Puri
1	20	153	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	6,82	100%	8,18	100%	9,82	100%	11,78	100%	14,13	50,72	Kel. Tanjung Puri
1	20	154	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	23,32	100%	27,98	100%	33,57	100%	40,29	100%	48,35	173,50	Kel. Tanjung Puri
1	20	155	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	20,59	100%	24,70	100%	29,64	100%	35,57	100%	42,69	153,19	Kel. Tanjung Puri
1	20	156	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	45,36	100%	54,43	100%	65,32	100%	78,38	100%	94,06	337,54	Kel. Ladang
1	20	157	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	9,62	100%	11,54	100%	13,85	100%	16,62	100%	19,95	71,59	Kel. Ladang
1	20	158	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	4,00	100%	4,80	100%	5,76	100%	6,91	100%	8,29	29,77	Kel. Ladang
1	20	159	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	26,54	100%	31,84	100%	38,21	100%	45,85	100%	55,02	197,46	Kel. Ladang
1	20	160	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		100%	28,62	100%	34,35	100%	41,22	100%	49,46	100%	59,35	213,00	Kel. Ladang
1	**21**		**Kepegawaian**														
1	21	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Adm. Perkantoran	99.19%	100%	556,25	100%	667,50	100%	706,11	100%	847,33	100%	1.016,80	3.794,00	BKD
1	21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,60%	100%	100,50	100%	120,60	100%	2.643,41	100%	3.172,09	100%	3.806,51	9.843,11	BKD
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		110 Steel		-		84,70		90,00		108,00	100%	129,60	412,30	BKD
1	21	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	263 orang	100%	2.483,39	100%	2.980,07	100%	3.496,35	100%	4.195,62	100%	5.034,74	18.190,17	BKD
1	21	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	100%	1,10	100%	1,31	100%	1,33	100%	1,59	100%	1,91	7,23	BKD
1	21	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	91,14%	100%	4.124,26	100%	4.949,12	100%	5.841,48	100%	7.009,77	100%	8.411,73	30.336,36	BKD
1	**22**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														
1	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		99%	385,63	99%	376,98	100%	417,518	100%	480,1457	100%	552,17	2.212,43	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pemerintah		100%	45,67	100%	228,97	100%	296,6	100%	341,09	100%	392,25	1.304,58	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur Pemerintah		100%	18,20	100%	23,40	100%	13,5	100%	15,525	100%	17,85	88,48	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur		97%	52,25	100%	116,71	100%	116	100%	133,4	100%	153,41	571,77	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes

1	22	06	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100%	423,88	100%	391,89	100%	633,5	100%	728,525	100%	837,80	3.015,59	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	08	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat		95%	1.235,36	100%	1.108,07	100%	1.368,38	100%	1.573,64	100%	1.809,69	7.095,13	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	05	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya kelembagaan ekonomi Pedesaan		99%	42,42	100%	79,99	100%	179,00	100%	205,85	100%	236,73	743,99	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	07	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa		98%	555,22	100%	460,80	100%	475,50	100%	546,825	100%	628,85	2.667,20	Ktr. Pemberdayaan Msy. & Pemdes
1	22	09	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan		100%	81,64	100%	200,00	100%	300,00	100%	175,00	100%	200,00		Sekretariat Daerah
1	**23**		**Statistik**															
1	23	01	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya dokumen pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah		2 Dok	440,36	2 Dok	470,00	2 Dok	515,00	2 Dok	585,00	2 Dok	1.560,00	10 Dok	Bappeda
1	23	02	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya dokumen pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah		100%	-	100%	200,00	100%	215	100%	300	100%	0		Sekretariat Daerah
1	**24**		**Kearsipan**															
1	24	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	274,28	100%	497,41	100%	566,77	100%	518,77	100%	555,77	2.413,00	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	304,48	100%	564,00	100%	946,50	100%	599,00	100%	554,50	2.968,48	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	9,00	100%	12,50	100%	12,50	100%	12,50	100%	12,50	59,00	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	136,69	100%	290,00	100%	290,00	100%	295,00	100%	295,00	1.306,69	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	05	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		100%	124,87	100%	133,50	100%	296,50	100%	310,00	100%	345,00	1.209,87	Kantor Arsip & Perpustakaa Daerah
1	24	06	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Arsip	Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana arsip		100%	44,37	100%	60,00	100%	90,00	100%	90,00	100%	95,00	379,37	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		100%	106,30	100%	342,22	100%	347,22	100%	326,22	100%	265,22	1.387,19	Kantor Arsip & Perpustakaa Daerah
1	24	08	Program Perbaikan Administrasi Kearsipan	Meningkatnya sistem administrasi kearsipan			0,00	100%	-		184,50		135,00		0,00	319,50	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	24	09	Program Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya pengadaan sarana penyimpanan		1,00	-		163,13		423,50		460,00		460,00	1.506,63	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
1	**25**		**Komunikasi dan Informatika**															
1	25	01	Program Pengambangan Manajemen Informasi	Meningkatnya pengembangan manajemen informasi		100%	110,00	100%	200,00	100%	550,00	100%	300	100%	400		Sekretariat Daerah
1	25	02	Program Pengambangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media masa		100%	15,45	100%	550,85	100%	84,46	100%	68,90	100%	41,69		Sekretariat Daerah
1	25	03	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM Komunikasi dan Informasi		100%	19,98	100%	20,00	100%	20,00	100%	22,00	100%	25,00		Sekretariat Daerah
1	25	04	Program Pengembangan Manajemen Sistem Informasi	Terlaksananya pengembangan manajemen sistem informasi			-		225,00		625,00		400,00		-		Sekretariat Daerah
1	25	05	Program kerjasama informsi dan media massa	Meningkatnya kerjasama informasi		100%	546,68	100%	657,87	100%	703,32	100%	751,67	100%	1.817,19		Sekretariat Daerah
1	25	06	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		100%	438,00	100%	956,23	100%	914,09	100%	1.119,21	100%	906,35		Sekretariat Daerah
1	25	07	Program Pemberdayaan Sarana Komunikasi & Diseminasi Informatika	Meningkatnya pemberdayaan sarana komunikasi & desiminasi informatika		100%	-	100%	200,00	100%	215,00	100%	300,00	100%	-		Sekretariat Daerah
1	25	08	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi		100%	27,00	100%	300,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00		Sekretariat Daerah

1	25	09	Program Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Meningkatnya penyebaran informasi bagi masyarakat		100%	47,88	100%	127,58	100%	57,50	100%	62,00	100%	62,00		Sekretariat Daerah
2			**Urusan Pilihan**															
2	**01**		**Pertanian**															
2	01	01	Program Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi bahan pangan pokok yang akan dicapai	Padi 90.820 ton Palawija 14.544 ton	100%	13.646,03	100%	16.283,91	100%	18.554,54	100%	20.981,89	100%	16.184,36	85.650,73	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	02	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Penerapan teknologi(adopsi)pertanian berbasis sumberdaya lokal(organik) dan SRI	5%	100%	560,00	100%	650,00	100%	792,5	100%	937,75	100%	1.066,02	4.006,27	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	03	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan SDM Petani dg pola SL, magang dan pelatihan	8%	100%	270,00	100%	280,00	100%	300,00	100%	320,00	100%	336,00	1.506,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	04	Program Pengembangan Pembibitan Ternak	Pengadaan sarana, prasarana pembibitan ternak	10%		4.750,00		4.750,00		4.750,00		4.750,00		4.750,00	23.750,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	05	Program Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	Pengendalian penyakit menular dan penyakit endemis ternak	1 Paket /th		610,00		610,00		610,00		610,00		610,00	3.050,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	06	Program Kemavet dan Pasca Panen	Pengawasan peredaran produkasal hewan secara ilegal dan pembangunan RPH	Pengawasan 1 kegiatan		500,00		1.790,00		2390,00		1190,00		990,00	6.860,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	07	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia	Bimbingan dan pembinaan kepada kelompok penerima distribusi ternak	20%		-		60,00		80,00		60,00		40,00	240,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	08	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Pakan Ternak	Pengembangan Bibit HMT dan penanaman HMT	25%		650,00		650,00		650,00		650,00		650,00	3.250,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	09	Program Pengembangan Produksi Ternak	Meningkatkan populasi/produksi ternak besar,kecil dan unggas, untuk mencapai swasembada daging sapi khusunya	5%		5.050,00		5.050,00		5.050,00		5.050,00		5.050,00	25.250,00	Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	01	10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya dokumen perencanaan dalam meningkatkan produksi peternakan		100%	113,42		0,00		0,00		0,00		0,00		Bappeda
2	01	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya program pelayanan perkantoran	776,40	100%	571,50	100%	588,50	100%	596,50	100%	606,50	100%	648,50	3.011,50	BPPPPKKP
2	01	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana Perkantoran	362,00	100%	449,68	100%	679,68	100%	604,68	100%	404,68	100%	679,68	2.818,38	BPPPPKKP
2	01	13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur	0,00	100%	280,30	100%	242,80	100%	242,80	100%	242,80	100%	280,30	1.289,00	BPPPPKKP
2	01	14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	182,67	100%	923,91	100%	1.023,91	100%	1.023,91	100%	1.023,91	100%	1.023,91	5.019,55	BPPPPKKP
2	01	15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1,61	100%	50,00	100%	52,00	100%	52,00	100%	52,00	100%	52,00	258,00	BPPPPKKP
2	01	16	Program Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	351,00	100%	1.250,00	100%	1.525,00	100%	1.300,00	100%	1.520,00	100%	1.100,00	6.695,00	BPPPPKKP
2	01	18	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	824,72	100%	2.205,00	100%	2.205,00	100%	2.205,00	100%	2.205,00	100%	2.205,00	11.025,00	BPPPPKKP
2	01	19	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya akses pemasaran produk pertanian perkebunan	25,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	1.250,00	BPPPPKKP
2	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertnian/perkebunan lapangan	1.120,06	100%	1.875,00	100%	1.875,00	100%	1.875,00	100%	1.875,00	100%	1.875,00	9.375,00	BPPPPKKP
2	01	21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya penyuluhan perlindangan dan koservasi hutan	0,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	250,00	BPPPPKKP
2	01	22	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	202,88	100%	900,00	100%	900,00	100%	900,00	100%	900,00	100%	900,00	4.500,00	BPPPPKKP

2	01	24	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningakatan pendampingan rehabilitasi hutan dan lahan	0,00	100%	225,00	100%	225,00	100%	225,00	100%	225,00	100%	225,00	1.125,00	BPPPPKKP
2	01	25	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan	Meningkatnya sistem penyuluhan	0,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	250,00	BPPPPKKP
2	01	26	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Meningkatnya penyuluhan budidaya perikanan	0,00	100%	-	100%	23,00	100%	30,00	100%	35,00	100%	35,00	123,00	BPPPPKKP
2	**02**		**Kehutanan**														
2	02	07	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terbinanya kemitraan kelembagaan petani kebun	14 Kec./27 Perusahaan	27 Pershn	170,00	27 Pershn	370,00	27 Pershn	440,00	27 Pershn	480,00	27 Pershn	545,00	2.005,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	08	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	81.635 Ha	84.056 Ha	2.261,61	85.836 Ha	3.400,00	90.186 Ha	4.195,00	94.536 Ha	4.710,00	96.635 Ha	4.922,00	96.635 Ha	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	09	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Terseleksinya ijin pemanfaatan dan tersedianya data potensi hutan		14 Prshn	140,00	14 Prshn	981,60	14 Prshn	1.051,50	14 Prshn	1.160,57	14 Prshn	1.222,30	4.555,97	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	10	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya rehabilitas hutan/lahan di dalam kawasan maupun diluar kawasan	10.319 Ha	15.119 Ha	6.486,26	25.438 Ha	9.399,33	35.757 Ha	12.720,10	46.076 Ha	13.824,30	56.395 Ha	15.520,44	56.395 Ha	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	11	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Sosialisasi kebakaran hutan	14 Kec.	0,00	14 Kec.	1.150,00	14 Kec.	1.545,00	14 Kec.	1.730,00	14 Kec.	1.700,00	6.125,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	12	Program Perlindungan dan Konservasi	Terlaksananya pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan	Orientasi lapangan dan pengawasan	14 Kec.	0,00	14 Kec.	1.205,00	14 Kec.	1.510,00	14 Kec.	1.675,00	14 Kec.	1.815,00	6.205,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	13	Program Rehabilitasi dan Pemulihan	Meningkatnya pengkayaan terhadap hutan/lahan yang terlantar atau terkontaminasi		14 Kec.	0,00	14 Kec.	700,00	14 Kec.	880,00	14 Kec.	990,00	14 Kec.	1.100,00	3.670,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Terciptanya Sumber Daya Manusia Kehutanan yang andal, ahli dan terampil			0,00	10 Org	250,00	10 Org	305,00	10 Org	340,00	10 Org	380,00	1.275,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	15	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersedianya dokumen perencanaan kehutanan dan perkebunan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan	Penyusunan perencanaan rehabilita		0,00	14 Kec.	545,00	14 Kec.	625,00	14 Kec.	695,00	14 Kec.	710,00	2.575,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	**03**		**Energi dan Sumberdaya Mineral**														
2	03	01	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jlh Data Potensi Sumber Daya Mineral	10%	10%	200,00	20%	480,00	20%	450,00	20%	475,00	20%	500,00	200%	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	02	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	Jlh Sumber Daya Air yang di bina dan diawasi	0	10%	150,00	15%	355,00	20%	400,00	25%	520,00	30%	640,00	2.065,00	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	03	Program Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	Jlh RUKD yang tersedia	1 PERDA		0,00	1 Perda R	200,00		0,00		0,00		0,00	1 PERDA	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	04	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Jlh Areal Peti yang ditertibkan	10%	5%	100,00	30%	420,00	20%	340,00	15%	250,00	20%	300,00	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jlh Ketenagalistrikan yang di kembangkan dan dibina		100%	100,00	100%	170,00	100%	100,00	100%	90,00	100%	100,00	560,00	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	06	Program Inventarisasi dan Kajian Potensi Sumber Daya Energi			100%	100,00	100%	120,00	100%	140,00	100%	160,00	100%	180,00	700,00	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	07	Program Pembangunan Infrastruktur Sumber Energi dan Ketenagalistrikan	Jlh Sumber daya Energi Listrik Dibangun	10%	10%	2.300,00	10%	2.700,00	10%	2.600,00	45%	12.900,00	15%	3.400,00	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	08	Program Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral	Jlh Lokasi dan Potensi Tersedia	20%	15%	300,00	25%	370,00	20%	340,00	0,10	160,00	0,10	180,00	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
2	03	09	Program Pembinaan dan Pengawasan MIGAS	Jlh Pengelolaan Migas yang di bina dan awasi		100%	500,00	100%	500,00	100%	310,00	100%	280,00	100%	290,00	1.880,00	Dinas Pertambangan dan Energi

2	**04**		**Pariwisata**														
2	04	01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Mengkomunikasikan Budaya Daerah Kab.Sintang dgn Minat Wisata		100%	127,00	100%	90,00	100%	2.725,00	100%	3.430,00	100%	3.890,00	10.262,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Desain Tehnis Sarana dan Prasarana Pariwisata		100%	203,00	100%	2.183,00	100%	3.287,00	100%	4.561,00	100%	5.354,00	15.588,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	03	Program Analisa Pasar untuk Promosi & Pemasaran Pariwisata Daerah	Menentukan peluang pasar & target pengunjung		100%	40,00	100%	43,00	100%	45,00	100%	50,00	100%	52,00	230,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	04	Program Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Terwujudnya koordinasi dengan lembaga Sektor Pendukung Pariwisata		100%	35,00	100%	37,00	100%	40,00	100%	42,00	100%	45,00	199,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	05	Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran pariwisata		100%	33,00	100%	34,00	100%	36,00	100%	39,00	100%	42,00	184,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	06	Program Peningkatan Pembangunan dan Prasarana Pariwisata	Terealisasinya pembuatan jln menuju		80%	650,00	80%	747,50	80%	859,63	80%	988,57	80%	1.136,90	4.382,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	07	Program Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	Terjadinya kemitraan dengan LSM & perusahaan swasta yg peduli pada pengembangan perekonomian masyarakat yang ada dapat dijadikan promosi keluar agar dapat dikenali		80%	150,00	80%	172,50	80%	198,38	80%	228,13	80%	262,35	1.011,36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	08	Program Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Terlaksananya koordinasi pembentukan Desa Wisata		80%	200,00	80%	230,00	80%	264,35	80%	304,18	80%	349,80	1.348,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	09	Program Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata & Budaya	Terwujudnya kerja sama antar daerah dan lembaga pelaku promosi pariwisata		60%	40,00	60%	60,00	60%	80,00	60%	100,00	60%	120,00	400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	10	Program Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Hotel, Restauran Rumah Makan Café dan Biro Jasa dan kelompok Sadar Wisata dan guide		80%	150,00	80%	165,00	80%	180,00	80%	198,00	80%	200,00	893,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	11	Program Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terpenuhinya kerja sama antar daerah dalam usaha profesi yang efektif dan efisiensi		60%	35,00	60%	39,00	60%	121,00	70%	133,00	90%	204,00	532,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	12	Program Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Terwujudnya sosialisasi/Pelatihan Pemandu Wisata terpadu			-	80%	140,00	80%	160,00	80%	175,00	80%	190,00		Dinas Kebudayaan
2	**05**		**Kelautan dan Perikanan**														
2	05	01	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan seumberdaya kelautan dan perikanan		100%	46,00	100%	460,00	100%	355,00	100%	355,00	100%	355,00		Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	05	02	Program Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya perikanan		100%	2.298,80	100%	5.917,50	100%	8.675,65	100%	6.099,62	100%	6.330,58		Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	05	03	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		100%	143,00	100%	250,00	100%	290,00	100%	330,00	100%	370,00		Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	05	04	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Meningkatnya pengembagan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar		100%	660,00	100%	660,00	100%	660,00	100%	660,00	100%	660,00		Dinas Pertanian, Peternakan & Prknn
2	**06**		**Perdagangan**														
2	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan dan operasional administrasi perkantoran	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	583,56	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	599,48	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	598,48	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	606,76	4 Rek, 5 Pkt, 13 Bk, 1 Box, 2 Bh, 3 Jenis Surat Kabar, 648 Ktk, 63 Kl, 7 org	613,46	20 Rek, 25 Pkt, 65 Bk, 5 Box, 10 Bh, 15 Jenis Surat Kabar, 3.240 Ktk, 315 Kl, 35 orang	Dinas Perindagkop UKM
2	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana	46 Unit	44 Unit	59,49	56 Unit	2.158,09	56 Unit	765,99	56 Unit	766,64	56 Unit	766,64	268 Unit	Dinas Perindagkop UKM

				yang menunjang operasional kantor													
2	06	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur yg akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	26 orang	26 org	267,21	26 org	278,62	26 org	278,62	26 org	278,62	26 org	290,03	130 orang	Dinas Perindagkop UKM
2	06	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data dan informasi capaian kinerja dan laporan keuangan	17 Buku	17 Buku	1,18	17 Buku	1,18	17 Buku	1,18	17 Buku	1,18	17 Buku	1,18	85 Buku	Dinas Perindagkop UKM
2	06	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas bagi PNS	0	-	0,00	0%	-	60 org	24,00	60 org	24,00	60 org	0,00	180 orang	Dinas Perindagkop UKM
2	06	**06**	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terwujudnya perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yg mengandung bahan berbahaya serta pengawasan peredaran barang dan jasa	27 Buku, 10 Sampel	35 Bk, 10 Sampel	217,40	35 Bk, 10 Sampel	420,10	35 Bk, 10 Sampel	4.966,68	35 Bk, 10 Sampel	5.059,11	35 Bk, 10 Sampel	5.059,11	183 Buku, 50 Sampel	Dinas Perindagkop UKM
2	06	**07**	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan informasi dan data pelaku usaha	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	1.351,48	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	11.010,33	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	10.851,85	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	10.870,83	292 Kios, 2 Unit, 1 Paket, 5 Desain	10.616,61	1.460 Kios, 10 Unit, 5 Paket, 25 Desain	Dinas Perindagkop UKM
2	06	**08**	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya data dan informasi PKL	8 Buku	8 Buku	29,68	8 Buku	34,13	8 Buku	39,25	8 Buku	45,14	8 Buku	51,91	40 Buku	Dinas Perindagkop UKM
2	**07**		**Perindustrian**														
2	07	01	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK	Meningkatnya kemampuan teknologi pengolahan industri kecil menengah	20 orang	20 orang	53,06	60 orang	198,37	60 orang	218,30	60 orang	240,73	60 orang	267,81	260 orang	Dinas Perindagkop UKM
2	07	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya informasi promosi produk IKM	2 event 30 orang, 5 Buku	3 event 50 org, 5 Buku	443,62	3 event 50 org, 5 Buku	528,76	3 event 50 org, 5 Buku	595,45	3 event 50 org, 5 Buku	682,34	3 event 50 org, 5 Buku	807,62	15 event 250 orang, 25 Buku	Dinas Perindagkop UKM
2	07	03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tersedianya SDM yng terampil dan mampu mengelola usahanya melalui teknologi tepat guna	70 Buku, 20 orang	70 Buku, 20 org	609,63	70 Buku, 20 org	717,21	70 Buku, 20 org	1.271,53	70 Buku, 20 org	1.305,38	70 Buku, 20 org	1.305,38	350 Buku, 100 orang	Dinas Perindagkop UKM
2	07	04	Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya saran dan prasarana klaster industri serta peningkatan pengetahuan pengelolaan produksi industri	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	2.939,65	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	2.939,65	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	2.939,65	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	2.969,17	1 Kube, 3 Pkt, 20 Bk, 3 Klpk, 5 orang	2.969,17	3 Kube, 15 Pkt, 100 Bk, 50 Klpk 25 Orang	Dinas Perindagkop UKM
2	07	05	Program Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kinerja dan produktivitas usaha GKM	2 Konvensi	2 Konvensi	82,11	2 Konvensi	90,32	2 Konvensi	99,35	2 Konvensi	109,29	2 Konvensi	120,22	10 Konvensi	Dinas Perindagkop UKM
2	**08**		**Transmigrasi**														
2	08	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersusunnya Rencana Kota Terpadu Mandiri serta terdatanya permasalahan yang timbul dilokasi eks trans dan penanganannya		100%	220,13	100%	368,50	100%	297,85	100%	312,98	100%	325,54	1.525,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis melaui GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) dalam program JAKARTA–SELATAN (Jalan–Karet–Tanaman Pangan–Sekolah–Kesehatan), maka perlu disusun penetapan indikator kinerja utama daerah.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Sintang, Tahun 2010-2015

NO.	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
1.	**Indikator Ekonomi Makro**				
	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,38	6,69
	2.	PDRB Per Kapita	Rp.000	9.332,96	13.852,40
	3.	Kebutuhan Investasi	Milyar	475.47	1,267.86
	4.	Inflasi	%	6,85	5,42
	5.	Tingkat Pengangguran	%	3,12	3,40
	6.	Tingkat Kemiskinan	%	11,50	7,92
	7.	Total Nilai IPM		68	70

NO.	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
2.	**Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif**				
	1.	Produksi Padi	Ton	90.820	133.906
		a. Padi Sawah	Ton	68.918	113.104
		b. Padi Ladang	Ton	21.902	20.802
	2.	Luas Padi Ladang	Ha	12.734	9.835
	3.	Luas Padi Sawah	Ha	20.355	32.362
	4.	Luas Kebun Karet	Ha	81.635	96.635
	5.	Luas Kebun Sawit	Ha	69.626,61	110.000,00
	6.	Produksi Karet	Ton	34.720	43.164
	7.	Produksi Sawit/TBS	Ton	435.640,55	1.200.000
	8.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	9.377,4	13.909
	9.	Peningkatan Produksi Peternakan	Ton	1.962	2.690
	10.	Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	1.119,85	3.119,10
	11.	Kebutuhan Hewan	Ekor	1.313.052	2.114.682
	12.	Jumlah Koperasi	Unit	275	352
	13.	Jumlah UMKM	Unit	2.775	5.990
		- PT	Unit	100	225
		- CV	Unit	425	621
		- PO	Unit	2.250	5.144
	14.	Jumlah Industri Kecil Menengah	Unit	1.926	2.255
		a. IKM Formal	Unit	169	342
		- Industri Kecil	Unit	88	178
		- Industri Menengah	Unit	81	164
		b. IKM Non Formal	Unit	1.757	1.913
	15.	Jumlah Industri Besar	Unit	2	5
	16.	Lahan Kritis	Ha	647.015,82	634.340,82
	17.	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	410.294,65	395.494,65
	18.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	10.319	56.395
	19.	IUPHHK-HA	Unit	4	4
	20.	IUPHHK-HTI	Unit	2	5
	21.	Produksi Kayu Bulat	M^3	108.524,01	123.901,78
3.	**Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas**				
	1.	Rata-rata Lama Belajar	Tahun	6,95	9,00
	2.	Angka Melek Huruf	%	91,91	96,91
	3.	APM SD/MI/Paket A	%	93,64	98,64
	4.	Angka Partisipasi Sekolah (SD)		98,00	99,75
	5.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia Sekolah (SD)		139,06	140,00
	6.	Rasio Terhadap Murid		20,00	15,00
	7.	Kebutuhan Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan (SD/MI)	Orang	1,310	1,719
	8.	APM SMP/MTs/Paket B	%	59,68	64,68

NO.	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
	9.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs	Orang	580	948
	10.	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	27,28	32,28
	11.	Angka Partisipasi Sekolah SMA		50,10	53,10
	12.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia Sekolah		3,95	4,88
	13.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA	Orang	259	631
	14.	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Orang	83	103
	15.	Prosentase Kelulusan - SD/ MI - SMP/ MTs - SMA/ MA - SMK	 % % % %	 98,92 91,90 94,50 96,50	 100,00 96,90 99,00 100,00
	16.	Rata-Rata Nilai Ujian - SD/ MI - SMP - SMA/ MA - SMK	 % % % %	 6,00 4,75 5,55 6,90	 6,30 5,75 6,30 7,40
	17.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,6	70,6
	18.	Angka Kematian Bayi	/1.000 kh	39	29
	19.	Angka Kematian Ibu	/100000 kh	410	310
	20.	Rasio Puskesmas per-100.000 penduduk	Rasio	5,5	6,4
	21.	Rasio posyandu per-100 balita	Rasio	0.95	2
	22.	Tumbuhnya Kewirausahaan Pemuda	%	55	75
	23.	Pemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga	%	45	80
	24.	Peran Forum Umat Beragama	%	75	90
4.	**Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera**				
	1.	Meningkatnya Jalan Kabupaten	Km	1.098,84	1.367,64
		a. Jenis jalan aspal	Km	270,20	353,94
		b. Jenis jalan kerikil	Km	61,93	142,57
		c. Jenis jalan tanah	Km	766,71	871,13
	2.	Meningkatkan pembangunan jalan desa	Km	508,35	777,15
	3.	Meningkatnya Panjang Jembatan Kabupaten a. Jembatan rangka baja b. Jembatan beton c. Jembatan kayu	m m m m	2.871,5 735 80 2.056,5	3.932 1.515 360,5 2.056,5
	4.	Meningkatnya Pembangunan Jembatan desa	m	1.858	1.978
	5.	Meningkatkan pembangunan jalan rabat beton pedesaan	m	6.500	29.050
	6.	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan Dinas PU	m	4.000	15.500
	7.	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran a. Jalan Rabat Beton/Aspal b. Jalan Kerikil/Tanah	m m m	13.579 2.301 11.269	49.761,43 41.563 62.179,21

NO.	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
				2010	2015
	8.	Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kota	m	17.156	49.513,57
		a. Konstruksi pasang batu/cor beton	m	3.434	39.970,57
		b. Jenis permukaan tanah	m	13.722	77.644
	9.	Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Baik	%	17,04	45,00
	10.	Menurunnya Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Rusak	%	59,08	35,00
	11.	% Peningkatan Sarana Irigasi	%	40	57
	12.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan	%	28,80	50,00
	13.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan	%	10,00	25,00
	14.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.338.503	1.406.781
	15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	80	95
	16.	Luas wilayah produktif	%	50	80
	17.	Pembangunan Kantor Desa	Kantor	113	281
	18.	Rehab Kantor Desa	Kantor	-	79
	19.	Pencari Kerja	Orang	2.653	2650
	20.	Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	402	950
5.	**Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis**				
	1.	Penataan Birokrasi Pelayanan Publik	%	75	95
	2.	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Publik	%	75	95
	3.	Jumlah PNS Daerah	Orang	6.139	7.162
	4.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan	%	75	95
	5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah	%	75	95
	6.	Partisipasi Politik Masyarakat	%	85	95
	7.	Kondisi Keamanan dan Ketertiban Sosial		Cukup Baik	Sangat Baik

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2011	2012	2013	2014	2015	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Persngkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5.38%	5,35%	5,67%	5,98%	6,33%	6,69%	6.69%
1.2	Inflasi	6.85%	5,85%	7,47%	6,14%	5,93%	5,42%	5.42%
1.3	PDRB Per Kapita (Rp.000)	RP. 9.332,96	Rp. 9.165,76	Rp. 9.734,59	Rp. 10.246,60	Rp. 10.932,50	Rp. 13.352,40	Rp. 13.852,40
1.4	Kebutuhan Investasi (Milyar)	475,47	654,32	875,89	928,43	1.023,49	1.267,86	1.267,86
1.5	Tingkat Pengangguran	3.12%	4%	3,90%	3,80%	3,60%	3,40%	3,40%
1.6	Tingkat Kemiskinan	11.50%	11,58%	10,07%	8,62%	8,00%	7,92%	7.92%

	Kesejahteraan Sosial							
1.	**Pendidikan**							
1.1	Angka Melek Huruf	91.91%	91,95%	92,12%	92,53%	93,63%	96,91%	96.91%
1.2	Angka Rata-Rata Lama Belajar	6.95 Tahun	6,98 Tahun	7,50 Tahun	8,00 Tahun	8,50 Tahun	9,00 Tahun	9.00 Tahun
1.3	APM SD/MI/Paket A	93.64%	94.11%	94.69%	95.15%	96.13%	98.64%	98.64%
1.4	APM SMP/MTs/Paket B	59.68%	60,12%	60,89%	62,12%	64,16%	64,68%	64.68%
1.5	APM SMA/SMK/MA/Paket C	27.28%	29,08%	29,38%	30,29%	31,11%	32,28%	32.28%
1.6	Total Nilai IPM	68	68,20	68,80	69,40	70	70	70
1.7	Prosentase Kelulusan							
	- SD/MI	98,92%	99,12%	100%	100%	100%	100%	100%
	- SMP/MTs	91,90%	96,90%	96,90%	96,90%	96,90%	96,90%	96,90%
	- SMA/MA	94,50%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	- SMK	96,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.8	Rata-Rata Nilai Ujian							
	- SD/MI	6,00	6,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
	- SMP/MTs	4,75	4,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	- SMA/MA	5,55	5,55	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
	- SMK	6,90	6,90	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40

2.	**Pelayanan Publik**							
2.1	Penataan Birokrasi Pelayanan Publik	75%	78%	80%	85%	89%	95%	95%
2.2	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Publik	75%	80%	83%	86%	90%	95%	95%
2.3	Jumlah PNS Daerah	6.139 Orang	6.286	6.622 Orang	6.802 Orang	6.982 Orang	7.162 Orang	7.162 Orang
2.4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	75%	77%%	80%	84%	87%	95%	95%
2.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah	75%	77%	80%	82%	85%	95%	95%
2.6	Partisipasi Politik Masyarakat	85%	87%	89%	91%	94%	95%	95%
2.7	Kondisi Keamanan dan Ketertiban Sosial	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.8	Pemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga	45%	50%	55%	60%	75%	80%	80%
2.9	Peran Forum Umat Beragama	75%	78%	80%	82%	85%	90%	90%

	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Umum Wajib							
1.	**Pendidikan**							
1.1	**Pendidikan Dasar**							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	98,00	98,00	98,25	98,75	99,25	99,75	99,75
1.1.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia	139,06	135,69	136,26	133,54	137,20	140,00	140,00
1.1.3	Rasio Terhadap Murid	20,00	20,00	19,00	18,00	17,00	15,00	15,00
1.1.4	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI	1.310 Orang	1.366 Orang	1.485 Orang	1.559 Orang	1.637 Orang	1.719 Orang	1.719 Orang
1.1.5	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs	580 Orang	780 Orang	819 Orang	860 Orang	903 Orang	948 Orang	948 Orang
1.2	**Pendidikan Menengah**							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	50,10	50,10	51,10	52,60	54,60	53,10	53,10
1.2.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Usia	3,95	3,95	4,25	4,55	4,75	4,88	4,88
1.2.3	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA	259 Orang	330 Orang	405 Orang	483 Orang	565 Orang	631 Orang	631 Orang
1.2.4	Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	83 Orang	85 Orang	89 Orang	94 Orang	98 Orang	103 Orang	103 Orang

2.	**Kesehatan**							
2.1	Rasio Posyandu per-100 Balita	0,95	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2
2.2	Rasio Puskesmas per-1000 Penduduk	5,5	5,5	5,5	5,8	6,1	6,4	6,4
2.3	Usia Harapan Hidup	68.6 Tahun	69 Tahun	69,4 Tahun	69,8 Tahun	70,2 Tahun	70,6 Tahun	70.6 Tahun
2.4	Angka Kematian Bayi/1.000 kh	39	37	35	33	31	29	29
2.5	Angka Kematian Ibu/100.000 Kh	410	390	370	350	330	310	310
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	**Pertanian**							
1.1	Produksi Padi	90.820 Ton	93.532 Ton	116.580 Ton	120.972 Ton	128.014 Ton	133.906 Ton	133.906 Ton
1.2	Produksi Padi Ladang	21.902 Ton	22.124 Ton	17.865 Ton	18.644 Ton	19.862 Ton	20.802 Ton	20.802 Ton
1.3	Produksi Padi Sawah	68.918 Ton	71.408 Ton	98.715 Ton	102.328 Ton	108.152 Ton	113.104 Ton	113.104 Ton
1.4	Luas Padi Ladang	12.734 Ha	14.189 Ha	8.651 Ha	8.972 Ha	9.472 Ha	9.835 Ha	9.835 Ha
1.5	Luas Padi Sawah	20.355 Ha	22.377 Ha	28.696 Ha	29.643 Ha	31.177 Ha	32.362 Ha	32.362 Ha
1.6	Luas Kebun Karet	81.635 Ha	84.056 Ha	85.836 Ha	90.186 Ha	94.536 Ha	96.635 Ha	96.635 Ha
1.7	Luas Kebun Sawit	69.626,61 Ha	75.000 Ha	82.500 Ha	91.000 Ha	100.000 Ha	110.000 Ha	110.000 Ha
1.8	Prosukdi Karet	34.720 Ton	38.200 Ton	39.323 Ton	42.403 Ton	42.851 Ton	43.164 Ton	43.164 Ton
1.9	Produksi Sawit/TBS	435.640,55 Ton	450.000 Ton	500.000 Ton	1.000.000 Ton	1.050.000 Ton	1.200.000 Ton	1.200.000 Ton

1.10	Peningkatan Produksi Holtikultura (Ton)	9.377,4 Ton	10.427 Ton	11.126 Ton	12.255 Ton	13.012 Ton	13.909 Ton	13.909 Ton
1.11	Peningkatan Produksi Peternakan	1.962 Ton	2.119 Ton	2.281 Ton	2.432 Ton	2.561 Ton	2.690 Ton	2.690 Ton
1.12	Kebutuhan hewan (ekor)	1.313.052 Ekor	1.444.356	1.588.792	1.747.671	1.922.438	2.114.682 Ekor	2.114.682 Ekor
1.13	Peningkatan Produksi Perikanan	1.119,85 Ton	1.703 Ton	2.058,8 Ton	2.391,6 Ton	2.876,4 Ton	3.119,10 Ton	3.119,10 Ton
2.	**Kehutanan**							
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	10.319 Ha	15.119 Ha	25.438 Ha	35.757 Ha	46.076 Ha	56.395 Ha	56.395 Ha
2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	410.294,65 Ha	409.694,65	408.544,65	404.194,65 Ha	399.844,65 Ha	395.494,65 Ha	395.494,65 Ha
2.3	Lahan Kritis	647.015,82 Ha	642.815,82	637.040,82 Ha	636.140,82 Ha	635.240,82 Ha	634.340,82 Ha	634.340,82 Ha
2.4	IUPHHK-HA	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
2.5	IUPHHK-HTI	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit
2.6	Produksi Kayu Bulat	108.524,01 M^3	160.125,35	23.898,78 M^3	123.899,78 M^3	123.900,78 M^3	123.901,78 M^3	123.901,78 M^3
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1	Tumbuhnya Kewirausahaan Pemuda	55%	58%	60%	63%	65%	70%	75%
1.2	Jumlah Koperasi	275 Unit	290 Unit	302 Unit	317 Unit	332 Unit	352 Unit	352 Unit

1.3	Jumlah UMKM	2.775 Unit	3.493 Unit	4.043 Unit	4.650 Unit	5.215 Unit	5.990 Unit	5.990 Unit
	- PT	100 Unit	128 Unit	148 Unit	170 Unit	195 Unit	225 Unit	225 Unit
	- CV	425 Unit	471 Unit	501 Unit	536 Unit	576 Unit	621 Unit	621 Unit
	- PO	2.250 Unit	2.894 Unit	3.394 Unit	3.944 Unit	4.544 Unit	5.144 Unit	5.144 Unit
1.4	Jumlah Industri Kecil Menengah	1.926 Unit	2.255 Unit	2.255 Unit	2.255 Unit	2.255 Unit	2.255 Unit	2.255 Unit
	a. IKM Formal :	169 Unit	342 Unit	342 Unit	342 Unit	342 Unit	342 Unit	342 Unit
	- Industri Kecil	88 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit
	- Industri Menengah	81 Unit	164 Unit	164 Unit	164 Unit	164 Unit	164 Unit	164 Unit
	b. IKM Non Formal	1.757 Unit	1.913 Unit	1.913 Unit	1.913 Unit	1.913 Unit	1.913 Unit	1.913 Unit
1.5	Jumlah Industri Besar	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit
1.6	Pencari Kerja	2.653 Orang	515 Orang	1.250 Orang	1.950 Orang	2.350 Orang	2.650 Orang	2.650 Orang
1.7	Pencari Kerja yang ditempatkan	402 Orang	170 Orang	450 Orang	650 Orang	850 Orang	950 Orang	950 Orang
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	**Perhubungan**							
1.1	Jumlah orang yang terangkut angkutan	1.338.503	1.351.888	1.365.407	1.379.061	1.392.852	1.406.781	1.406.781
1.2	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten	1.098,84 Km	1.121,84 Km	1.182,84 Km	1.243,64 Km	1.313,64 Km	1.367,64 Km	1.367,64 Km
	a. Jenis permukaan jalan aspal	270,20 Km	274,80 Km	293,10 Km	311,34 Km	332,34 Km	353,94 Km	353,94 Km
	b. Jenis permukaan kerikil	61,93 Km	68,83 Km	87,13 Km	105,37 Km	126,37 Km	142,57 Km	142,57 Km
	c. Jenis jalan tanah	766,71 Km	778,21 Km	802,61 Km	826,93 Km	854,93 Km	871,13 Km	871,13 Km

1.3	Meningkatnya pembangunan jalan desa	508,35 Km	531,35 Km	592,35 Km	653,15 Km	723,15 Km	777,15 Km	777,15 Km
1.4	Meningkatnya Panjang Jembatan Kabupaten	2.871,5 M	2.961,5 M	3.121,5 M	3.484 M	3.691 M	3.932 M	3.932 M
	a. Jembatan rangka baja	735 M	825 M	955 M	1.235 M	1.355 M	1.515 M	1.515 M
	b. Jembatan beton	80 M	80 M	110 M	192,5 M	279,5 M	360,5 M	360,5 M
	c. Jembatan kayu	2.056,5 M	2.056,5 M	2.056,5 M	2.056,5 M	2.056,5 M	2.056,5 M	2.056,5 M
1.5	Meningkatkan pembangunan jembatan desa	1.858 M	1.882 M	1.906 M	1.930 M	1.954 M	1.978 M	1.978 M
1.6	Meningkatkan pembangunan jalan rabat beton pedesaan	6.500 M	6.500 M	12.100 M	18.550 M	23.850 M	29.050 M	29.050 M
1.7	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan Dinas PU	- M	4.000 M	4.700 M	15.500 M	15.500 M	15.500 M	15.500 M
1.8	Meningkatkan pembangunan jalan lingkungan perkotaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemdam Kebakaran	13.579 M	26.474,15 M	41.038,58 M	42.907,15 M	46.664,09 M	49.761,43 M	49.761,43 M
	a. Jalan rabat beton/aspal	2.301 M	14.089,15 M	29.857,77 M	32.838,27 M	37.587,00 M	41.563,00 M	41.563,00 M
	b. Jalan kerikil/tanah	11.269 M	23.654 M	34.834,81 M	44.903,69 M	53.980,78 M	62.179,21 M	62.179,21 M
1.9	Saluran drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kota	17.156,00 M	26.065,00 M	37.380,00 M	40.772,69 M	45,020.02 M	49.513,57 M	49.513,57 M
	a. Jenis konstruksi pasangan batu/cor beton	3.434,00 M	10.208,00 M	23.295,00 M	27.920,69 M	33.435,02 M	39.970,57 M	39.970,57 M
	b. Jenis permukaan tanah	13.722,00 M	29.579,00 M	43.664,00 M	56.516,00 M	68.101,00 M	77.644,00 M	77.644,00 M
1.10	Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Baik	17.04%	20%	25%	30%	35%	40%	45%

1.11	Menurunnya Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kategori Rusak	59.08%	50%	45%	42%	40%	38%	35%
1.12	Pembangunan Kantor Desa	113 Kantor	143 Kantor	179 Kantor	213 Kantor	247 Kantor	281 Kantor	281 Kantor
1.13	Rehab Kantor Desa		-	-	26 Kantor	53 Kantor	79 Kantor	79 Kantor
2.	**Penataan Ruang**							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	80%	82%	85%	87%	90%	95%	95%
2.2	Luas wilayah produktif	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
3.	**Pengairan**							
3.1	Peningkatan sarana irigasi	40%	45%	50%	53%	55%	57%	57%
3.2	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan	28.80%	33%	35%	40%	45%	50%	50%
3.3	Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan	10%	12%	14%	18%	21%	25%	25%

BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1. Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2011-2015, maka dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Berikut adalah rancangan program transisi untuk Tahun 2015.

Tabel 9.1.
Program Utama Transisi

No	Program Utama	Sasaran	Indikator
1	Program Pengembangan Pendidikan	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional	1. Angka partisipasi sekolah 2. Angka kelulusan 3. Angka melek huruf
2	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan	1. Angka kematian bayi 2. Angka kematian ibu 3. Angka harapan hidup 4. Persentase balita bergizi buruk
3	Program Pembangunan Pertanian	1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya pendapatan petani 3. Terwujudnya swasembada pangan dan lumbung pangan 4. Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	1. Tingkat produktivitas pertanian 2. Pendapatan petani 3. Produksi perikanan dan peternakan
4	Program Pembangunan Industri Pengolahan	1. Meningkatnya produktivitas industri manufaktur 2. Meningkatnya pendapatan pekerja dan pengusaha 3. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Tingkat Produktivitas industri pengolahan 2. Pendapatan pekerja 3. Penerimaan pengusaha 4. Pendapatan daerah
5	Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan	1. Berkurangnya angka kemiskinan 2. Berkurangnya daerah tertinggal	1. Jumlah dan persentase penduduk miskin 2. Jumlah daerah tertinggal
6	Program Kerjasama Ekonomi dan Kelembagaan	1. Meningkatkan daya saing daerah 2. Meningkatnya daya tarik daerah 3. Meningkatnya Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) 4. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Nilai investasi PMDN 2. Nilai Investasi PMA 3. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN 4. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA

No	Program Utama	Sasaran	Indikator
7	Program Pembangunan Pemerintahan	1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatnya mutu layanan publik 3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Tingkat kecepatan layanan 2. Tingkat ketepatan layanan

Sumber : Analisis 2010

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Sintang, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sintang dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten Sintang dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sintang;

(3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;

(4) Setiap SKPD yang berbentuk Badan, Dinas, dan Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;

(5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang;

(6) Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;

(7) RKPD Kabupaten Sintang harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

(8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sintang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

(9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

(10) Dalam pelakasanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Sintang, Intansi vertikal di Kabupaten Sintang, maupun masyarakat sipil;

(11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

b. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;

d. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

(12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sintang dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, maka berbagai strategi, kebijakan, dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sintang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Sintang, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun;

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan renstra SKPD;

(4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

BAB X
PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 menjadi pendorong bagi terwujudnya Kabupaten Sintang yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY